



PERATURAN BUPATI LUWU

NO.80 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

Luwu



BAPPEDA

KABUPATEN LUWU



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 00 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provisnsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 75);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
30. Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Luwu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 67) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 20 (dua puluh), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun pembangunan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
20. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2022.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua) RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
 - BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - BAB VII : Penutup.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai:
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2022;
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUPA/P-PPAS 2022.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) BAPPEDA menyampaikan hasil verifikasi Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Renja PD.
- (5) Penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Agustus 2022



(Handwritten signature of Basmin Mattayang)

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ..30..

DAFTAR ISI

SAMPUL	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB1 PENDAHULUAN	I-1
1.1.LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD	I-9
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-10
BAB 2 HASIL EVALUASI TRIWULAN II RKPD 2022	II-1
2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA MAKRO	II-1
2.1.1.Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.2.PDRB Perkapita	II-4
2.1.3.Inflasi	II-6
2.1.4.Tingkat Pengangguran Terbuka	II-8
2.1.5. Kemiskinan.....	II-9
2.1.6. Gini Rasio	II-13
2.1.7. Indeks PEmbangunan Manusia	II-14
2.1.8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Luwu	II-15
2.2. EVALUASI PAGU INDIKATIF DAN REALIASI BELANJA	II-33
2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022	II-33
2.2.2. Evaluasi Capaian PEndanaan dan kinerja RKPD dan APBD Triwulan II Tahun 2022	II-37
2.2.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022	II-44
2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022	II-51
2.2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan	II-58
2.3. Hambatan dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022.....	II-63
2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan II	II-63
2.3.2. Rekomendasi.....	II-63
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..	III-1

3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III-1
3.1.1.	Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro	III-1
3.1.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	III-1
3.1.1.2.	Inflasi	III-2
3.1.1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-3
3.1.1.4.	Tingkat Kemiskinan.....	III-4
3.1.2.	Tantangan Perekonomian Daerah	III-5
3.1.2.1.	Aspek Eksternal	III-5
3.1.2.2.	Aspek Internal	III-7
3.1.3.	Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III-7
3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-9
3.2.1.	Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	III-9
3.2.2.	Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah	III-11
3.2.2.1.	Belanja Operasi	III-12
3.2.2.1.1.	Belanja Pegawai	III-12
3.2.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	III-12
3.2.2.1.3.	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	III-12
3.2.2.2.	Belanja Modal.....	III-13
3.2.2.3.	Belanja Tidak Terduga.....	III-14
3.2.2.4.	Belanja Transfer	III-14
3.2.2.4.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa	III-14
3.2.2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	III-14
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-17
BAB 4	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	IV-10
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV-10
4.2.2.	Sasaran dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	IV-15
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu.....	IV-22
4.2.3.1	Target Indikator Makro Pembangunan	IV-26
4.2.3.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-29
4.2.4.	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan... ..	IV-39
4.2.4.1	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022.....	IV-39

4.2.4.3	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2023	IV-41
4.3.	DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	IV-43
4.4.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-46
4.4.1	Arah Kebijakan	IV-49
BAB 5	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1.	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022	VI-1
5.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022.....	IV-2
5.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022	IV-7
BAB 6	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	VI-1
6.1.	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	VI-1
6.2.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	VI-2
6.3.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	VI-4
6.4.	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	VI-24
6.5.	INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTA (TPB).....	VI-28
BAB 7	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PDRB Perkapita Nasional, Sulawesi Selatan dan Kab. Luwu Tahun 2017-2022	II-5
Tabel 2.2. Garis Kemiskinan Kab. Luwu	II-12
Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kab. Luwu	II-15
Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Kab. Luwu	II-16
Tabel 2.5. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2022	II-34
Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Luwu Tahun 2022 Hingga Triwulan II	II-38
Tabel 2.7. Evaluasi RKPD Kab. Luwu TW II Tahun 2022	II-40
Tabel 2.8. Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kab. Luwu Tahun 2022...	II-46
Tabel 2.9. Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kab. Luwu Tahun 2022	II-53
Tabel 2.10. Capaian Kinerja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-59
Tabel 3.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	III-10
Tabel 3.2. Target Perubahan Belanja Daerah Kab. Luwu Tahun 2022 ..	III-16
Tabel 3.3. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kab. Luwu Tahun Anggaran 2022.....	III-18
Tabel 4.1. Penjelasan Visi Perubahan RPJMD Kab. Luwu Tahun 2019-2024	IV-3
Tabel 4.2. Perumusan Penjelasan Misi Perubahan RPJMD Kab. Luwu Tahun 2019-2024	IV-4
Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran RKPD Kab. Luwu Tahun 2023	IV-6
Tabel 4.4. Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Prioritas RKP Tahun 2022	IV-11
Tabel 4.5. Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022	IV-15
Tabel 4.6. Prioritas dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022	IV-17
Tabel 4.7. Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	IV-22
Tabel 4.8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	IV-24

Tabel 4.9. Target Sasaran Makro Pembangunan Kab. Luwu2022	IV-26
Tabel 4.10. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Luwu Tahun 2022	IV-28
Tabel 4.11. Dukungan Sasaran Perubahan RKPD Kab. Luwu Terhadap Sasaran RKP Tahun 2022	IV-40
Tabel 4.12. Dukungan Prioritas PEmbangunan Kab. Luwu Tahun 2022 terhadap Prioritas PEmbangunan Provinsi Sulawesi Selatan	IV-44
Tabel 4.13. Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah	IV-46
Tabel 4.14. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022	IV-50
Tabel 5.1. Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022.	V-2
Tabel 5.2. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022	V-4
Tabel 6.1. Capaian dan Target Indikator Makro Kab. Luwu Tahun 2021-2022	VI-2
Tabel 6.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Asumsi Capaian Tahun 2022	VI-3
Tabel 6.3. Capaian, Asumsi Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Kab. Luwu Tahun 2021-2023.....	VI-4
Tabel 6.4. Capaian dan Target Kinerja SPM Kab. Luwu Tahun 2021-2022	VI-25
Tabel 6.5. Capaian dan Target Kinerja TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2021-2022`	VI-29

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulse, Kab. Luwu Tahun 2017-2021 II-2
- Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 II-4
- Grafik 2.3. Perbandingan PDRB Perkapita Kab. Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 II-6
- Grafik 2.4. Perbandingan Inflasi Nasional, Provinsi Sulsel, Kab. Luwu Tahun 2017-2021 II-7
- Grafik 2.5. Perbandingan Inflasi Kab. Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 II-7
- Grafik 2.6. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulsel, dan Kab. Luwu Tahun 2017-2021 II-8
- Grafik 2.7. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 II-9
- Grafik 2.8. Persentase Penduduk Miskin Kab. Luwu dan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021 II-11
- Grafik 2.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kemiskinan (P2) Kab. Luwu Tahun 2017-2021 ... II-13
- Grafik 2.10. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Luwu, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 II-14
- Grafik 2.11. Perkembangan IPM Nasional, Prov Sulsel dan Kab. Luwu Tahun 2017-2021 II-14

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN
2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 1 (satu) tahun. Untuk menjamin keselarasan antara prioritas serta sasaran pembangunan dan program/kegiatan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta rencana kerja dan program strategis yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota. Ketentuan tentang penyusunan RKPD bagi pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan di atas, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu, Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/Program Strategis Nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, untuk menyesuaikan program dan kemampuan anggaran kondisi riil dilapangan tentunya perubahan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi ini kemudian dituangkan dalam bentuk RKPD Perubahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 Ayat (1) menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan atau
- b) Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kab. Luwu Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke III (ke-tiga) pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 telah mengakomodir tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perda perubahan RPJMD Kab. Luwu dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan amanat Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun Perubahan RKPD tahun anggaran 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) yang selanjutnya dibahas serta ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022, Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

- Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496)
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021
49. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22)
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);

54. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 112);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD kabupaten terhubung dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada, baik di tingkat nasional (RKP/program strategis nasional), provinsi (RKPD Provinsi), dan kabupaten (RPJMD Kabupaten). Secara singkat, hubungan antara RKPD Kabupaten Luwu dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu

Perubahan RKPD Kabupaten Luwu merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Perubahan RPJMD. Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan perencanaan yang partisipatif, Perubahan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

- Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan penyelarasan prioritas pembangunan antara Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan RKP/Program Strategis Nasional, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

- Perubahan RKPD Kabupaten Luwu dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Perubahan RKPD Kabupaten Luwu disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kab. Luwu dengan Bupati Luwu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2022.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang (1) latar belakang, (2) dasar hukum penyusunan, (3) hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) maksud dan tujuan, dan (5) sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat tentang (1) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD 2019-2024, (2) Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

Bab ini memaparkan rancangan tentang (1) Arah kebijakan ekonomi Daerah dan (2) Arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab ini menguraikan tentang (1) Sasaran Pembangunan Daerah dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

Bab ini memuat rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2022 dengan indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil kegiatan disertai pagu indikatifnya.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan

BAB VII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI TRIWULAN II RKPD 2022

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2021 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2022. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

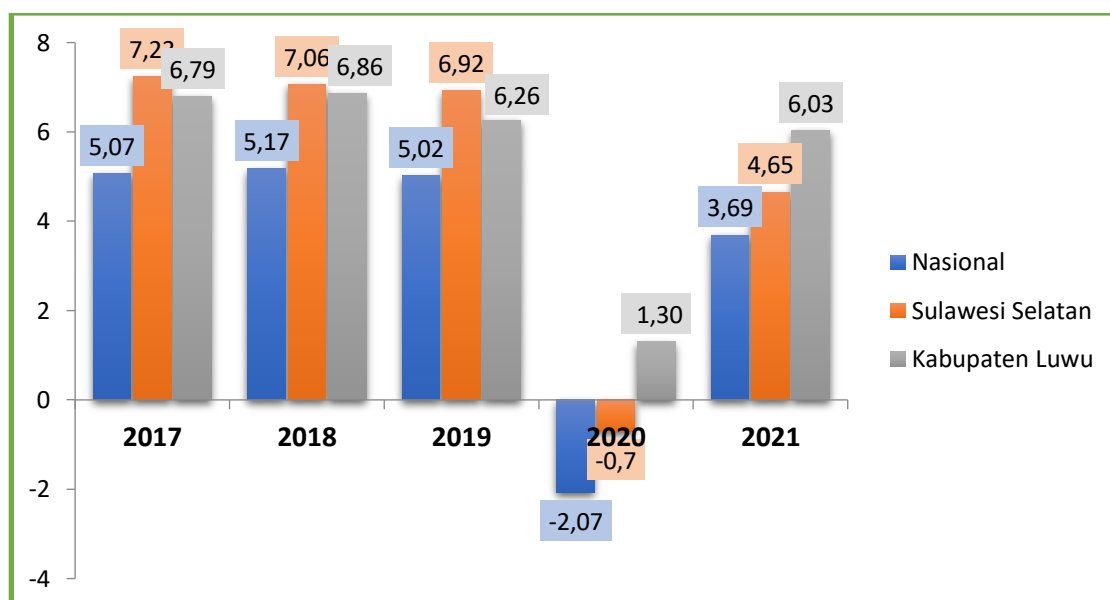
Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2022. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2022.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Sulawesi selatan, dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu. Adapun Realisasi Pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 6,03%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 1,30%.

Tahun 2017 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu berada di atas Nasional namun masih lebih rendah dari provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mengalami penurunan menjadi sebesar 1,30% tapi masih berada diatas nasional yang hanya sebesar -2,07% dan diatas provinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar -0,70%.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 3,65%. Perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha (LU). Ke depan, untuk mendorong perbaikan ekonomi, pemerintah terus meningkatkan koordinasi kebijakan dengan instansi terkait, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter-fiskal, kebijakan peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan, di tengah berlanjutnya akselerasi pelaksanaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan.

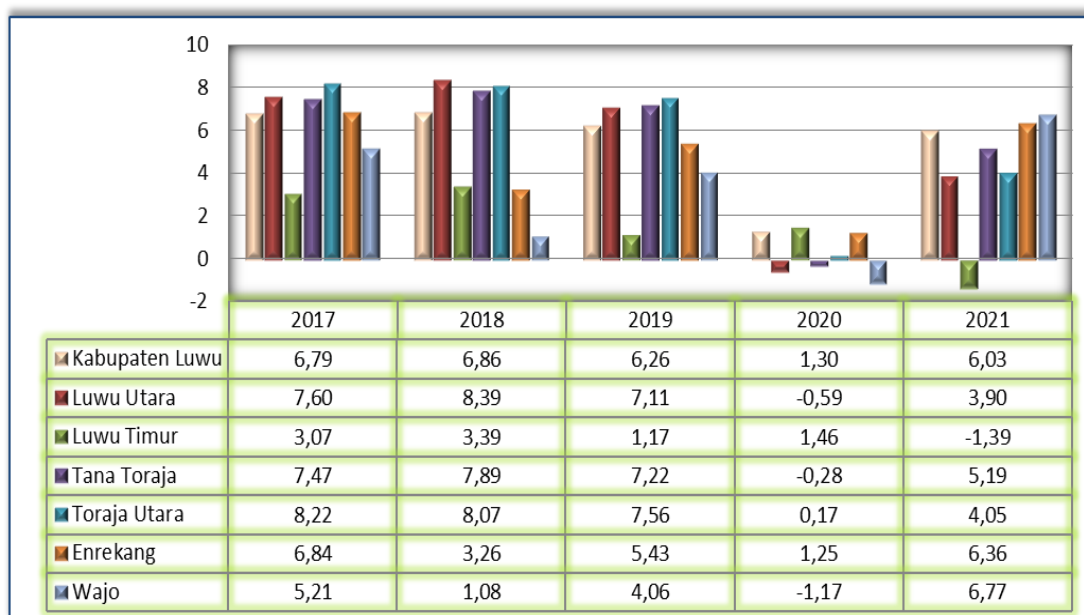
Pertumbuhan pada perekonomian nasional juga membawa ekonomi Sulawesi Selatan kembali tumbuh bahkan berada diatas nasional. Pemulihan ekonomi juga tercermin pada keseluruhan tahun 2021 dengan

pertumbuhan 4,65%. Perbaikan utamanya didorong oleh kinerja lapangan usaha utama Sulawesi Selatan, yaitu sektor Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertambangan. Perbaikan lapangan usaha sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan terjadi seiring dengan pembatalan rencana pelaksanaan PPKM level 3 pada periode HBKN Nataru merespon terkendalinya penyebaran pandemi dan membaiknya tingkat vaksinasi. Peningkatan pada sektor Pertambangan didorong oleh perbaikan produksi korporasi dan berlanjutnya tren kenaikan harga nikel. Di sisi lain, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur di akhir tahun karena target realisasi menyebabkan peningkatan pada sektor Konstruksi.

Sama halnya dengan perekonomian Kabupaten Luwu yang mengalami peningkatan signifikan yaitu 6,03%. Dimana capaian ini berada di atas capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir sebagian lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 10,52%. Hal ini sejalan dengan vaksinasi yang meluas tersebut, relaksasi pengetatan mobilitas juga diperkirakan mendukung peningkatan konsumsi. Kemudian disusul oleh sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 10,26%. Peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya pengunjung warung makan, cafe serta pengunjung di hotel yang ada di Kabupaten Luwu.

Untuk perbandingan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dengan wilayah sekitar dari tahun 2017-2019, maka Kabupaten Luwu menempati posisi ke-4 setelah Toraja Utara, Luwu Utara, dan Tana Toraja. Pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19 yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam. Namun, perekonomian di beberapa wilayah masih dapat tumbuh positif termasuk Kabupaten Luwu yang berada di posisi ke-2 setelah Luwu Timur dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,30%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu berada di angka 6,03% atau berada di posisi ke-3 setelah Wajo dan Enrekang. Sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dengan
Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai Pendapatan per kapita nasional tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 57,30 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2021 Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tumbuh 8,5% menjadi 62,20 juta rupiah. Pertumbuhan pendapatan tersebut seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia sebesar 3,69% pada tahun 2021. pendapatan penduduk Indonesia berhasil melampaui capaian sebelum terjadi pandemic Covid-19, yakni pada tahun 2019 sebesar 59,10 juta rupiah. Artinya PDB Per kapita nasional mencatat rekor tertinggi pada tahun 2021.

Nilai PDRB per kapita Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, kemudian turun tahun 2020. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 47,82 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019

mencapai 57,18 juta rupiah. Kemudian menurun menjadi 55,68 juta rupiah tahun 2020 dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 59,66 juta rupiah. Sedangkan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami trend peningkatan yaitu 33,23 juta rupiah menjadi 37,57 juta rupiah.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017-2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 36,56 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 48,55 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan, meskipun nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2017 nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar 24,05 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2021 menjadi sebesar 48,55 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

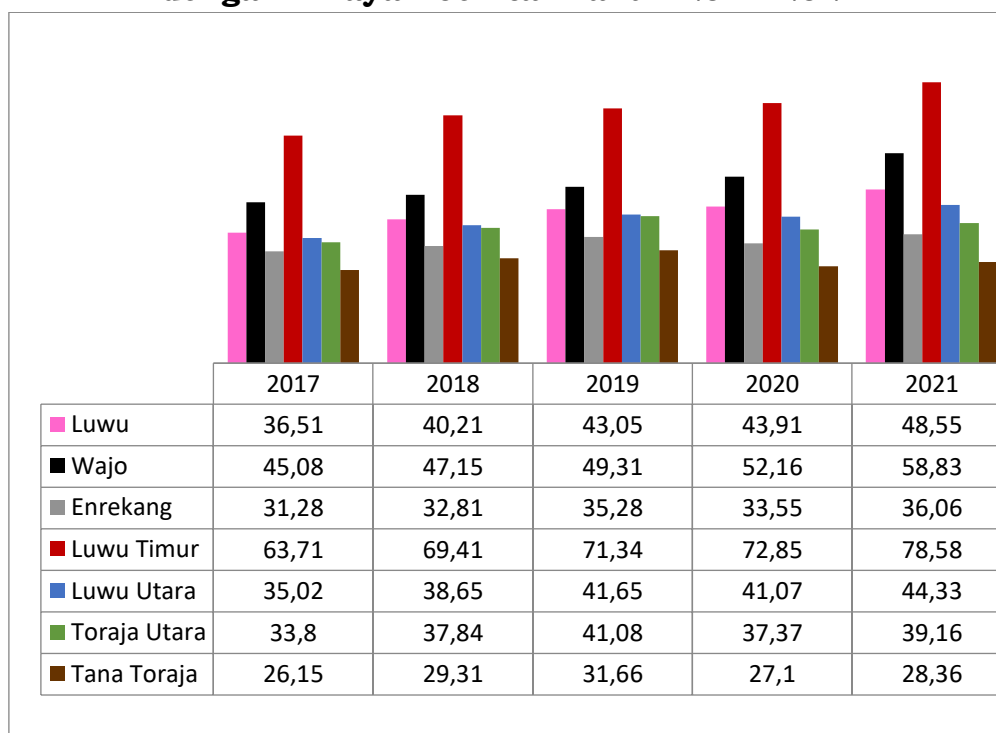
Tabel 2.1.
PDRB Perkapita Nasional, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)					
Kabupaten Luwu	24,05	25,49	26,87	27,03	28,44
Sulawesi Selatan	33,23	35,23	37,35	36,17	37,57
Nasional	37,85	39,34	41,02	39,78	40,78
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)					
Kabupaten Luwu	36,56	40,20	43,25	43,96	48,55
Sulawesi Selatan	47,82	52,64	57,03	56,51	59,66
Nasional	51,89	55,99	59,30	57,30	62,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022.

Untuk perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Luwu dengan wilayah sekitar dari tahun 2017-2021, maka Kabupaten Luwu menempati posisi ke-3 setelah Luwu Timur dan Wajo. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan perkapita Kabupaten Luwu cukup Tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar. Namun kembali lagi jika kita melihat dari segi jumlah penduduk bahwa Luwu Utara, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara berada di bawah Kabupaten Luwu, maka dari itu pendapatan per kapita juga rendah untuk empat wilayah tersebut. Sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3.
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Luwu
dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021



2.1.3. Inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

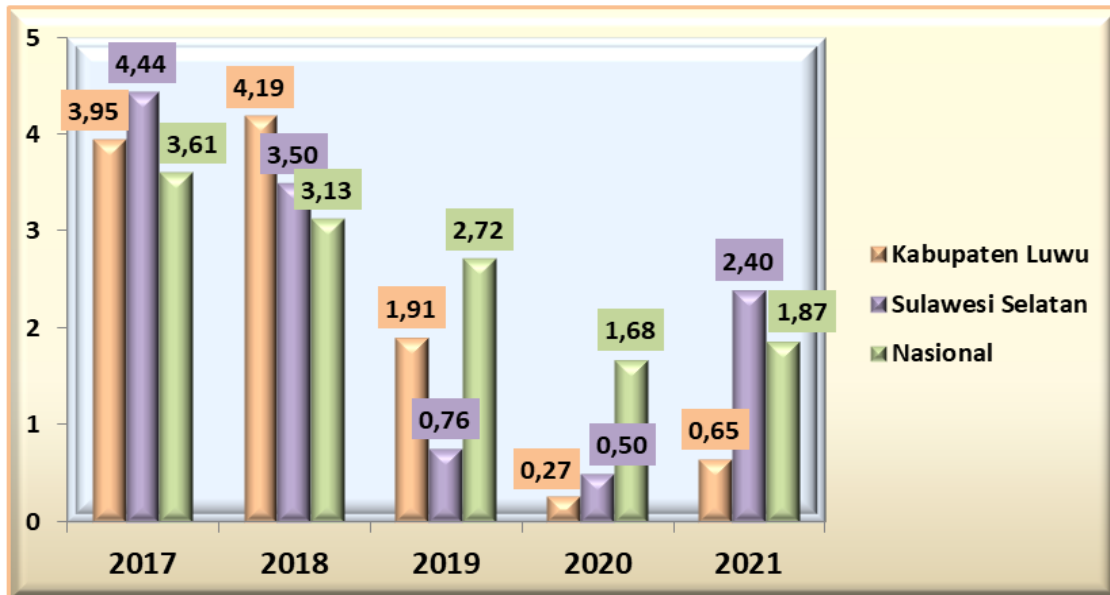
Sedangkan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (2021) tercatat yaitu sebesar 2,40%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 0,50%. Meningkatnya inflasi tahunan terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman khususnya komoditas cabai dan ikan. Komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi tahunan yang tinggi di kabupaten/kota zona inflasi yaitu Pare-pare, Makassar, Palopo, Watampone dan Bulukumba.

Sementara itu, perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK dilakukan dengan mengikuti perkembangan zona IHK Kota Palopo. Pada tahun 2021 nilai inflasi zona Kota Palopo tercatat sebesar 0,65%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,27%. Inflasi di Kota Palopo terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya

akumulasi indeks harga seluruh kelompok pengeluaran. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4.

Perbandingan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021

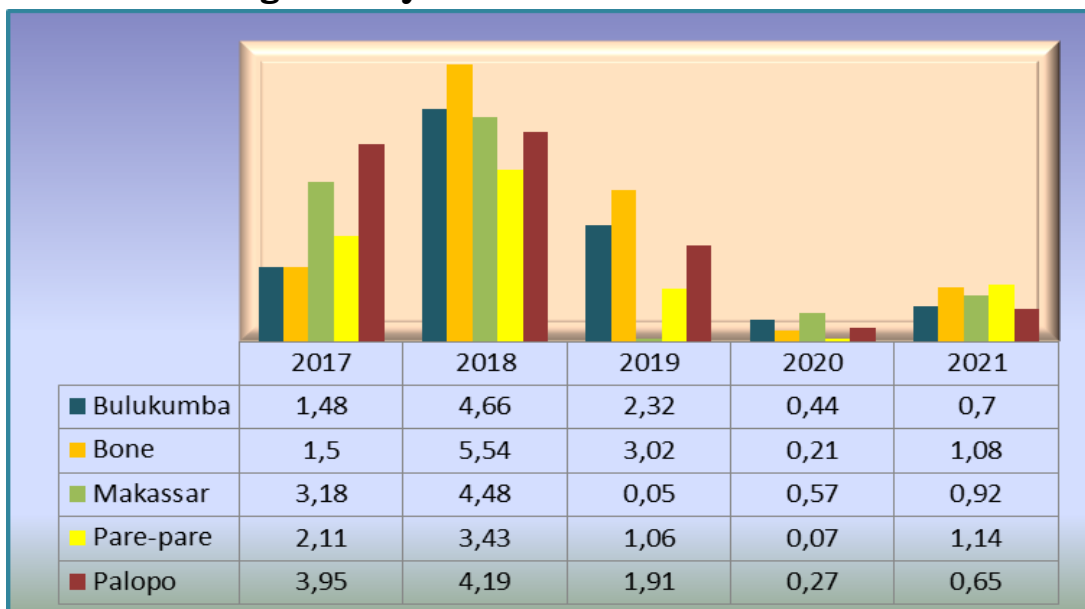


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Sementara jika dibandingkan dengan inflasi wilayah sekitar, maka perkembangan inflasi Kabupaten Luwu dari tahun 2017-2021, berada di posisi ke-4 tertinggi setelah Bone, Bulukumba, dan Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Luwu cukup Tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitar. Sebagaimana pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.5.

Perbandingan Inflasi Kabupaten Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

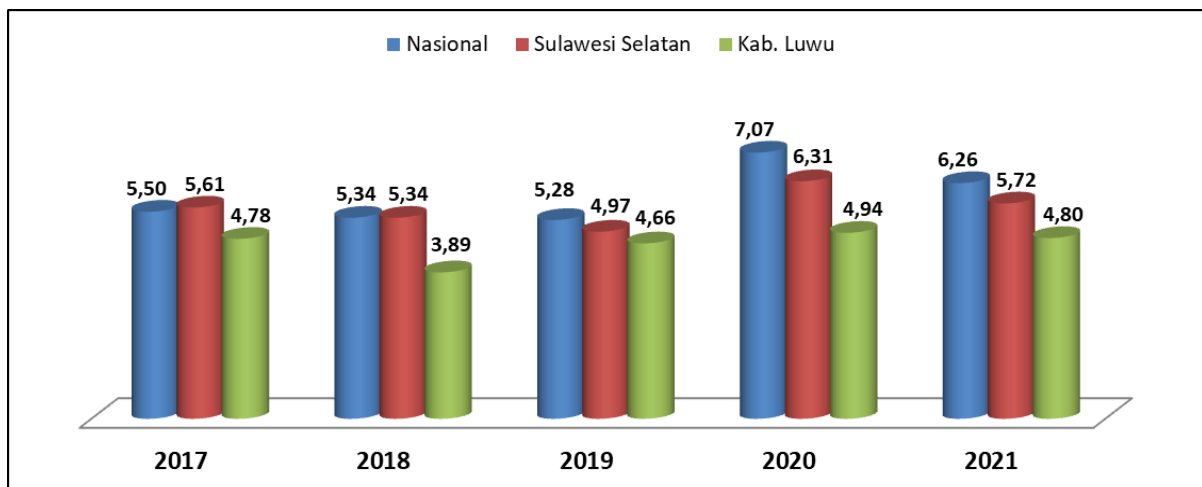
Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional selama lima tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu di mana pada tahun 2017 TPT Nasional berada di angka 5,50%, kemudian menurun pada tahun 2018-2019 menjadi 5,28%. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 7,07% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 6,26%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 5,72 persen. Kondisi tersebut lebih rendah jika dibandingkan TPT pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,31 persen. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu relatif meningkat selama periode 2018-2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,80%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan angka pengangguran yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja di wilayah Kabupaten Luwu selama tahun 2021. Untuk melihat tren perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

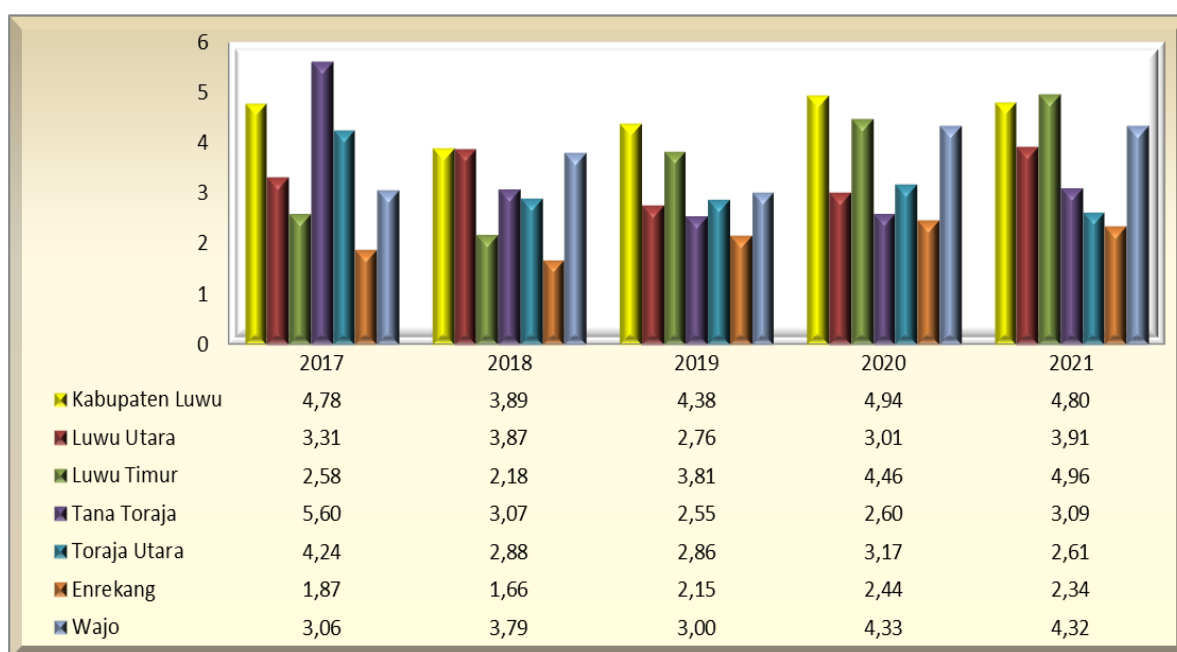
Grafik 2.6.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

Jika dibandingkan secara regional dengan wilayah sekitar selama lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu masih cenderung tinggi dengan persentase rata-rata 4% per tahun. Pada tahun 2021 Kabupaten Luwu berada di posisi ke-2 setelah Kabupaten Luwu Timur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,80%. Hal ini menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 171.703 orang, sebanyak 8.241 orang adalah pengangguran. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu dengan Wilayah Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan menjadi isu yang strategis dialami oleh berbagai negara di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Kemiskinan itu sendiri dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Oleh karena itu, penduduk miskin diartikan sebagai seseorang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

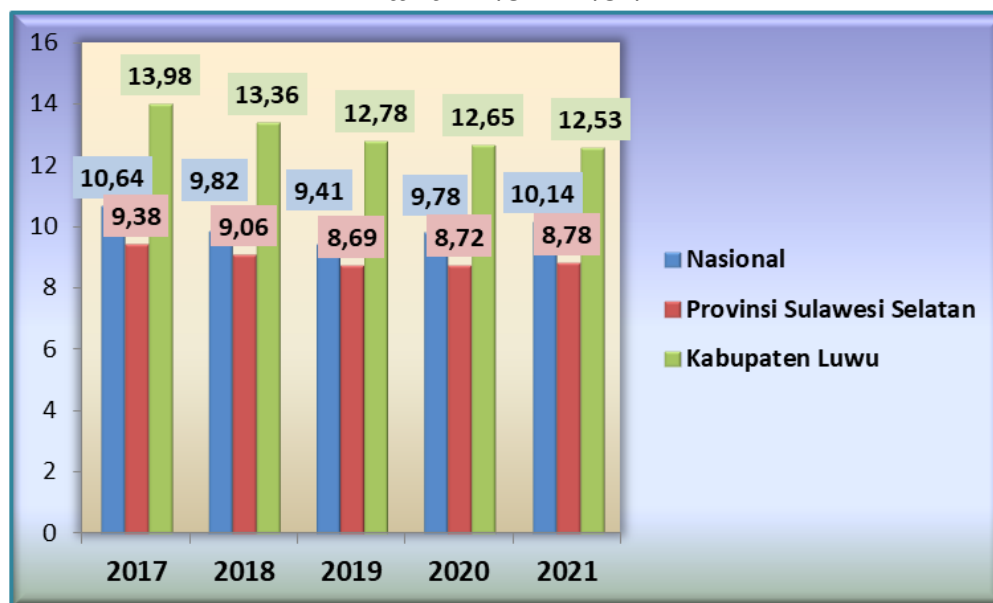
Tingkat kemiskinan nasional selama tahun 2017-2021 secara umum mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan yaitu dari 10,64 persen menjadi 9,41 persen. Kemudian pada tahun 2020-2021 meningkat yaitu dari 9,78 persen menjadi 10,14 persen.

Sementara tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan juga berfluktuasi selama lima tahun terakhir namun masih di bawah Nasional

dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan yaitu dari 9,38 persen menjadi 8,69 persen. Kemudian pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yaitu dari 8,72 persen menjadi 8,78 persen.

Sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Luwu cenderung menurun selama periode tahun 2017-2021 tetapi masih di atas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Luwu sebesar 13,98 persen; kemudian turun menjadi 13,36 persen pada tahun 2018; pada tahun 2019 kembali menurun menjadi sebesar 12,78. Trend penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2020 dan tahun 2021 yang masing-masing sebesar 12,65 persen dan 12,53 persen. Hal ini berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk miskin di Kabupaten Luwu semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga turut andil dalam menurunkan angka kemiskinan. Berikut disajikan grafik perkembangan kondisi kemiskinan Kabupaten Luwu tahun 2017-2021.

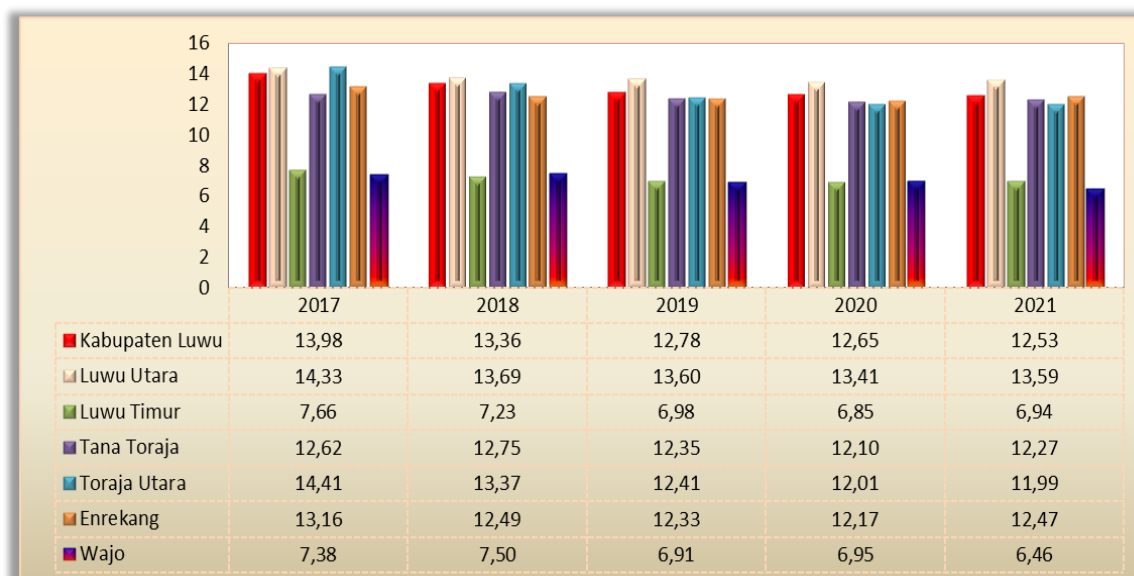
Grafik 2.6.
Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

Sementara itu, jika dibandingkan secara regional dengan wilayah sekitar, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir masih tergolong tinggi. Dimana pada tahun 2017-2018 Kabupaten Luwu menempati posisi ke-3 dengan tingkat kemiskinan tertinggi dari tujuh kabupaten sekitar. Sedangkan pada tahun 2019-2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu semakin meningkat dan berada di posisi ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Luwu Utara. Sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut.

Grafik 2.8.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu dan Wilayah Sekitar
Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Perhitungan garis kemiskinan diperoleh dengan menjumlahkan antara garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan dari Rp. 281.195 perkapita perbulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 359.925 perkapita perbulan pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan juga turut membaik. Dimana pada tahun 2017 persentase penduduk di atas garis kemiskinan berada di angka 86,02% meningkat menjadi 87,41% pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu
Tahun 2017-2021

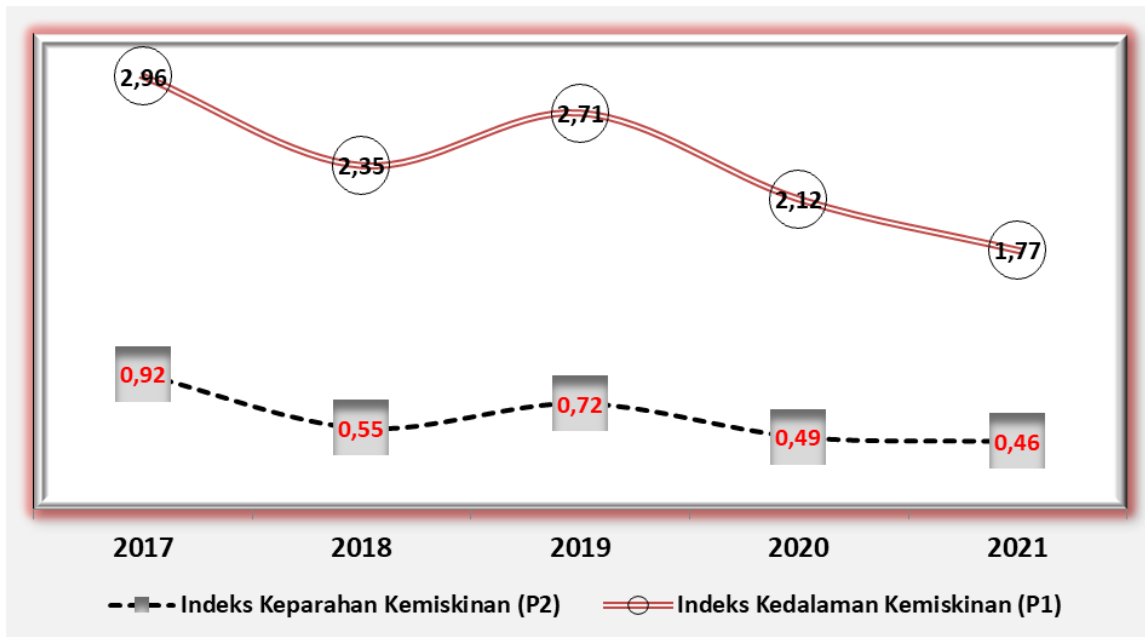
Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk diatas Garis kemiskinan (%)
2017	281.195	86,02
2018	305.722	86,64
2019	318.911	87,22
2020	347.539	87,35
2021	359.925	87,41

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Indeks/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2017 nilai indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 2,96 poin menjadi 1,77 poin pada tahun 2021. Sedangkan nilai indeks keparahan kemiskinan selama lima tahun terakhir berfluktuasi namun cenderung menurun, di mana angka tertinggi tercatat pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,92 poin dan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,46 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Luwu semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin menyempit. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.9.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

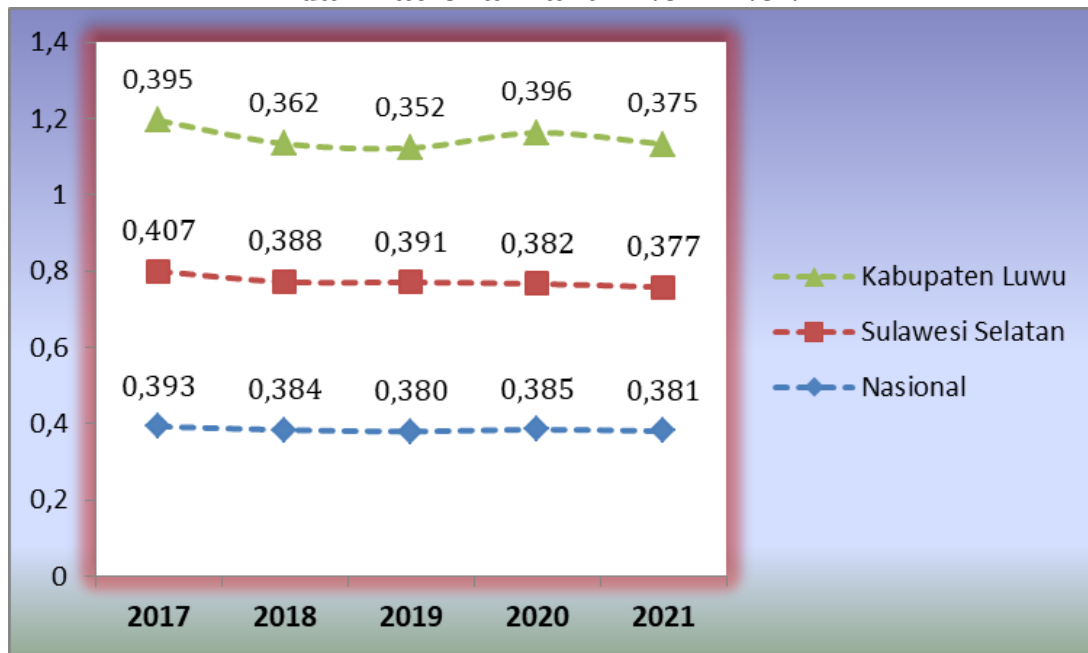
2.1.6. Gini Rasio

Pada tahun 2017-2019 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Rasio mengalami penurunan yaitu dari 0,393 poin menjadi 0,380 poin. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan 0,005 poin menjadi 0,385 poin dan menurun 0,004 poin pada tahun 2021 menjadi 0,381 poin.

Sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami penurunan yaitu dari 0,407 poin menjadi 0,377 poin. Hal ini disebabkan karena distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan peningkatan.

Sementara itu, perkembangan Gini Rasio Kabupaten Luwu antara tahun 2017-2021 berfluktuatif, dimana gini rasio yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 0,395 poin, yang salah satunya disebabkan oleh adanya ketimpangan pasar tenaga kerja di mana proporsi pekerja informal lebih rendah dibandingkan dengan pekerja formal sehingga produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan kecil. Kemudian pada tahun 2021 indeks gini turun menjadi 0,375 poin, hal tersebut disebabkan oleh pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu semakin membaik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10.
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

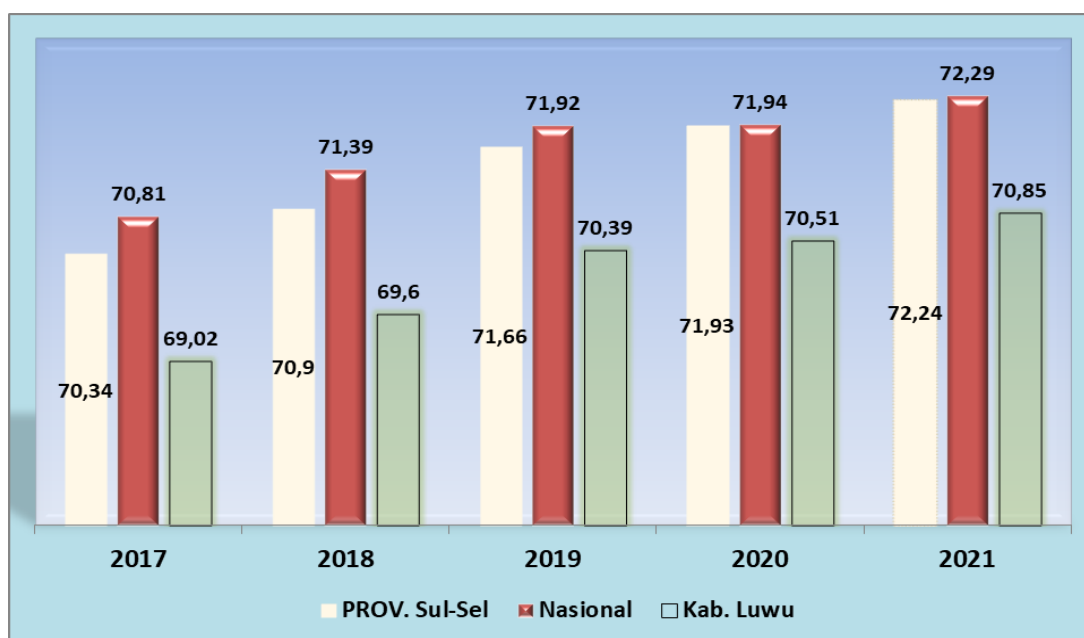
2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama lima tahun terakhir (2017-2021) selalu mengalami peningkatan yaitu dari 70,81 menjadi 72,29. Peningkatan IPM pada tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sedangkan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan naik 0,31 poin dari 71,93 pada 2020 menjadi 72,24 pada 2021. Peningkatan IPM pada 2021 terjadi pada semua komponen IPM yang meliputi kualitas kesehatan dan pendidikan serta pengeluaran perkapita.

Sementara pada tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Luwu tercatat sebesar 70,85 dan secara umum meningkat selama lima tahun terakhir. Dengan capaian ini Kabupaten Luwu berada diperingkat 9 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Sulawesi dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Luwu terutama dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah (RLS) serta pengeluaran perkapita yang masih jauh dari standar yang telah ditetapkan UNDP. Sementara itu untuk komponen lain seperti angka harapan hidup dan harapan lama sekolah sudah cukup baik meskipun masih perlu untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.11.
Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022.

2.1.8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan	Capaian	
		2020	2021
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	C (44,62)	C (49,21)
2. Nilai SAKIP	Skor Indeks	B (60,04)	B (60,08)
3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Opini	WTP	WTP
4. Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	70,80	70,85
5. Indeks Kesehatan	Skor Indeks	77,45	77,60
6. Indeks Pendidikan	Skor Indeks	64,49	65,03
7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor indeks	Cukup	Cukup
8. Tingkat Mobilitas	%	0,86	0,87
9. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0,97	0,97
10. Rasio Permukiman Layak Huni	%	-	0,97
11. Tingkat Kemiskinan	%	12,65	12,53
12. PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	44,02	48,55
13. Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80	81,28
14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	4,26	5,29
15. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor Indeks	76,01	74,31
16. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	3,20	2,80
17. Persentase desa berstatus	%	0,00	0,97

Indikator	Satuan	Capaian	
		2020	2021
mandiri			
18. Pertumbuhan ekonomi	%	1,30	6.03
19. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	11,06	7,66
20. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Penegakan Hukum	Skor Indeks	79,28	80,06
21. Cakupan Kasus Hukum yang difasilitasi	%	100,00	100,00
22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor Indeks	70,01	71,50
23. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor Indeks	192,23	187,71

Data yang tertuang dalam tabel diatas bersumber dari data BPS atau perangkat daerah yang terkait, merupakan gambaran dari kondisi tahun 2020-2021.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Luwu
Tahun 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB	%	6.03
2.	Laju Inflasi	%	0,65
3.	PDRB per kapita	Juta Rp	48,55
4.	Angka Melek Huruf	%	93,62
5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,39
7.	Angkat Harapan Hidup	Tahun	70,44
8.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03
9.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	5,06
10.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,22
12.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	60,38
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	38,11
14.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,43
15.	Penguatan cadangan pangan		48,12
16.	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5
17.	Ketersediaan pangan utama	%	68,78
18.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,21
19.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,07
20.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	3,94
21.	Pertumbuhan Industri	%	4,1
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
2.1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	771,10

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
2.2.	Nilai tukar petani		-
2.3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	53,98
2.4.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	89,41
2.5.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)	%	0,79
2.6.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100
2.7.	Rasio ketergantungan	%	61,33
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
A.	URUSAN WAJIB DASAR		
1.	PENDIDIKAN		
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	93,66
1.2.	Angka partisipasi kasar:		
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	94,36
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	80,93
1.2.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	8.317
1.3.	Angka Partisipasi Murni :		
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,14
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96,56
1.4.	Angka partisipasi sekolah :		
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	94,14
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	96,08
1.5.	Angka Putus Sekolah:		
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0
1.6.	Angka Kelulusan:		
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,58
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,04
1.7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98,80
1.8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,03
1.9.	Fasilitas Pendidikan:		
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	16,44
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	67,36
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	67,16
1.13.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,24
1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84,24
1.15.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	91,85
1.16.	Presentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik	%	0,00
1.17.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	N.A
1.18.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	N.A
1.19.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	N.A
1.20.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	N.A
2.	KESEHATAN		
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0.0002
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98.87

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	1.4
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0.001
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	234
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	0.01
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0.000006
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0.000005
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0.008
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0.013
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	93,10
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	84,45
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90,30
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)		NA
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100,00
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,75
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	45,00
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	252
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	7,10
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	40,35
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,00
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100,00
2.26.	Angka kejadian Malaria		117
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	NA
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,0000
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	NA
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	NA
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	56.66
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	100,00
2.35.	Cakupan puskesmas	%	100,00
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	54.42
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	81.71
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	87.83
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	70.37
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	NA
2.42.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	16
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	56.66
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	NA
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00
2.46.	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	22,00
2.47.	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	Tahun	1
2.48.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA
2.49.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,0009
2.50.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100
2.51.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91.14
2.52.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89.45
2.53.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91.88
2.54.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16
2.55.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,08
2.56.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA
2.57.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	61.3
2.58.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86.6
2.59.	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	79
2.60.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	42
2.61.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	84.36
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	34,55
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	17,76
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	86,53
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	47,56
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	81,40
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	68,36
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	NA
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	NA
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	6,15
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	46,18

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
3.12.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	8,26
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0,000020
3.14.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA
3.15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	18,81
3.16.	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	35,27
3.17.	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,87
3.18.	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Km	5.415
3.19.	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	N.A
3.20.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	80,00
3.21.	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	3
3.22.	Persentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	100,00
3.23.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka	8.904
3.24.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	81,39
3.25.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	4,15
3.26.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	5,38
3.27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	N.A
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
4.1.	Rasio rumah layak huni		0,207
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0688
4.3.	Rasio permukiman layak huni		0,97
4.4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,50
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	74,59
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,224
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,88
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	1.60
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,97
4.10.	Jumlah kawasan kumuh Kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	-
4.11.	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	100
4.12.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100,00
4.13.	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	100,00
4.14.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	N.A
4.15.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,119
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,70
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	100,00
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	95,00
5.4.	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15 menit
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Persen	100,00
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Gangguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	80,00
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	95,00
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	0,00
5.11.	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	60,00
5.12.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	25,00
5.13.	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	0
5.14.	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	29,72
5.15.	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0
5.16.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	30,00
5.17.	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	0
5.18.	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang dilaporkan	%	100
5.19.	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	0
5.20.	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	100,00
5.21.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	N.A
5.22.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	N.A
5.23.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	514
5.24.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
5.25.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15
6. SOSIAL			
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	30,45
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	12,35
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,63
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100,00
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	%	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
	sosial selama masa tanggap darurat		
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	3,39
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	69,12
6.10.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	98,00
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1.	TENAGA KERJA		
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	NA
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,36
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	Provinsi
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	68,35
1.6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Provinsi
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Provinsi
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	41,11
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	36,20
1.11.	Perluasan kesempatan kerja sector formal maupun informal	%	3,91
1.12.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	25,00
1.13.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	33,33
1.14.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta /Pekerja	104,71
1.15.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	22,03
1.16.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	7,97
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	28
2.4.	Rasio KDRT	%	0,001
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	35,42
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	-
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi	%	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
	perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.		
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	18,51
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,85
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00
2.14.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	94,14
2.15.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	96,56
2.16.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	-
2.17.	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	-
2.18.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	30,00
2.20.	Indeks Pembangunan Gender	%	92,58
2.21.	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	50,00
2.22.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	70,00
2.23.	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	75,00
2.24.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,19
2.25.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	80,00
2.26.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	24,00
3.	PANGAN		
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	68,78
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3.425
		Protein per Kpt	70,00
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00
3.4.	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/P erkapita /Perhari	3.425,00
3.5.	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	Pak	100,00
3.6.	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapi ta/Hari	66,00
4.	PERTANAHAN		
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	118,95
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	33,33
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	-
4.4.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-
4.5.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	-
4.6.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka	%	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
	penanaman modal		
4.7.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-
4.8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	33,33
5.	LINGKUNGAN HIDUP		
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	50,00
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	90,12
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	74,18
5.7.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada
5.8.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	1
5.9.	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standard Minimum	Jumlah	Tidak Ada
5.10.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	-
5.11.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah	-
5.12.	Terverifikasinya kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah	-
5.13.	Penetapan hak MHA	Jumlah	N.A
5.14.	Fasilitas kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0
5.15.	Fasilitas penyediaan sarana/prasarana	%	0
5.16.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	N.A
5.17.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Tidak ada
5.18.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00
5.19.	Timbulan sampah yang ditangani	%	77,13
5.20.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	7,53
5.21.	Persentase cakupan area pelayanan	%	27,27
5.22.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	77,13
5.23.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	50
5.24.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0
5.25.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0
5.26.	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	N.A
5.27.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	71,50
5.28.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Terlaksana/Belum	Terlaksana Belum Mencapai Target

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
5.29.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.		28
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	97,07
6.2.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	33,83
6.3.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	95,63
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,35
6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	ada
6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah
6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,07
6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,63
6.9.	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00
6.10.	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	100,00
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	98,55
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	228
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	227
7.4.	Persentase LSM aktif	%	44,06
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	0
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	418
7.9.	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	0
7.10.	Jumlah desa tertinggal	Jumlah	52
7.11.	Jumlah status desa mandiri	Jumlah	2
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,83
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,57
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	-
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	3-4
8.7.	Ratio Akseptor KB	Rasio	78,87
8.8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,95
8.9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	20,02
8.10.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,41
8.11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	%	23,73

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
	(MKJP)		
8.12.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	126,77
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	61,44
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	50,17
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	40,71
8.16.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09
8.17.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	168,18
8.18.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100
8.19.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	-
8.20.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00
8.21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	134,91
8.22.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75
8.23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	95,65
8.24.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-
8.25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-
8.26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	-
8.27.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	24-29 Th
8.28.	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	-
8.29.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah	85.410
8.30.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	40,90
8.31.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	67,95
8.32.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,41
9.	PERHUBUNGAN		
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	0
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	0
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	0/0/0
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	8,75
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	37,4
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	20,00
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0657
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	421300
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	575,60
9.11.	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan &	Jumlah	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
	Keselamatan Lalu Lintas		
9.12.	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah	0
9.13.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,80
9.14.	Kinerja lalu lintas kabupaten	Rasio	0,37
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	15,00
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80,00
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	75,00
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	55,00
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	35,00
10.6.	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	10
10.7.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	7
10.8.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	25,00
10.9.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	60,00
10.10.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia / Belum	Tersedia
10.11.	Persentase Website OPD	%	30,00
10.12.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	25,00
10.13.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,00
10.14.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	80,00
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	46,00
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	36,77
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	25.221
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	90,13
11.5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	18
11.6.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	27,16
11.7.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	90,13
12.	PENANAMAN MODAL		
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	17,53
12.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	17,25
12.4.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7
12.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2
12.6.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14
12.7.	Lama Proses Perizinan	hari	1-15
12.8.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4
12.9.	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7
12.10.	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3
12.11.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	20,96
12.12.	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
12.13.	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	85,00
12.14.	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13,00
12.15.	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	65,00
12.16.	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	75,00
13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50,00
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	N.A
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	N.A
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	N.A
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	N.A
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	N.A
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	31
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	2
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	
13.10.	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	1
13.11.	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	50,00
13.12.	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	N.A
13.13.	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	N.A
13.14.	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	N.A
13.15.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Jumlah	1
13.16.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	N.A
13.17.	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	%	80,00
13.18.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	50
13.19.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	50
14. STATISTIK			
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	ada
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada
14.4.	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	ada
14.5.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100,00
14.6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukakn evaluasi pembangunan daerah.	%	100,00
15. PERSANDIAN			
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100,00
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangat Kurang/ Kurang/ Cukup/ Baik/ Sangat Baik	Baik
15.3.	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
16.	KEBUDAYAAN		
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	4
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	-
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4
17.	PERPUSTAKAAN		
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	5,15
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	52.377
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00147
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	Jumlah	2.505
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	52.377
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100,00
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	2
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	0
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2
17.10.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A
17.11.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	N.A
18.	KEARSIPAN		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	52,45
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	7
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	4
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	13
18.5.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah	-
18.6.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah	-
C.	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.1.	Produksi perikanan	ton	645.919,16
1.2.	Konsumsi ikan	%	54,21
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10,00
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	41,18
1.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100
1.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	N.A
1.7.	Nilai tukar nelayan		N.A
2.	PARIWISATA		
2.1.	Kunjungan wisata	Jumlah	1.800

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	1
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	114,36
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	11
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	12
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	2
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	0
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	Jumlah	2
2.14.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,0
2.15.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	2,2
2.16.	Tingkat hunian akomodasi	%	0,5
2.17.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	38,98
2.18.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,09
3.	PERTANIAN		
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.249.42
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	7,00
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.631.475,00
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	53,21
3.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	-
3.6.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	-
3.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	5,84
3.8.	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,5
3.9.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10
6.	PERDAGANGAN		
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	9.380.224.938.000
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	65,64
6.3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	51,16
6.4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70,27
6.5.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	57,00
7.	PERINDUSTRIAN		
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	4,11
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
7.4.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah	81
7.5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	90
7.6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	70
7.7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	N.A
7.8.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A
7.9.	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini		Cukup
8.	TRANSMIGRASI		
8.1.	Transmigran swakarsa	KK	50
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	12
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254
D.	PENUNJANG URUSAN		
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100,00
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100,00
2	KEUANGAN		
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,59
2.3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,45
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	27,76
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	17,13
2.6.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20
2.7.	Persentase Belanja Operasi	%	63,44
2.8.	Persentase Belanja Modal	%	17,54
2.9.	Persentase Belanja Tidak Terduga	%	0,10
2.10.	Persentase Belanja Transfer	%	18,61
2.11.	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu
2.12.	Rasio PAD	%	9,41
2.13.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3
2.14.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
2.15.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	81,33
2.16.	Opini laporan keuangan	Opini	WTP
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	21
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,07
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	15
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	208
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	3348
3.7.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	%	N.A
3.8.	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat managerial	%	100%
3.9.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	-
3.10.	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,776%
3.11.	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	8%
3.12.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100%
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00
4.3.	PENERAPAN SIDA :		100,00
4.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00
4.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00
5	PENGAWASAN		
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	92%
5.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	92%
5.3.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	92%
5.4.	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	100%
5.5.	Jumlah temuan BPK	Jumlah	12
6	SEKRETARIAT DEWAN		
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada
7	SEKRETARIAT DAERAH		

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian 2021
6.4.	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	85,00
6.5.	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	290
6.6.	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	100
6.7.	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	NA
6.8.	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00
6.9.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100,00
6.10.	Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	5,96
6.11.	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	100,00
6.12.	Nilai LPPD	Nilai	N.A
6.13.	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	90,00
6.14.	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	100,00
6.15.	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100,00
6.16.	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretariat daerah yang diverifikasi	%	100,00
8	KECAMATAN		
6.1.	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	jumlah	22
6.2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00
6.3.	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100,00
6.4.	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	100,00

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan gambaran dari kondisi tahun 2021 yang diperoleh dari masing-masing perangkat daerah.

2.2. Evaluasi Pagu Indikatif dan Realisasi Belanja

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2022 yang terakomodir di APBD Tahun 2022 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun 2022. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2022

APBD 2022							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	10	21	103	12	21	109
2	DINAS KESEHATAN	5	19	76	5	19	97
3	RSUD BATARA GURU	1	1	1	1	1	5
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	11	22	77	12	22	78
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	6	16	60	6	16	60
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	10	39	5	10	41
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	2	12	39	2	12	43
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	36	3	10	36
9	DINAS SOSIAL	7	17	49	8	17	49
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	8	19	47	8	19	47
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	7	19	46	13	19	60
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	14	47	6	14	51
13	DINAS PERTANAHAN	4	9	22	3	10	22
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	18	45	8	19	46
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5	16	52	8	16	59

APBD 2022							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	5	10	31	5	10	32
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	4	13	41	4	13	41
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	11	34	5	11	78
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	13	48	5	13	50
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	12	22	57	12	22	61
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	6	13	41	6	13	42
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	14	37	4	15	39
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5	16	56	5	16	66
24	DINAS PERIKANAN	4	19	44	4	20	51
25	DINAS PARIWISATA	5	13	46	5	13	48
26	DINAS PERTANIAN	6	17	47	7	17	53
27	DINAS PERDAGANGAN	5	14	45	5	14	47
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	76	3	20	76
29	SEKRETARIAT DPRD	2	16	61	2	16	61
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG DAERAH	4	15	72	4	15	72
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3	14	73	3	14	73
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	10	90	2	10	93

APBD 2022							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	3	14	49	3	14	49
34	INSPEKTORAT	3	12	47	5	12	47
35	KECAMATAN BAJO	6	14	33	6	14	33
36	KECAMATAN BAJO BARAT	5	10	24	5	10	24
37	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	6	13	39	6	13	39
38	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	6	13	36	6	13	36
39	KECAMATAN BELOPA	6	13	34	6	13	34
40	KECAMATAN BELOPA UTARA	4	11	29	4	11	29
41	KECAMATAN BUPON	5	11	27	5	11	27
42	KECAMATAN KAMANRE	5	12	30	5	12	30
43	KECAMATAN LAMASI	5	13	29	5	13	29
44	KECAMATAN LAMASI TIMUR	5	9	23	5	9	23
45	KECAMATAN LAROMPONG	3	8	15	3	8	15
46	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	6	13	41	6	13	41
47	KECAMATAN LATIMOJONG	2	10	29	2	10	29
48	KECAMATAN PONRANG	4	11	32	4	11	32
49	KECAMATAN PONRANG SELATAN	4	11	35	4	11	35
50	KECAMATAN SULI	4	12	33	4	12	33
51	KECAMATAN SULI BARAT	6	18	47	6	18	47
52	KECAMATAN WALENRANG	6	14	35	6	14	35
53	KECAMATAN WALENRANG	6	13	33	6	13	33

APBD 2022							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
	BARAT						
54	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	4	10	31	4	10	31
55	KECAMATAN WALENRANG UTARA	6	15	34	6	15	34
56	KECAMATAN BUA	6	14	37	6	14	37
57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	12	43	6	12	43
	JUMLAH	283	779	2483	305	783	2631

Sumber : RKPD Pokok 2022, dan SIPD 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 283, jumlah kegiatan sebanyak 779 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 2383. Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 305, jumlah indikator kegiatan sebanyak 783, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 2.631.

2.2.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD dan APBD Triwulan II Tahun 2022

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Luwu Tahun 2022
Hingga Triwulan II

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	REALISASI s/d TW II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keu	Fisik
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	385.892.257.657	114.895.503.979	29,77	42,40
2	DINAS KESEHATAN	151.907.154.339	35.267.031.686	23,22	30,24
3	RSUD BATARA GURU	72.404.053.052	42.525.222.847	58,73	62,33
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	159.750.930.046	38.737.447.540	24,25	32,01
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	19.356.270.787	2.777.134.789	14,35	16,75
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.898.370.778	2.297.154.779	38,95	45,79
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	5.103.476.199	2.138.844.402	41,91	52,15
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.844.340.733	1.235.408.382	43,43	56,78
9	DINAS SOSIAL	4.608.483.976	1.942.282.700	42,15	52,85
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	6.075.757.451	2.770.536.162	45,60	53,82
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	3.057.468.815	1.245.209.636	40,73	58,71
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	6.833.384.504	1.620.261.961	23,71	31,08
13	DINAS PERTANAHAN	2.428.146.710	1.034.668.204	42,61	64,25
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.564.266.246	1.860.111.517	21,72	27,75
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	4.724.118.145	1.820.197.703	38,53	42,68
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	7.858.157.923	3.408.908.891	43,38	56,62
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	10.527.770.529	1.347.172.397	12,80	14,67
18	DINAS PERHUBUNGAN	8.599.297.013	2.387.299.054	27,76	38,43
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.333.310.866	2.124.856.762	39,84	66,23
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	3.223.362.010	1.266.909.056	39,30	64,76
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	3.974.065.360	1.468.364.148	36,95	58,60
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.916.558.866	2.026.085.718	25,59	34,40
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	14.208.022.188	1.628.047.329	11,46	12,94
24	DINAS PERIKANAN	10.939.934.308	1.536.193.453	14,04	16,34
25	DINAS PARIWISATA	4.202.077.503	1.520.310.291	36,18	56,69

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	REALISASI s/d TW II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keu	Fisik
26	DINAS PERTANIAN	29.969.764.332	7.926.091.065	26,45	35,96
27	DINAS PERDAGANGAN	7.423.821.451	2.478.947.672	33,39	50,13
28	SEKRETARIAT DAERAH	29.018.792.265	11.898.669.922	41,00	69,50
29	SEKRETARIAT DPRD	32.467.765.419	11.765.548.692	36,24	56,83
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG DAERAH	7.052.881.275	2.706.918.460	38,38	62,29
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	256.754.316.761	30.652.795.740	11,94	13,56
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.118.258.115	5.489.972.920	38,89	63,63
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	20.219.136.581	8.047.229.603	39,80	66,11
34	INSPEKTORAT	8.742.647.929	3.303.599.161	37,79	60,74
35	KECAMATAN BAJO	2.606.450.141	1.080.748.053	41,46	60,84
36	KECAMATAN BAJO BARAT	1.271.526.971	534.070.637	42,00	52,42
37	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	2.023.283.332	739.845.787	36,57	57,65
38	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.317.109.001	569.847.498	43,27	66,26
39	KECAMATAN BELOPA	5.137.648.756	1.763.698.036	34,33	52,27
40	KECAMATAN BELOPA UTARA	3.545.203.537	1.181.111.126	33,32	49,96
41	KECAMATAN BUPON	2.255.666.236	776.016.038	34,40	52,45
42	KECAMATAN KAMANRE	1.964.993.697	697.731.832	35,51	55,06
43	KECAMATAN LAMASI	2.624.990.728	1.053.979.503	40,15	57,09
44	KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.355.850.235	522.692.645	38,55	62,74
45	KECAMATAN LAROMPONG	2.562.703.424	977.336.577	38,14	61,65
46	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	2.316.591.946	825.787.478	35,65	55,39
47	KECAMATAN LATIMOJONG	1.431.926.111	149.400.102	10,43	11,65
48	KECAMATAN PONRANG	4.200.666.033	1.756.309.056	41,81	61,85
49	KECAMATAN PONRANG SELATAN	2.671.582.146	1.105.985.327	41,40	60,64
50	KECAMATAN SULI	2.121.124.128	789.510.672	37,22	59,29
51	KECAMATAN SULI BARAT	1.850.880.830	528.225.045	28,54	39,94
52	KECAMATAN WALENRANG	3.151.472.870	1.238.662.651	39,30	54,76
53	KECAMATAN WALENRANG BARAT	1.479.927.662	598.657.508	40,45	57,93
54	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.642.827.390	677.880.841	41,26	50,25
55	KECAMATAN WALENRANG UTARA	2.743.401.190	1.061.144.741	38,68	63,08

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu APBD	REALISASI s/d TW II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keu	Fisik
56	KECAMATAN BUA	3.991.419.693	1.841.304.128	46,13	65,64
57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.146.901.287	1.277.615.263	30,81	44,53
	JUMLAH	1.380.412.567.476	376.898.497.165	27,30	37,56

Sumber : Laporan Monev Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp.1.380.412.567.476,- anggaran tersebut terbagi atas 57 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 27,30%. Dari 57 perangkat daerah yang ada, terdapat 2 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45% yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 45% (tinggi) adalah RSUD Batara Guru dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

- RSUD Batara Guru dengan realisasi anggaran sebesar 58,73 persen dengan realisasi fisik sebesar 62,33 persen.
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar 45,60 dengan realisasi fisik sebesar 53,82 persen.

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20-<45%, dengan jumlah OPD sebanyak 51 dari keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 5 OPD yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20% hingga triwulan II.

Tabel 2.7

Evaluasi RKPD Kabupaten Luwu Triwulan II Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II			
		RKPD	Realisasi TW II	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	420.048.943.275	114.895.503.979	42,40	27,35
2	DINAS KESEHATAN	195.019.297.224	35.267.031.686	30,24	18,08
3	RSUD BATARA GURU	63.797.095.950	42.525.222.847	62,33	66,65

No.	Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II			
		RKPD	Realisasi TW II	K	Rp
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	161.319.459.805	38.737.447.540	32,01	24,01
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	24.392.965.668	2.777.134.789	16,75	11,38
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.996.793.577	2.297.154.779	45,79	38,31
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	4.040.206.200	2.138.844.402	52,15	52,94
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.914.795.917	1.235.408.382	56,78	31,56
9	DINAS SOSIAL	4.690.400.684	1.942.282.700	52,85	41,41
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	6.376.050.632	2.770.536.162	53,82	43,45
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	3.727.607.340	1.245.209.636	58,71	33,41
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.054.382.190	1.620.261.961	31,08	32,06
13	DINAS PERTANAHAN	2.462.868.637	1.034.668.204	64,25	42,01
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.351.806.954	1.860.111.517	27,75	34,76
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5.460.574.388	1.820.197.703	42,68	33,33
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	8.574.153.899	3.408.908.891	56,62	39,76
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	10.267.454.820	1.347.172.397	14,67	13,12
18	DINAS PERHUBUNGAN	12.849.387.820	2.387.299.054	38,43	18,58
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.824.206.947	2.124.856.762	66,23	36,48
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	2.964.617.789	1.266.909.056	64,76	42,73
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	4.398.953.066	1.468.364.148	58,60	33,38
22	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.603.197.941	2.026.085.718	34,40	17,46
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	4.806.682.177	1.628.047.329	12,94	33,87
24	DINAS PERIKANAN	6.136.573.715	1.536.193.453	16,34	25,03

No.	Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II			
		RKPD	Realisasi TW II	K	Rp
25	DINAS PARIWISATA	3.559.115.052	1.520.310.291	56,69	42,72
26	DINAS PERTANIAN	29.321.484.752	7.926.091.065	35,96	27,03
27	DINAS PERDAGANGAN	6.099.044.389	2.478.947.672	50,13	40,64
28	SEKRETARIAT DAERAH	39.438.223.811	11.898.669.922	69,50	30,17
29	SEKRETARIAT DPRD	32.722.296.089	11.765.548.692	56,83	35,96
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG DAERAH	7.276.183.399	2.706.918.460	62,29	37,20
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	279.988.885.803	30.652.795.740	13,56	10,95
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	13.416.645.571	5.489.972.920	63,63	40,92
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	49.822.261.495	8.047.229.603	66,11	16,15
34	INSPEKTORAT	11.553.514.548	3.303.599.161	60,74	28,59
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.430.687.146	1.277.615.263	30,81	28,84
36	KECAMATAN BAJO	3.075.763.644	1.080.748.053	70,84	35,14
37	KECAMATAN BAJO BARAT	1.548.225.019	534.070.637	72,42	34,50
38	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE	1.779.957.045	739.845.787	57,65	41,57
39	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA	1.457.854.132	569.847.498	76,26	39,09
40	KECAMATAN BELOPA	6.153.992.546	1.763.698.036	52,27	28,66
41	KECAMATAN BELOPA UTARA	3.946.625.264	1.181.111.126	49,96	29,93
42	KECAMATAN BUPON	2.307.624.573	776.016.038	52,45	33,63
43	KECAMATAN KAMANRE	2.431.393.685	697.731.832	55,06	28,70
44	KECAMATAN LAMASI	2.994.989.613	1.053.979.503	67,09	35,19
45	KECAMATAN LAMASI TIMUR	1.451.871.568	522.692.645	62,74	36,00

No.	Perangkat Daerah	Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II			
		RKPD	Realisasi TW II	K	Rp
46	KECAMATAN LAROMPONG	2.880.054.697	977.336.577	61,65	33,93
47	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN	2.505.113.816	825.787.478	55,39	32,96
48	KECAMATAN LATIMOJONG	1.251.663.506	149.400.102	11,65	11,94
49	KECAMATAN PONRANG	4.486.673.705	1.756.309.056	71,85	39,15
50	KECAMATAN PONRANG SELATAN	3.071.871.194	1.105.985.327	70,64	36,00
51	KECAMATAN SULI	2.372.214.974	789.510.672	59,29	33,28
52	KECAMATAN SULI BARAT	1.991.380.226	528.225.045	39,94	26,53
53	KECAMATAN WALENRANG	3.305.407.308	1.238.662.651	64,76	37,47
54	KECAMATAN WALENRANG BARAT	1.395.936.560	598.657.508	67,93	42,89
55	KECAMATAN WALENRANG TIMUR	1.784.400.753	677.880.841	70,25	37,99
56	KECAMATAN WALENRANG UTARA	3.204.527.460	1.061.144.741	63,08	33,11
57	KECAMATAN BUA	4.253.065.560	1.841.304.128	85,64	43,29
	Jumlah	1.517.703.567.327	376.898.497.165	32,35	24,83

Sumber : Laporan Monev Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Luwu tahun 2022 sebesar Rp.1.517.703.567.327,- anggaran tersebut terbagi atas 57 perangkat daerah. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 24,83%. Dari 57 perangkat daerah yang ada, terdapat 2 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45% yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkat daerah yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 45% (tinggi) adalah RSUD Batara Guru dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan.

- a. RSUD Batara Guru dengan realisasi anggaran sebesar 66,65 persen dengan realisasi fisik sebesar 62,33 persen.

- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan dengan realisasi anggaran sebesar 52,94 dengan realisasi fisik sebesar 52,15 persen.

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20-<45%, dengan jumlah OPD sebanyak 49 dari keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 8 OPD yang tergolong rendah dengan serapan anggaran kurang dari 20% hingga triwulan II.

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada seluruh perangkat daerah sebanyak 167 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 91 program atau 54,49 persen (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 44 program atau 26,35 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 32 program atau 19,16 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 502 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 231 kegiatan atau 46,02 persen

yang realisasi pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam karegori sedang sebanyak 152 kegiatan atau 30,28 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 119 kegiatan atau masih 23,71 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Level Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masingperangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.738 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat 1.122 sub kegiatan atau 64,56 persen yang capaian kinerja pendanaannya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 333 sub kegiatan, dan 283 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu
Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	10	8	1	1	21	12	8	1	103	93	7	3
2	DINAS KESEHATAN	5	3	1	1	19	8	6	5	76	44	27	5
3	RSUD BATARA GURU	1	0	0	1	4	1	0	3	5	1	1	3
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	11	7	3	1	22	12	7	3	77	51	17	9
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	6	4	1	1	16	8	4	4	60	41	7	12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	1	1	10	3	3	4	39	20	5	14
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	2	1	0	1	12	5	4	3	39	23	6	10

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	0	1	1	10	2	6	2	36	21	11	4
9	DINAS SOSIAL	7	3	2	2	17	2	8	7	49	24	11	14
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	8	3	2	3	19	9	5	5	47	22	12	13
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	7	3	3	1	19	7	4	8	46	29	9	8
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	3	0	2	14	6	5	3	47	30	12	5
13	DINAS PERTANAHAN	4	3	1	0	9	4	4	1	22	7	7	8
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	5	2	1	18	11	5	2	45	35	8	2
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5	4	1	0	16	10	5	1	52	35	8	9
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	5	3	1	1	10	5	2	3	31	16	8	7

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	4	3	1	0	13	12	1	0	41	34	6	1
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	2	0	1	11	4	3	4	34	33	0	1
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	2	2	1	13	6	3	4	48	27	10	11
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	12	11	0	1	22	10	5	7	57	43	8	6
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	6	3	1	2	13	5	2	6	41	22	3	16
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	2	1	1	14	6	6	2	37	24	10	3
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5	3	2	0	16	8	5	3	56	41	10	5
24	DINAS PERIKANAN	4	3	1	0	19	16	3	0	44	38	6	0
25	DINAS PARIWISATA	5	3	1	1	13	9	1	3	46	36	3	7

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	DINAS PERTANIAN	6	3	2	1	17	10	5	2	47	32	7	8
27	DINAS PERDAGANGAN	5	1	2	2	14	8	3	3	45	33	8	4
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	1	2	0	20	4	11	5	76	32	29	15
29	SEKRETARIAT DPRD	2	1	1	0	16	8	5	3	61	38	12	11
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG DAERAH	4	0	3	1	15	3	8	4	72	42	16	14
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3	1	1	1	14	3	3	8	73	34	12	27
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	0	0	2	10	3	1	6	90	67	7	16
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	3	1	2	0	14	5	6	3	49	24	17	8
34	INSPEKTORAT	3	1	2	0	12	6	5	1	47	30	13	4

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	4	1	1	12	7	4	1	43	29	8	6
	JUMLAH	167	91	44	32	502	231	152	119	1.738	1.122	333	283
	Total		167				502				1.738		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2022.

2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD Tahun 2022

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 167 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 94 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (didas 20-43 persen) terdapat 47 program, selebihnya sebanyak 26 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2022.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 502 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 176 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 195 kegiatan, selebihnya terdapat 131 kegiatan yang capaian kinerjanya masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2022.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.738 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 1.010 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 407 sub kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 321 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2022. Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9

**Rekapitulasi Capaian Kinerja berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Luwu
Tahun 2022**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	10	6	2	2	21	8	10	3	103	90	10	3
2	DINAS KESEHATAN	5	3	1	1	19	7	7	5	76	41	30	5
3	RSUD BATARA GURU	1	0	0	1	4	1	0	3	5	1	1	3
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	11	6	4	1	22	11	7	4	77	43	25	9
5	DINAS PERUMAHAN & PEMUKIMAN	6	4	2	0	16	6	6	4	60	40	8	12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	0	1	1	10	1	5	4	39	19	6	14

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	2	1	0	1	12	3	5	4	39	22	7	10
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	1	1	0	10	1	8	1	36	17	15	4
9	DINAS SOSIAL	7	5	1	1	17	1	9	7	49	16	20	13
10	DINAS KETENAGA KERJAAN & TRANSMIGRASI	8	6	2	0	19	6	8	5	47	17	15	15
11	DINAS PP & PERLINDUNGAN ANAK	7	3	3	1	19	6	7	6	46	27	9	10
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	3	0	2	14	2	9	3	47	28	12	7
13	DINAS PERTANAHAN	4	3	1	0	9	3	4	2	22	7	7	8
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	5	2	1	18	10	6	2	45	25	8	12

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	DINAS ADM.KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	5	4	1	0	16	7	6	3	52	34	9	9
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	5	3	1	1	10	2	5	3	31	15	10	6
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	4	3	1	0	13	5	6	2	41	34	6	1
18	DINAS PERHUBUNGAN	3	2	1	0	11	4	3	4	34	28	5	1
19	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5	2	2	1	13	7	2	4	48	26	11	11
20	DINAS KOPERASI UKM & PERINDUSTRIAN	12	11	0	1	22	10	5	7	57	39	12	6
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	6	3	1	2	13	2	5	6	41	19	6	16
22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	2	1	1	14	5	6	3	37	18	15	4

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tigtat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	5	3	2	0	16	5	5	6	56	37	11	8
24	DINAS PERIKANAN	4	3	1	0	19	14	4	1	44	34	6	4
25	DINAS PARIWISATA	5	3	1	1	13	8	2	3	46	32	7	7
26	DINAS PERTANIAN	6	3	2	1	17	8	7	2	47	25	10	12
27	DINAS PERDAGANGAN	5	1	2	2	14	5	6	3	45	30	9	6
28	SEKRETARIAT DAERAH	3	1	2	0	20	4	11	5	76	30	30	16
29	SEKRETARIAT DPRD	2	1	1	0	16	8	5	3	61	35	11	15
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN & LITBANG DAERAH	4	0	3	1	15	3	8	4	72	39	14	19

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%		0 - 20%	>20 - 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3	1	1	1	14	1	5	8	73	26	20	27
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	0	0	2	10	2	2	6	90	65	9	16
33	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	3	1	2	0	14	5	6	3	49	25	16	8
34	INSPEKTORAT	3	1	2	0	12	5	5	2	47	26	17	4
57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	4	1	1	12	6	4	2	43	23	14	6
	JUMLAH	167	94	47	26	502	176	195	131	1.738	1.010	407	321
	Total		167				502				1.738		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2022.

2.2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan

Realisasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Luwu berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 masuk dalam kategori tinggi (diatas 20 persen), demikian juga dengan realisasi anggaran sudah masuk kategori tinggi (diatas 20 persen) hal dimaksud digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk urusan pemeritnahan wajib yang berkaitan denagn pelayanan dasar capaian kinerja dan realisasi sudah dalam kategori tinggi.
2. Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kinerja dan realisasi keaungan sudah dalam kategori baik
3. Urusan Pemerintahan Pilihan rata-rata capaian kinerja dan keuangan sudah masuk kategori tinggi
4. urursan Pendukung Pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja dan keuangan sudah masuk kategori tinggi
5. urusan penunjang pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja dan keuangan masih pada kategori rendah
6. unsur pengawasan urusan pemerintahan rata-rata capaian kinerja dan keaungan sudah masuk kategori tinggi
7. unsur kewilayahan rata-rata capaian kinerja dan keungan sudah masuk dalam kategori tinggi.
8. unsur pemerintahan umum rata-rata capaian kineja dan keuangan sudah masuk kategori tinggi.

Tabel 2.10

Capaian Kinerja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN	RKPD	APBD	REALISASI	%	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN PREDIKAT KINERJA RKPD		
						K (%)	K	RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	882.931.723.786	890.149.776.652	241.816.031.104	27,17	37,30	T	T
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	419.625.991.591	385.594.758.057	114.895.503.979	29,80	42,44	T	T
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	258.816.393.174	224.088.746.076	77.792.254.533	34,71	53,17	T	T
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	161.431.960.725	237.757.426.960	38.737.447.540	16,29	19,46	R	R
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.392.965.668	24.254.173.873	2.777.134.789	11,45	12,93	R	R
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.952.110.294	13.846.187.710	5.671.407.563	40,96	69,38	T	T
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.712.302.334	4.608.483.976	1.942.282.700	42,15	72,85	T	T
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	90.758.252.281	93.475.824.298	26.054.625.358	27,87	38,64	T	T
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.034.287.292	6.040.392.651	2.770.536.162	45,87	84,73	T	T
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.727.607.340	3.057.468.815	1.245.209.636	40,73	68,71	T	T

NO	BIDANG URUSAN	RKPD	APBD	REALISASI	%	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN PREDIKAT KINERJA RKPD		
						K (%)	K	RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.054.382.190	6.833.384.504	1.620.261.961	23,71	31,08	T	T
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.462.868.637	2.778.146.460	1.034.668.204	37,24	59,35	T	T
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.410.206.954	8.564.266.246	1.860.111.517	21,72	27,75	T	T
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.460.574.388	4.724.118.145	1.820.197.703	38,53	62,68	T	T
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.783.964.714	7.898.151.523	3.408.908.891	43,16	75,94	T	T
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.286.954.820	10.527.770.529	1.347.172.397	12,80	14,67	R	R
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.816.786.820	8.599.297.013	2.387.299.054	27,76	38,43	T	T
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.660.651.257	5.251.321.166	2.124.856.762	40,46	67,96	T	T
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.664.627.311	2.723.371.532	1.266.909.056	46,52	86,99	T	T
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.398.953.066	3.974.065.360	1.468.364.148	36,95	58,60	T	T
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.603.197.941	7.916.558.866	2.026.085.718	25,59	34,40	T	T
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	76.776.000	37.299.450	5.947.820	15,95	18,97	R	R

NO	BIDANG URUSAN	RKPD	APBD	REALISASI	%	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN PREDIKAT KINERJA RKPD		
						K (%)	K	RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	86.779.690	44.690.250	23.059.200	51,60	93,81	T	T
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	422.951.684	297.499.600	16.989.800	5,71	6,06	R	R
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.698.935.952	14.162.890.513	1.628.047.329	11,50	12,99	R	R
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	107.746.225	45.131.675	0	-	-	R	R
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.529.384.476	53.434.954.272	13.930.685.185	26,07	35,26	T	T
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.050.905.415	10.939.934.308	1.536.193.453	14,04	16,34	R	R
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.559.115.052	4.202.077.503	1.520.310.291	36,18	56,69	T	T
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.178.565.802	30.018.759.332	7.926.091.065	26,40	35,88	T	T
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.099.044.389	7.423.821.451	2.478.947.672	33,39	50,13	T	T
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	299.990.478	814.996.878	463.507.704	56,87	75,83	T	T
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	341.763.340	35.364.800	5.635.000	15,93	18,95	R	R
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	72.160.519.900	61.858.080.823	23.664.218.614	38,26	61,96	T	T
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	39.438.223.811	29.390.315.404	11.898.669.922	40,49	68,02	T	T
4.02	SEKRETARIAT DPRD	32.722.296.089	32.467.765.419	11.765.548.692	36,24	56,83	T	T
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN	350.503.976.268	297.786.392.982	46.896.916.723	15,75	18,69	R	R

NO	BIDANG URUSAN	RKPD	APBD	REALISASI	%	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN PREDIKAT KINERJA RKPD		
						K (%)	K	RP
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	PEMERINTAHAN							
5.01	PERENCANAAN	6.465.257.319	6.510.019.785	2.513.860.051	38,62	62,91	T	T
5.02	KEUANGAN	293.405.531.374	270.359.375.126	36.142.768.660	13,37	15,43	R	R
5.03	KEPEGAWAIAN	45.816.635.625	19.323.658.581	8.047.229.603	41,64	71,36	T	T
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.005.625.870	895.478.000	0	-	-	R	R
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	810.926.080	697.861.490	193.058.409	27,66	38,24	T	T
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.553.514.548	9.276.647.929	3.303.599.161	35,61	55,31	T	T
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.553.514.548	9.276.647.929	3.303.599.161	35,61	55,31	T	T
7	UNSUR KEWILAYAHAN	59.896.601.998	54.267.246.057	20.469.945.281	37,72	60,57	T	T
7.01	KECAMATAN	59.896.601.998	54.267.246.057	20.469.945.281	37,72	60,57	T	T
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4.430.687.146	4.146.901.287	1.277.615.263	30,81	44,53	T	T
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.430.687.146	4.146.901.287	1.277.615.263	30,81	44,53	T	T

2.3. Hambatan dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2022

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2022 sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan kegiatan triwulan kedua

1. dipengaruhi oleh: Belum selarasnya perencanaan dengan penganggaran.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Terjadinya kendala dilapangan yang disebabkan oleh faktor cuaca.
4. Proses Pengadaan barang/jasa yang belum optimal.
5. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Renja Perangkat Daerah.
6. Belum konsistennya perangkat daerah dalam mengirim laporan pengendalian dan evaluasi renja perangkat daerah dengan lengkap dan tepat waktu.

2.3.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar ditingkatkan.
2. Perangkat Daerah diharapkan menyampaikan hasil evaluasi Renja secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Luwu.
3. Kapasitas aparatur perencana pada Perangkat Daerah dan Bappelitbangda Kabupaten Luwu dalam Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.
4. Hasil evaluasi RKPD 2022 menjadi bahan perumusan kebijakan RKPD selanjutnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dibidang ekonomi yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Daerah merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan tahunan daerah maupun jangka menengah daerah serta mengatasi isu strategis dan menyelesaikan permasalahan daerah yang dilakukan melalui prioritas perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada “Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Pemantapan reformasi birokrasi; Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan; Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; Percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter dan berbudidaya; Pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian hidup.

3.1.1. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

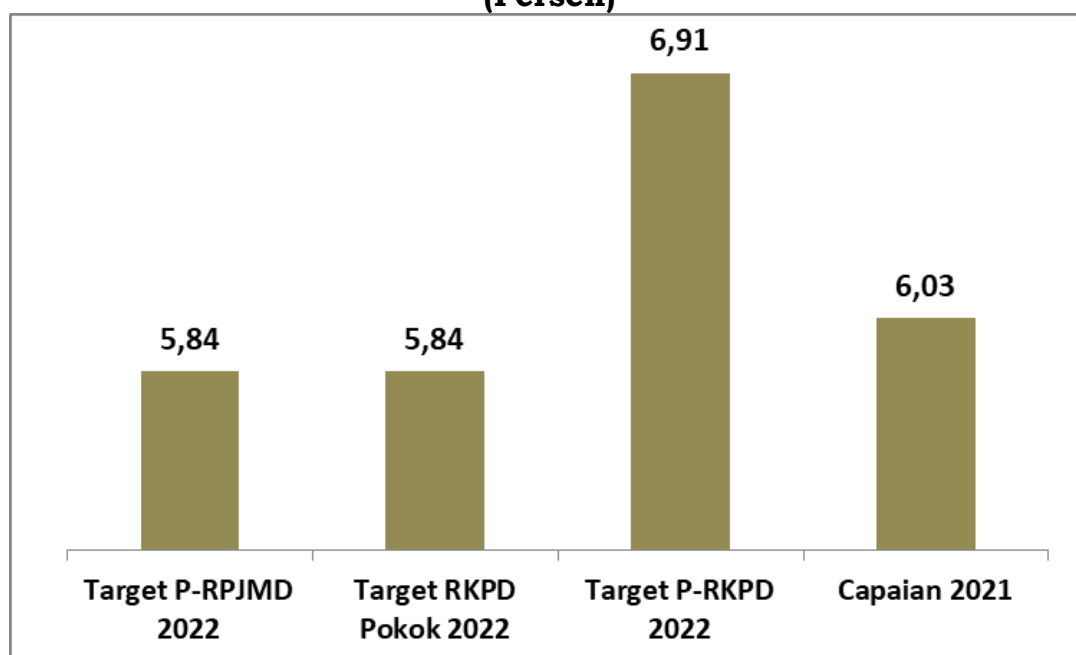
3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sebesar 6,03 persen, hal ini dikarenakan adanya pemulihan ekonomi memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 6,19 persen. Hal ini dikarenakan pemerintah akan melakukan pemantapan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 dengan mendorong

peningkatkan produktivitas komoditas unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah.

Kabupaten Luwu terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor unggulan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik Provinsi maupun Nasional. Kabupaten Luwu memiliki sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Tahun 2022 pemerintah aktif dalam mengikuti pameran UMKM dengan menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di tingkat Provinsi maupun Nasional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Luwu.

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021
(Persen)



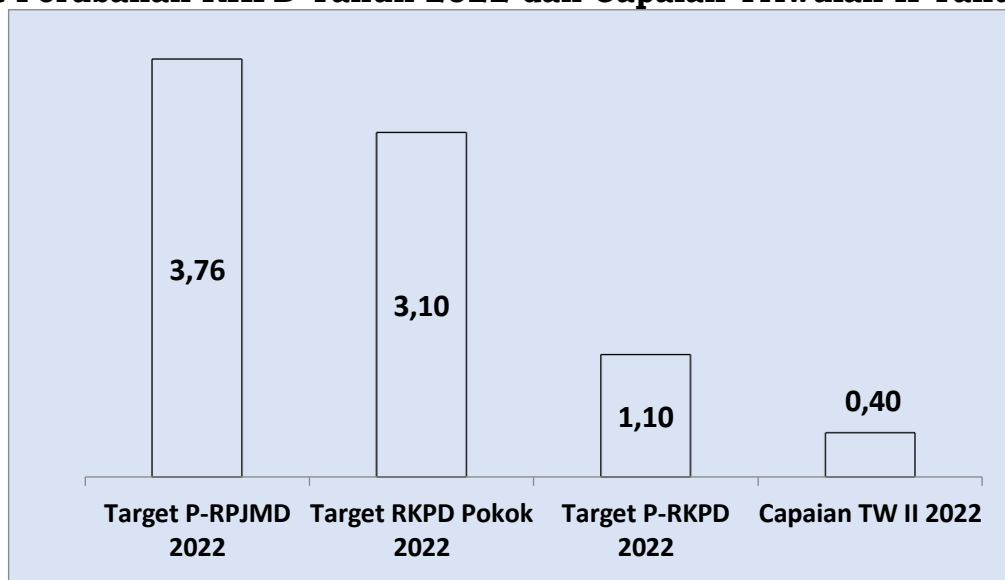
Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

3.1.1.2 Inflasi

Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 0,40 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2022 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh konsumsi pengeluaran masyarakat pada transportasi. Kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil negatif sebesar 0,01 terhadap inflasi bulan Juni Kabupaten Luwu. Deflasi pada transportasi disebabkan karena adanya penurunan harga tiket angkutan umum serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi triwulan III 2022 dapat meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut yang menjadi tantangan untuk TPID Kabupaten Luwu agar berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dengan 4K strategi yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

Grafik III.2.
Inflasi Kabupaten Luwu
Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022,
Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Triwulan II Tahun 2022

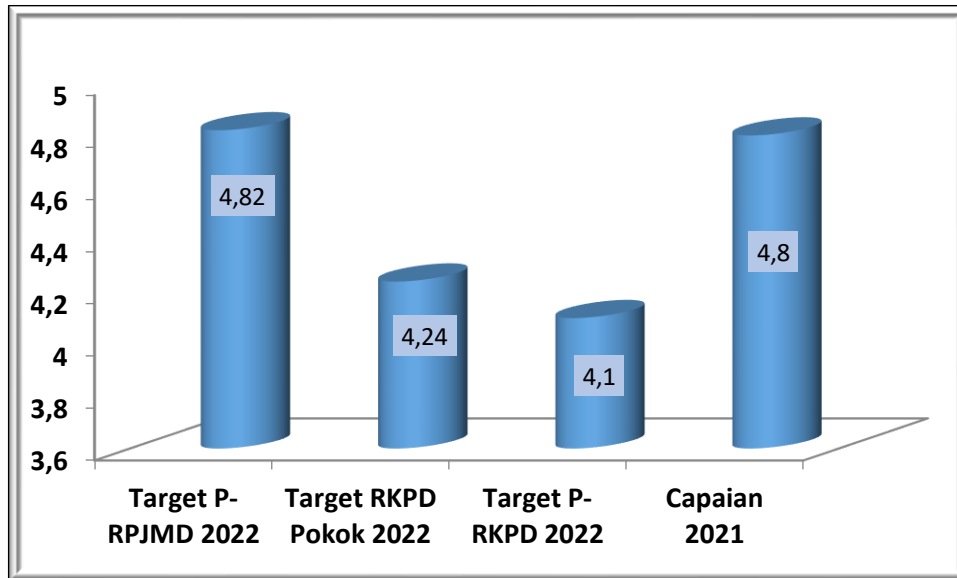


Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berbagai upaya pemerintah yang telah dianggap berhasil untuk keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi, termasuk mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak serta merta mendongkrak penurunan tingkat pengangguran, sehingga pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu sebesar 4,80 persen, lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 4,94 persen. Meskipun terjadi penurunan tetapi deviasinya hanya sebesar 0,14 poin. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat optimis menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu pada Tahun 2022 sebesar 4,10 persen, mengingat di tahun 2022 sudah ada perusahaan besar yang akan didirikan di Kabupaten Luwu, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan kualitas sumber daya manusia akan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang terdapat di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Luwu.

Grafik III.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu
Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022,
Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)

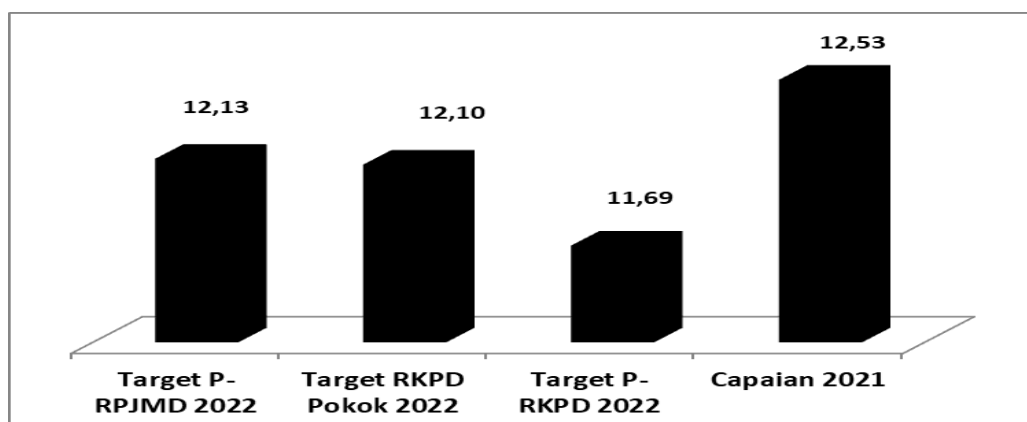


Sumber : BPS, Bappelitbangda Kabupaten Luwu.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, dengan adanya pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 maka tingkat kemiskinan pada tahun 2022 diharapkan juga akan turun menjadi 11,69 persen dibanding pada tahun 2021 yang mencapai 12,53 persen dan 2020 sebesar 12,65 persen. Dari segi trend kemiskinan mengalami penurunan, tetapi tidak serta merta ekonomi sosial di Kabupaten Luwu semakin membaik, karena Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kemiskinan yang ekstrem. Hal ini yang akan menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga penelitian maupun sektor swasta agar mampu mendongkrak angka penurunan kemiskinan sebesar 11,69 persen.

Grafik III.4.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu
Target Perubahan RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022,
Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021



Sumber : BPS & Bappelitbangda Kabupaten Luwu

3.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1 Aspek Eksternal

Perang menghadapi pandemi virus belum usai. Hampir seluruh negara, termasuk di Asia dan Asia Tenggara, harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula namun setelah mengalami pemulihan kuat pada tahun 2021, ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2023. Perekonomian negara berkembang diperkirakan belum mampu kembali menuju tren sebelum pandemi pada tahun 2022, berbeda dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan sudah kembali ke tren sebelum pandemi. Perlambatan ekonomi global tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat vaksinasi global antar negara, penyebaran varian baru COVID-19, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, berlanjutnya gangguan rantai pasok, dan dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*).

Pemulihan ekonomi global pada 2021 relatif tinggi, yakni 5,7%. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya bertumpu pada dua negara besar, yakni Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Ketidakseimbangan ekonomi global berlanjut di 2022 ini. Diperkirakan tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi dunia 4,4% tapi ketidakseimbangan masih berlanjut. ketidakseimbangan ini terjadi karena kemampuan untuk pulih dari Covid-19 tidak seimbang.

Di negara maju, vaksinasi bisa dilakukan dengan cepat. Stimulus besar-besaran juga dikeluarkan, seperti stimulus fiskal dan moneter. Kondisi berbeda terjadi di negara-negara berkembang yang kemampuannya terbatas. Banyak negara berkembang yang kemampuan membeli vaksin dan langkah-langkah menangani Covid terbatas. "Stimulus fiskal dan moneter juga terbatas, belum lagi banyak negara berkembang khususnya di Afrika terbebani utang. Inilah ketidakseimbangan ekonomi global.

Ada tujuh tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi global. Pertama, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Kedua, dampak luka memar akibat pandemi COVID-19 (*scarring effect*), Ketiga, Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda, Keempat, Meluasnya sistem pembayaran digital antar negara dan risiko asset kripto, Kelima, Tuntutan ekonomi keuangan hijau, Keenam, Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan, ketujuh, Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat. Kondisi itu menjadikan pemulihan ekonomi global menjadi semakin sulit dan harus dilakukan bersama. Kenaikan suku bunga The Fed Perry

diperkirakan akan terjadi 7x dari perkiraan awal 5x. Kondisi ini berdampak pada kenaikan suku bunga global dan persepsi risiko global. "Ini mempersulit negara berkembang untuk pulih karena harus atasi dampak dari ketidakpastian dan suku bunga global. Lalu, dampak luka memar atau scarring effect. Menurutnya, scarring effect ini mempengaruhi banyak korporasi di dunia. Sehingga, berdampak pada pemulihan ekonomi dan di banyak negara berkembang pemulihan dunia usaha adalah isu yang harus diatasi. Selanjutnya, masalah lainnya adalah ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga berpengaruh pada pemulihan ekonomi global. Kenaikan harga komoditas tidak hanya terjadi pada energi, namun juga pangan yang berdampak pada kenaikan inflasi dari berbagai Negara.

Tantangan yang dihadapi pemulihan ekonomi nasional adalah Perkembangan kasus Covid-19 baik global dan domestik relatif landai, namun kemunculan varian baru perlu diwaspadai. Vaksinasi tetap menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi, akselerasi vaksinasi perlu dilanjutkan terutama di tengah kemunculan varian baru. Seiring terkendalanya pandemi Covid-19, tantangan dan risiko global bergeser ke arah peningkatan harga komoditas, memanasnya tensi geopolitik, serta percepatan pengetatan moneter AS. Selain itu, disrupsi suplai yang tak berkesudahan, serta meningkatnya inflasi dan keterbatasan likuiditas global semakin menambah *downside risk* (risiko negatif) terhadap prospek perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global diprediksi melemah, meski proyeksi pertumbuhan global terkoreksi signifikan, *outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,1 persen, sementara IMF memprediksi Indonesia akan tumbuh 5,4 persen di periode yang sama. Pemulihan ekonomi domestik masih akan dibayangi tantangan dan risiko global, sehingga peran APBN sebagai *shock absorber* sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN agar tetap sustainabel dan kredibel. "Pertumbuhan ekonomi tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN, bahkan APBN sekarang bergeser sebagai instrumen untuk menjaga shock, tapi bukan lagi sebagai lokomotif utama untuk pertumbuhan ekonomi, karena mesin pertumbuhan sudah mulai menyala melalui konsumsi investasi dan ekspor,

Tekanan inflasi global yang masih terus berlanjut mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi mendorong peningkatan *cost of fund*, termasuk di Indonesia. Inflasi Indonesia dalam tren meningkat, namun masih relatif moderat. Hal ini tak lepas dari peran APBN sebagai *shock absorber* yang mampu menahan dampak kenaikan harga

komoditas global menjadi terbatas, sehingga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi dapat tetap terjaga.

3.1.2.2 Aspek Internal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2021 sudah semakin baik yaitu terjadi peningkatan sebesar 6,03 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1,30 persen. Peningkatan tersebut di dominasi perdagangan sebesar 9,68 persen dan pariwisata sebesar 10,26 persen. Berdasarkan capaian perekonomian tersebut, dapat dirumuskan tantangan perekonomian Kabupaten Luwu tahun 2023 sebagai berikut:

- ✓ Proaktif dalam mendorong sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan signifikan di tengah pandemi agar perekonomian semakin membaik, dan menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga dengan mengatasi kendala produksi.
- ✓ Terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi akibat belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah sehingga menyebabkan APBD Kabupaten Luwu masih sangat tergantung dengan dana transfer.
- ✓ Daya saing produk komoditi unggulan Kabupaten Luwu masih tergolong rendah akibat rendahnya kualitas SDM dan belum maksimalnya kerjasama.
- ✓ Rendahnya nilai jual hasil pertanian masyarakat akibat perubahan iklim dan kemampuan SDM petani. Nilai jual petani yang rendah juga dipengaruhi kurangnya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan produk lokal.

Tantangan tersebut di atas merupakan tantangan laten perekonomian Kabupaten Luwu. Untuk itu, dibutuhkan suatu strategi untuk mengubah berbagai tantangan yang ada sehingga perekonomian daerah Kabupaten Luwu mampu bertransformasi menuju tingkat yang lebih baik.

3.1.3 Arah Kebijakan Perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 6,03 persen. Maka dari itu pemerintah tetap optimis untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 6,91 persen. Perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai

aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Sulawesi Selatan pada tahun 2022 ditargetkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.1.
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun 2022	Target RKPD POKOK TAHUN 2022	Target Perubahan RKPD TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,84	5,84	6,91
2	Laju Inflasi	3,76	3,10	1,10
3	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	48,05	45,30	53,63
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13	12,1	11,69
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,01	72,01	71,04
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,82	4,24	4,1
7	Gini Rasio	0,380	0,347	0,361

Sumber: Bappelitbangda Kab. Luwu

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah dan mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar,

penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

3.2.1 Arah Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2022 masih bergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2022 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Tabel 3.1.
Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022

Uraian	RKPD Pokok 2022	Target Perubahan RPJMD 2022	Target Perubahan RKPD 2022	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-2
PENDAPATAN	1.518.261.846.508	1.610.207.103.070,61	1.454.395.824.300	(63.866.022.208)
Pendapatan Asli Daerah	120.145.000.000	150.075.000.000,00	120.859.615.879	714.615.879
Pajak Daerah	25.350.000.000	31.687.500.000,00	29.835.746.986	4.485.746.986
Retribusi Daerah	10.035.000.000	12.687.500.000,00	11.540.000.000	1.505.000.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.400.000.000	6.500.000.000,00	5.200.000.000	(200.000.000)
Lain-lain PAD yang Sah	79.360.000.000	99.200.000.000,00	74.283.868.893	(5.076.131.107)
Pendapatan Transfer	1.322.106.350.805	1.381.546.108.177,81	1.260.036.208.421	(62.070.142.384)
Pendapatan Transfer Pusat	1.261.183.285.596	1.312.732.887.400,00	1.185.465.656.824	(75.717.628.772)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.923.065.209	68.813.220.777,81	74.570.551.597	13.647.486.388
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	76.010.495.703	78.585.994.892,80	73.500.000.000	(2.510.495.703)
Hibah	5.710.495.703	13.841.989.772,80	73.500.000.000	67.789.504.297
Lain-lain pendapatan	70.300.000.000	64.744.005.120,00		(70.300.000.000)

3.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah merupakan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2022 akan dititik beratkan pada :

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan
4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Kawasan Permukiman
6. Penguatan Kelembagaan dan Komptensi ASN.

Dalam rangka mewujudkan Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal hanya terdiri dari Belanja Modal, Belanja Tidak terduga hanya terdiri dari Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah

dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

3.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3.2.2.1.3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Anggaran Daerah merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

1. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.2.4. Belanja Transfer

3.2.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2022, dan alokasi anggaran pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada Desa atau alokasi kurang salur pada tahun sebelumnya. Dari aspek teknis penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah maka akan diuraikan daftar nama pemerintah Desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

3.2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan epada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa didasarkan

pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun 2022, Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Luwu TA. 2022, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun 2022, Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Luwu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Luwu TA. 2022. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan tersebut adalah Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa.

Secara rinci proyeksi belanja daerah tahun 2022 sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022

Uraian	RKPD Pokok 2022	Perubahan RPJMD 2022	Target Perubahan RKPD 2022	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-2
BELANJA	1.518.261.846.508	1.610.207.103.278,30	1.475.950.546.489	(42.311.300.019)
BELANJA OPERASI	990.336.550.072	1.010.568.803.965,40	937.569.180.719	(52.767.369.353)
Belanja Pegawai	600.354.446.712	655.092.400.111,38	575.763.853.566	(24.590.593.146)
Belanja Barang dan Jasa	293.949.522.888	339.652.694.818,19	344.599.045.380	50.649.522.492
Belanja Hibah	94.661.080.472	15.165.097.810,83	16.811.781.773	(77.849.298.699)
Belanja Bantuan Sosial	1.371.500.000	658.611.225,00	394.500.000	(977.000.000)
BELANJA MODAL	259.976.792.436	306.386.618.442,00	291.505.875.951	31.529.083.515
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	3.285.306.000,00	5.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Transfer	264.948.504.000	289.966.374.870,90	241.875.489.819	(23.073.014.181)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.443.054.000	3.721.986.290,00	4.147.574.822	704.520.822
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	261.505.450.000	286.244.388.580,90	237.727.914.997	(23.777.535.003)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022

Uraian	RKPD Pokok 2022	Perubahan RPJMD 2022	Target Perubahan RKPD 2022	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3
Penerimaan Pembiayaan	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	24.554.722.189	9.000.000.000
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	24.554.722.189	9.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-			
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-			
Penerimaan pinjaman daerah	-			
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-			
Penerimaan piutang daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000	
Pembentukan dana cadangan	-			
Penyertaan modal (investasi) daerah	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000	-1.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	-			
Pemberian pinjaman daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-			
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	0	0	21.554.722.189	21.554.722.189

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 yang dirumuskan dalam rangka mencapai target janji Bupati Luwu yang termuat dalam visi misi Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 beserta permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan. Dokumen ini juga memuat kebijakan turunan dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Selain itu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 2011-2031, khususnya yang mengedepankan fokus pengembangan wilayah dan potensi sektor unggulan di Kabupaten Luwu.

Prioritas pembangunan disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, capaian target pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Sebagai substansi prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2022 mendasarkan dan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan pada Rancangan RKP 2022.
2. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah.
4. Arah kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
5. Penyelesaian terhadap masalah pembangunan tahun 2022.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Merujuk pada pengertian yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran dapat dimaknai sebagai rumusan strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang secara lengkap tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, maka perlu penjabaran lebih lanjut dengan menetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD, oleh karena itu rumusan tujuan dan sasaran Perubahan RKPD berpedoman pada atau diturunkan secara langsung dari Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 merupakan implementasi pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Visi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah **“KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI”**. Sasaran rumusan Visi tersebut dijabarkan pada 4 (Empat) pokok visi yang menjadi pilar utama dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penjelasan Visi Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi	Maju	terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.
	Sejahtera	keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.
	Mandiri	kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi Sumber Daya Alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia.
	Religi	kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Adapun Misi pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius;

7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan dan Sistem Pengupahan yang Berkeadilan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis Dan Kondusif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi Perubahan RPJMD

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Maju
2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	Menyelenggarakan penataan manajemen pendidikan dan kesehatan, memenuhi peningkatan SDM aparatur dan jumlah tenaga pendidik dan kesehatan, serta menjamin akses layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Sejahtera
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Membangun infrastruktur berkeadilan yang menghubungkan antar lapisan wilayah (pelosok dan terisolir) guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penunjang pemberian layanan yang reponsif	Maju
4	Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera, melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah	Mandiri dan Sejahtera
5	Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis	Mengembangkan inovasi pada pengelolaan pangan dari hulu hingga hilir berbasis agribisnis guna meningkatkan daya saing produktivitas perekonomian Luwu.	Mandiri
6	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius	Mengarahkan kehidupan beragama masyarakat Luwu mencerminkan pengamalan nilai-nilai agama untuk melahirkan manusia berakhlak	Religi
7	Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Memperkuat bentuk partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi anggaran dana desa. Kolaborasi yang melahirkan inovasi-inovasi masyarakat desa, terutama pemberdayaan kaum perempuan dan kaum pemuda di desa.	Mandiri

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
8	Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif	Meningkatnya nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan daerah untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Luwu.	Sejahtera
9	Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama penengakan Perda, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kepercayaan publik untuk turut berpartisipasi	Maju
10	Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana	Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan lingkungan hidup dengan maksud mencegah terjadinya bencana alam.	Sejahtera

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Berdasarkan analisis pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RKPd, tujuan dan sasaran Perubahan RKPd Kabupaten Luwu Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target		
				Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	56,31 (CC)	59,80 (CC)	59,80 (CC)	59,80 (CC)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	64,76 (B)	69,51 (B)	71,11 (BB)	71,11 (BB)
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,79	72,01	72,01	71,04
	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	64,98	65,44	65,44	65,44
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	77,69	78,30	78,30	78,30
Meningkatkan ketersediaan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Cukup	Baik	Baik	Baik

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target		
				Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	0,8649	0,8654	0,8654	0,8654
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,97	0,98	0,98	0,98
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Angka kemiskinan (%)	11,09	12,13	12,1	11,69
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)	48,55	48,05	45,30	53,63
Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	83	86	86	86
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	4,87	5,41	5,41	5,41
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius		Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,02	76,03	76,03	76,03

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target		
				Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	2,80	2,43	2,43	2,43
Meningkatkan pembangunan Desa		Jumlah desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	52	61	61	61
		Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju	0,97	1,45	1,45
Meningkatkan perekonomian daerah		Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.03	5,84	5,84	6,91
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	11,37	11,51	11,51
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80,06	81,27	81,27	81,27
		Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target		
				Perubahan RPJMD Tahun 2019 - 2024	RKPD Tahun 2022	Perubahan RKPD Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,25	72,63	72,63	72,63
	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	30,00	30,00	30,00

Sumber: 1. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
2. Bappelitbangda Tahun 2022

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2022 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2022 merupakan penjabaran dari prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2022 untuk menjaga keserasian rencana pembangunan.

Tema pembangunan RKP 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Dengan terjadinya pandemi global *Covid-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, maka tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". RKP Tahun 2022 menetapkan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Untuk mewujudkan Tema pembangunan RKP 2022 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Prioritas RKP Tahun 2022

Sasaran PN RKP	Indikator Sasaran PN RKP	Target 2022	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target Perubahan 2022
Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator	Pertumbuhan ekonomi	5,4-6,0	Meningkatkan perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,06
	Tingkat pengangguran terbuka	6,24-5,52		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,1
	Rasio gini	0,376-0,378		Gini Rasio	0,361
	Penurunan emisi gas rumah kaca	26,8-27,1			
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	73,44-73,48	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,04
	Tingkat kemiskinan	8,5-9,0	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	12,17

Sumber: 1. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021
2. Bappelitbangda

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada Diversifikasi ekonomi; Pemulihan daya beli dan usaha; Reformasi perlindungan sosial; Reformasi peningkatan kualitas SDM; Reformasi iklim investasi; dan Reformasi Kelembagaan.

Dengan arah kebijakan nasional diatas kemusian diturunkan dengan sepuluh strategi yaitu: (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9)

meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Sasaran dan prioritas penyusunan Perubahan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap:

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan

dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: mPengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi

mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada: Revolusi mental dalam sistem pendidikan; Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata

kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2022 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19. Adapun target pembangunan wilayah Sulawesi sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai mana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2022

Indikator	Target Tahun 2022					
	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sultra	Gorontalo	Sulbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.3-5.3	6.5-70	5.98-7.6	6.3 - 7.0	6.3 - 7.0	5.5 – 6.0
Tingkat Kemiskinan (%)	7.5-6.9	9.9	8,38-9.19	10.44	14.91-14.33	10.25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.18-6.47	3	6,16-6,95	3.49-4.22	14.11-13.91	3.2-2.5

Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP). Adapun perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Tahun 2022 adalah **“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”** dengan prioritas pembangunan Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya.
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup,

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan rumusan sasaran pembangunan meliputi:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
- b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan 2. Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah, dengan sasaran pembangunan meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.

Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah;
- b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat

Tujuan 4. Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif dan berkarakter, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan Pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan 5. Meningkatkan produktifitas pertumbuhan nilai tambah produk unggulan daerah, dengan rumusan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- a. meningkatkan hilirisasi ekonomi sector unggulan daerah,
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Adapun prioritas pembangunan dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dalam rangka pencapaian target-target pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Prioritas dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Prioritas	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
1	Pemantapan reformasi birokrasi	Pelebagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas	Dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas dilakukan beberapa hal yaitu: Penguatan implementasi manajemen ASN melalui peningkatan profesionalitas ASN, Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi, Perluasan penerapan inovasi pelayanan public, Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
2	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dan energi terbarukan dengan cara meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
		Peningkatan kualitas dan kemantapan jalan provinsi serta pembangunan infrastuktur wilayah terisolir	Peningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air
		Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman	Penyediaan akses air minum dan sanitasi kawasan permukiman melalui Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah pesisir, kepulauan dan daerah rawan air lainnya
3	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah	Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana-prasarana, teknologi, dan mikro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i)

No	Prioritas	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		pertumbuhan ekonomi baru	meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
		Pembangunan dan pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam	Pembangunan dan pengelolaan Rest Area melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam dan berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat
		Pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;	Melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif, Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta Pilar kreativitas. Pemantapan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
		Perluasan Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;	Peningkatan kerja sama dengan melakukan promosi pariwisata, travel fair, hospitality care; Pengembangan destinasi wisata berkualitas yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata pada kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) maupun kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya pada Kawasan Toraja yang memegang peran sebagai KSPN sekaligus serta pembangunan potensi wisata baru berbasis Rest Area yang berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat

No	Prioritas	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		Pengembangan dan Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui channelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi, dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
		Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial	Peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema perhutanan sosial, Peningkatan produksi sektor kehutanan dengan memberikan stimulus berupa bantuan bibit tanaman porang, lebah madu, jahe merah serta saran pendukung lain;
4	Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Peningkatan moralitas dan karakter peserta didik dan tenaga kependidikan menengah dengan merancang dan menerapkan integrasi nilai-nilai moral dan karakter dalam proses belajar mengajar	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, kehidupan bernegara, edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik
		Akselerasi pembangunan rumah sakit regional	Pembangunan Rumah sakit melalui Bantuan keuangan dan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota, serta pembangunan melalui APBD Provinsi untuk Rumah Sakit yang menjadi Rumah sakit Provinsi
		Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga	Pengembangan daya saing keolahragaan melalui dukungan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, Pengembangan dan pembangunan sarana/prasarana Olah Raga melalui kerja sama anggaran non pemerintah.

No	Prioritas	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
		<p>Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat</p>	<p>Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha dan lembaga masyarakat melalui peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan ketahanan keluarga, pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan total fertility rate. meningkatkan kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menurunkan angka total fertility rate</p>
		<p>Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan</p>	<p>Peningkatan kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai keagamaan, Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan, pesantren, dan penyelenggara keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari</p>
		<p>Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman;</p>	<p>Peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, melalui Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait; Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya. Membuat Memorandum Of Understanding (MOU) dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait. Untuk meretas persoalan kewenangan dan hierarki.</p>
		<p>Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan Peningkatan</p>	<p>Pemberdayaan Lembaga keagamaan, pesantren, penyelenggara keagamaan melalui penguatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan dengan semua stake holder pembangunan</p>
5	Pengelolaan komoditas unggulan	produktivitas melalui industrialisasi berbasis pengolahan	Hilirisasi pegelolaan komoditas berbasis sumberdaya alam merupakan penjabaran salah satu program nyata melalui penekanan

No	Prioritas	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD	Penjelasan Arah Kebijakan
	berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan	pada upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong hilirisasi komoditas Sulawesi Selatan yang didukung oleh upaya peningkatan produksi, komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga komoditas unggulan tersebut mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja. Fokus pembangunan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
		Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon	Arah kebijakan untuk prioritas I membangun lingkungan hidup melalui peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan KetahananBencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon
		Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS)	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar daerah aliran sungai (DAS) melalui peninglatan pengawasan ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang

Sumber: Perubahan RPJMD Prov Sulsel tahun 2018-2023..

Prioritas, strategi, arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2022 yang meliputi antara lain:

Tabel 4.7
Target Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,65	5.98–7.60	5.98–7.60
2	PDRB per kapita (ADHB)	59,23	62,37	62,37
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,72	6.16-6.95	6.16-6.95
	Jumlah Pengangguran	-	256.11	256.11
4	Tingkat Kemiskinan (Sept.)	91,47	8.38-9.19	8.38-9.19
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,24	72.57	72.57
6	Gini Rasio	-	0.381	0.381
7	Indeks Williamson	-	0,600	0,600
8	Tingkat Inflasi (%)	-	3,5 ± 1,0	3,5 ± 1,0

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu

Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian dengan hasil evaluasi, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan dan isu strategis pembangunan tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan disusun berdasarkan arah kebijakan serta menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas pada tahun sebelumnya dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi dan berakibat terjadinya resesi. Namun patut disyukuri, dampak yang dirasakan Kabupaten Luwu tidak berpengaruh besar terhadap mata rantai pasokan barang dan jasa, mobilitas masyarakat, dan kegiatan ekonomi secara umum meskipun sedikit menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan kebijakan nasional untuk mengembalikan kehidupan yang normal, maka menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan, sehingga pada tahun 2022 perlu

dilakukan langkah represif dengan melakukan langkah-langkah konkrit terkait penanganan pasca pandemi Covid-19 seperti Program Percepatan Pemulihan Ekonomi (PEN) yang dicanangkan oleh bapak presiden dengan tujuan memperbaiki atau menghidupkan kembali perekonomian daerah yang kita tahu sangat terpuruk dimasa pandemic Covid-19, selanjutnya percepatan vaksinasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis sebagai lini terdepan dalam penanganan Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing anggaran sesuai kebijakan dari pusat untuk Program Vaksinasi dan memberikan insentif bagi tenaga medis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu: **“Penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Perekonomian berbasis pada Sektor Unggulan Daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; dan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana.

Untuk melihat sinkronisasi permasalahan dan isu strategis terhadap prioritas pembangunan tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022

RKPD POKOK TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)		Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)

RKPD POKOK TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU		
PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
	Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju		Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan akseibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan akseibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

4.2.3.1 Target Indikator Makro Pembangunan

Perekonomian suatu daerah tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi yang dampaknya mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Ekonomi makro memberikan penjelasan tentang perubahan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada masyarakatnya. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini melalui serangkaian kebijakan. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian, dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan kebijakan maupun mengukur keberhasilan, untuk masing-masing aspek ditetapkan suatu target.

Dalam pencapaian target indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi daerah dan pencapaian target Nasional, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat tajam, persentase penduduk miskin yang menurun, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah, tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya. Perubahan Indikator makro Tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Luwu 2022

Indikator Makro Pembangunan	Realisasi Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,03	5,84	6,91
2. Laju Inflasi		3,10	1,10
3. PDRB per kapita (ADHB)	48,55	45,30	53,63
4. Tingkat Kemiskinan (%)	11,09	12,10	11,69
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,79	72,01	71,04
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,80	4,24	4,1

7. Rasio Gini (indeks)	0,345	0,347	0,361
------------------------	-------	-------	-------

Sumber: Bappelitbangda Tahun 2022

4.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan yang termasuk dalam program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD harus dipetakan sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan. Oleh karena itu, judul program prioritas pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD ini telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.

Adapun Perubahan Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2022

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	71,11	71,11	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah
						Persentase tindak lanjut temuan BPK	
						Persentase tindak lanjut temuan BPKP	
						Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	
					Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Rasio Pegawai Fungsional	
						Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
						Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah			
				Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan			
				Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB			
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	65,44	65,44	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APM)	
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APM)	
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	78,30	78,30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan	Dinas Kesehatan
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.						RSUD Batara Guru	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk		
					Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	Dinas Kesehatan	
	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Alat Kesehatan						
	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Pangan Industri Rumah Tangga						
Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	2,43	2,43	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Sekretraiat Daerah
						Tingkat capaian target penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	
						Tingkat capaian target penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan rakyat	
						Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	
					Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
					Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
					Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pembinaan Dan Pengembangan	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	0,8654	0,8654	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan V/C Ratio di Jalan kabupaten	Dinas Perhubungan
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,98	0,98	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Persentase perumahan yang sudah	Dinas Perumahan dan Permukiman

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					dan Utilitas Umum (PSU)	dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	
Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)	45,30	53,63	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
						Tingkat produktivitas tenaga kerja	
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Total produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat capaian target pelaksanaan kebijakan perekonomian	Sekretariat Daerah
						Tingkat capaian target pelaksanaan administrasi pembangunan	
						Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan						
	Tingkat capaian target pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	11,51	11,51	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Luwu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan penyelenggaraan promosi penanaman modal	
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan penanaman modal	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan				
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,41	5,41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
			1,45	1,45	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Pertanian
						Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	
						Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	
						Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	
						Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Komsumsi Protein	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Dinas Pertanian
						Persentase peningkatan produksi bibit ternak	
					Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju	1,45
Persentase peningkatan status desa maju							

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan / Kelurahan
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	30,00	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase irigasi dalam kondisi baik	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran					
			Waktu tanggap (response time) penanganan ke bakaran				

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja sasaran	Target		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022			
					Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

4.2.4 Dukungan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Terhadap Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan dapat dipetakan bentuk dukungannya terhadap perencanaan pembangunan lainnya.

4.2.4.1 Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2022

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada Prioritas Nasional adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; Reformasi struktural merupakan pendukung untuk terciptanya pemulihan ekonomi. Reformasi struktural meliputi: reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dukungan rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2022 terhadap sasaran pembangunan nasional, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.11
Dukungan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Terhadap Sasaran RKP Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN
Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7)	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI			Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN 3)	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Rata-Rata lama sekolah
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			Harapan lama sekolah
					Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN
	Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4)	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi (nilai)
Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB Pertanian (%)
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Pertumbuhan PDB industri pengolahan
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)			
	Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju			
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR SASARAN
					Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5)	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)
			Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi	Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Persentase penurunan emisi GRK (%)

4.3 DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan provinsi. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan harus terstruktur dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu. Dukungan prioritas tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Dukungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022
Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN
Pemantapan reformasi birokrasi	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik	Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Provinsi		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Indeks Pendidikan		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Menurunkan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk
	Meningkatnya aktualisas nilai- nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas			
Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman	Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	Tingkat Mobilitas
				Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TAHUN 2022	INDIKATOR SASARAN
					Aman yang didukung dengan PSU
Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita AHB (Juta Rp.)
	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini			
	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)
				Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
			Meningkatkan Perekonomian Desa	Persentase BUMDes yang memperoleh predikat Maju	
Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana	Mengurangi risiko akibat kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			

4.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan uraian penjelasan tentang upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah. Adapun rumusan strategi pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Perbaiki kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan.	menata, memperbaiki dan mengembangkan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi berarti pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar berkinerja lebih optimal. Reformasi birokrasi dilakukan pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan asli daerah dan efektivitas belanja daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, dilakukan melalui pemutakhiran regulasi, pendataan wajib pajak, menghapus sumber-sumber kebocoran pendapatan dan pemanfaatan asset daerah.

Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas dan akses pendidikan	Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah maupun nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga harus dengan mutu yang sama bagi setiap anak bangsa, agar setiap anak memperoleh pendidikan dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pencegahan, penanganan dan vaksinasi pada kasus pandemi Covid-19 menjadi fokus utama sesuai arahan pemerintah pusat.
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrastruktur yang terjadi tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, dengan infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan jalan misalnya, yang merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa, mempunyai peranan untuk sarana pendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, perlu diikuti dengan pengembangan akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat

Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Pengembangan infrastruktur perkotaan dan lingkungan permukiman	Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan perekonomian daerah	Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah pendapatan riil per kapita. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi, yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang konsumtif dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan. Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita berarti mencerminkan rendahnya pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Fasilitasi di bidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kerjasama perangkat daerah perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui strategi ini
Menurunkan angka kriminalitas	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Budaya daerah diharapkan menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa karena jati diri merupakan karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya daerah masing-masing. Maka dengan sendirinya akan memberi jati diri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia di Kabupaten Luwu. Dengan masyarakat yang berbudaya, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat

Sasaran	Strategi	Penjelasan Strategi
Meningkatkan perekonomian Desa	Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat agar makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Peningkatan iklim investasi	Iklim investasi di Kabupaten Luwu masih belum kondusif mengingat infrastruktur perhubungan belum optimal dalam pengembangannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini menjadi ganjalan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu. Masih rendahnya kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu parameter minimnya investasi yang digelontorkan investor
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Peningkatan kinerja perangkat daerah	Pengaturan, pemberdayaan, pembinaan dan pembangunan merupakan langkah-langkah strategik dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus menerapkan langkah-langkah tersebut guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien akan menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan daerah.
Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana. Langkah pertama adalah membuat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana

4.4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari perencanaan pembangunan agar lebih optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Sedangkan arah kebijakan menjadi pedoman untuk mengoperasionalkan strategi yang dipilih agar lebih fokus terhadap capaian yang diinginkan. Disamping itu arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program/kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun arah kebijakan pada setiap sasaran pembangunan Kabupaten Luwu untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 4.14
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi	Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD.
		Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan DPRD.
		Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.
		Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat.
	Pemantapan keterbukaan informasi publik	Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD, dengan memanfaatkan teknologi searah dengan transformasi digita
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah	Pengembangan inovasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
		Penetapan target untuk masing-masing objek PAD.
		Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
		Optimalisasi pemanfaatan asset daerah

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana serta mempermudah akses terhadap pendidikan	Pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, bantuan pendidikan, pengembangan kurikulum bermuatan lokal, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah.
	Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal	Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal
		Pengelolaan data dan informasi pembangunan pendidikan.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan sarana, prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan	Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, serta mengurangi dampak bencana non alam.
		Pencegahan, Penanganan dan Vaksinasi Covid-19 Pada seluruh masyarakat kabupaten Luwu, serta Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis
	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Pencapaian SPM untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Bidang Kesehatan
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir)	Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan.
	Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana jalan	
	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut	Pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan darat ke wilayah kecamatan.
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya air	Pengembangan irigasi pertanian dan perikanan serta pengembangan infrastruktur air minum.
	Penataan permukiman, penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan	Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan.
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Peningkatan daya saing UMKM	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM.
		Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan.

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
	Peningkatan pelayanan dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga.
	Pengembangan kepariwisataan daerah	Penetapan RIPPARDA, penysunan RIPOW, pengembangan destinasi wisata, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan daerah	Pemberian bantuan kepada kelompok tani dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, dan pengembangan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani.
	Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian	Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.
		Pengembangan kapasitas petani dan mekanisasi pertanian.
Menurunkan angka kriminalitas	Koordinasi, pembinaan, pemberian insentif dan pengembangan sarana prasarana keagamaan	Aktualisasi kehidupan beragama, koordinasi, pembinaan, pengembangan sarana prasarana keagamaan, pemberian insentif bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya lokal.
		Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan budaya lokal	Pelestarian budaya lokal.
Meningkatkan perekonomian Desa	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa.
	Meningkatkan perkembangan BUMDes	Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Memberikan kemudahan perizinan dan pengembangan kebijakan investasi daerah,	Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan promosi potensi investasi daerah, memberikan kemudahan perizinan.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penerapan anggaran berbasis kinerja	Anggaran berbasis kinerja, penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome, pemerintahan yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu.
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengoperasian Mall Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu bagi masyarakat
	Menyusun regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik.	Menyusun regulasi yang menjamin SPM pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
	Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat	Memberikan layanan bantuan hukum dan sosialisasi tentang hak-hak hukum masyarakat.
Mengurangi risiko akibat kejadian bencana alam	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA	Revisi Perda RTRW.
		Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA
	Penanggulangan bencana alam dan non alam.. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana.
		Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022

Sebagaimana tertuang pada Bab III, Perubahan pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sejumlah **Rp. 1.454.395.824.300** yang bersumber dari PAD sebesar **Rp. 120.859.615.879**, pendapatan Transfer sejumlah **Rp. 1.260.036.208.421**, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah **Rp. 73.500.000.000**. Pendapatan Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2021, dengan jumlah proyeksi Perubahan belanja sebesar **Rp. 1.475.950.546.489** dan pendanaan untuk kebijakan pembiayaan daerah sejumlah **Rp. 3.000.000.000**.

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2022 antara lain diarahkan untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2022.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2022

Uraian	RKPD Pokok 2022	Target Perubahan RKPD 2022	Bertambah/Berkurang
1	2	3	4 = 3-2
BELANJA	1.518.261.846.508	1.475.950.546.489	(42.311.300.019)
BELANJA OPERASI	990.336.550.072	937.569.180.719	(52.767.369.353)
Belanja Pegawai	600.354.446.712	575.763.853.566	(24.590.593.146)
Belanja Barang dan Jasa	293.949.522.888	344.599.045.380	50.649.522.492
Belanja Hibah	94.661.080.472	16.811.781.773	(77.849.298.699)
Belanja Bantuan Sosial	1.371.500.000	394.500.000	(977.000.000)
BELANJA MODAL	259.976.792.436	291.505.875.951	31.529.083.515
BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000
Belanja Transfer	264.948.504.000	241.875.489.819	(23.073.014.181)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.443.054.000	4.147.574.822	704.520.822
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	261.505.450.000	237.727.914.997	(23.777.535.003)

5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian,

Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan dengan 13 (tiga belas) sasaran, dan 47 (empat puluh tujuh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel 5.2 . berikut.

Tabel 5.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD 2022		Perubahan RKPD 2022		Perangkat Daerah	
				Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
Pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian	100%	3,549,787,100	100%	2,988,335,550	Inspektorat Daerah	
			Intern Pemerintah (SPIP)						
			Persentase tindak lanjut temuan BPK	100%		100%			
			Persentase tindak lanjut temuan BPKP	100%		100%			
		Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100%	100%					
		Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar	%	3.080.806.110	%	2.893.662.310		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Rasio Pegawai Fungsional	%		%			
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat	%		%			
			kompetensi						
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	1.592.778.450	100%	1.472.170.880		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100%	100%					
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan dan kebutuhan	100%	270.664.834.550	100%	249.822.186.369	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD 2022		Perubahan RKPD 2022		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	95%		95%		
			Perentase SKPD yang menyampaikan	98'00 %		98'00 %		
			Laporan Keuangan tepat waktu					
			Tingkat capaian target penyaluran bantuan keuangan	100%		100%		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	86,98%	2.936.179.884	86,98%	3.316.201.079	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	98,99%		98,99%		
			Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan	90%		90%		
			Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	80%		80%		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP Elektronik	94,45%	1.066.812.550	94,45%	758.380.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Prscentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%		%		
			Persentase kepemilikan akta kelahiran	91%		91%		
		Program Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakte nikah	0,28%	203.193.150	0,28%	132.604.500	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase anak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan	100%	693.656.200	100%	536.973.340	Dinas Sosial	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	RKPD 2022		Perubahan RKPD 2022		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sosial					
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian target perencanaan,	100%	625.640.260	100%	770.990.980	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
			pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah					

5.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Rumusan Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis, disusun berdasarkan usulan yang bersumber dari tahapan-tahapan perencanaan kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) bidang urusan meliputi Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pilihan sejumlah 6 (enam) bidang meliputi Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 (dua) bidang urusan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 5 (lima) bidang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya Unsur Pengawasan meliputi Inspektorat Daerah serta Unsur Kewilyahan meliputi 22 (dua puluh dua) Kecamatan, dan Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Poltik. Rincian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3. di bawah ini.

**INDIKASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RKPD PERUBAHAN
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	419.625.991.591	385.594.758.057					
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 dokumen 8 dokumen	2 dokumen 8 dokumen	102.210.460	28.057.599				
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	23.272.300	7.021.400		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 laporan	3 laporan	10.375.800	6.565.600	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	41.251.000	14.470.599	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen	4 dokumen	290.437.074.496	288.036.416.121				
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 orang	2683 orang	290.167.464.196	287.826.171.121	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan yang diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen	249.720.000	204.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	5.765.000	5.765.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 dokumen	7 dokumen	400.767.300	139.875.300				
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai perangkat daerah yang dilakukan pendataan dan pengolahan administrasi	100 orang	100 orang	107.920.500	40.000.700	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	379 orang	379 orang	246.482.900	99.874.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	1.078.059.445	418.963.380				
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	21.550.400	9.835.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	14 unit	14 unit	301.446.545	20.185.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	22 jenis	22 jenis	17.935.250	4.219.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	5.927.400	5.927.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	13.896.000	4.964.430	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	20 jenis	36.000.000	36.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	122.364.850	46.220.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	92.640.000	41.415.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	216 OK	216 OK	466.299.000	250.196.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.179.399.998	694.600.000				
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	518.199.998	103.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum kantor	12 OB	12 OB	661.200.000	591.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	41 Unit	41 Unit	799.319.798	214.669.000				
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	139.278.300	30.073.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	25 Unit	25 Unit	42.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1800 m2	1800 m2	117.000.000	180.596.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A	100 Persen	100 Persen	124.726.619.745	95.923.249.998				
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik	21 Persen	21 Persen	75.314.581.472	56.265.601.456				
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	33 Ruang	33 Ruang	2.948.946.000	416.866.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	25 Ruang	25 Ruang	864.673.095	1.748.101.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	1	2.2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah SD yang dibangun	20 Unit	20 Unit	1.500.802.875	1.411.570.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	41 sekolah	41 sekolah	6.244.654.109	2.072.772.874	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	66 ruang	66 ruang	5.777.827.770	2.945.506.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya ruang guru/kepala sekolah yang representatif	90 Persen	90 Persen	349.660.740	323.804.099			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan yang berkualitas dan nyaman	90 Persen	90 Persen	262.245.555	243.422.900		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet (Jamban) sekolah yang dilakukan rehabilitasi	100 Persen	100 Persen	2.670.902.142	169.962.669	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima bantuan pengadaan mebel sekolah	100 Persen	100 Persen	12.872.862.000	1.195.090.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Meringankan beban orang tua siswa sekolah dasar	95 Persen	95 Persen	762.000.000	909.300.000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar	100 Persen	100 Persen	37.081.440.000	36.357.750.000		DAK Non Fisk - BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah peralatan komputer yang disediakan	0 Unit	36 Unit	-	4.632.440.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Meningkatnya kualitas pendidikan siswa siswi sekolah dasar	97 Persen	97 Persen	99.019.600	20.063.400			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Tersedianya laporan evaluasi tindak lanjut satuan pendidikan	1 Laporan	1 Laporan	67.273.683	20.091.040			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Adanya siswa berprestasi yang dapat mewakili ke tingkat Nasional	90 Persen	90 Persen	427.444.900	28.071.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing	90 Persen	90 Persen	393.433.800	57.128.200			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar	95 Persen	95 Persen	255.230.680	20.042.500			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah dokumen laporan yang dikelola dan disusun	3 dokumen	3 dokumen	88.817.340	14.037.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium sekolah dasar yang dibangun	0 Sekolah	17 Sekolah	-	3.679.580.824		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	37 Persen	37 Persen	39.700.464.996	30.801.815.077			
1	1	2.2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun		25 unit	-	257.258.534	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang dibangun	4 unit	4 unit	1.579.791.885	1.548.628.643	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun sarana prasarana utilitasnya	12 sekolah	12 sekolah	2.491.242.460	656.144.731	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	1	2.2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi	23 ruang	23 ruang	3.212.911.595	3.257.369.055	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi	0 unit	5 unit	-	41.623.883	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhabilitasi	2 sekolah	2 sekolah	98.036.450	524.297.175	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	1	2.2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi	25 unit	25 unit	138.844.500	782.732.775	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	jumlah sekolah yang menerima mebel	45 sekolah	45 sekolah	2.317.500.000	614.250.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa	5641 orang	5641 orang	836.100.000	927.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Disediakan Biaya Personil	19012 orang	19012 orang	23.389.470.000	20.463.480.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisk - BOS Reguler	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		15 paket	-	1.304.879.980	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2.2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6207 orang	6207 orang	92.182.060	25.113.860	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Terlibat dalam Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 Orang	100 Orang	156.624.800	22.082.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang difasilitasi Dalam Pengembangan Karir	1050 Orang	1050 Orang	547.714.200	55.510.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Menerapkan Kelembagaan dan Manajemen yang baik	44 sekolah	44 sekolah	610.695.100	20.746.580	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan BOS yang dikelola	3 laporan	3 laporan	73.090.250	14.813.890	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang tatausaha sekolah yang direhab.	0 unit	3 unit	-	285.383.271	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Anak Usia Dini Yang Mengikuti PAUD	62 Persen	62 Persen	5.963.042.177	6.763.328.565			
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah RKB yang dibangun	3 unit	3 unit	100.000.000	326.491.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang dibangun sarana prasarana utilitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	245.453.188	1.073.366.495	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil	7533 Orang	7533 Orang	4.710.600.000	4.956.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang menerima alat praktik praga siswa	1 Lembaga	1 Lembaga	200.000.000	344.385.670	Kab. Luwu, Lamasi, Salujambu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud yang disediakan	16 orang	16 orang	456.395.000	50.005.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah paud yang dibina	224 lembaga	224 lembaga	45.000.000	13.080.400	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	85 Persen	85 Persen	3.748.531.100	2.092.504.900			
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	3 lembaga	3 lembaga	35.700.000	432.257.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang menerima pengadaan meubeleir	8 lembaga	8 lembaga	160.000.000	33.121.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga (PKB, PKBM) yang disediakan biaya personil peserta didik	8 lembaga	8 lembaga	3.461.500.000	1.472.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang disediakan		2 Paket	-	120.175.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah buta aksara yang mengikut proses belajar non formal	8 lembaga	8 lembaga	26.348.300	20.295.600	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah peserta lomba tutor kf dan warga belajar	50 orang	50 orang	64.982.800	14.055.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diterapkan	2 Kurikulum	2 Kurikulum	74.357.430	74.357.430			
1	1	3	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar Yang Telah ditetapkan	2 Kurikulum	2 Kurikulum	74.357.430	74.357.430			
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah peserta pelatihan	100 orang	100 orang	74.357.430	74.357.430	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV	90 Persen	90 Persen	89.634.919	64.569.229			
1	1	4	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar	90 Persen	90 Persen	89.634.919	64.569.229			
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	1 dokumen	1 dokumen	62.530.340	37.464.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan kerja Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 dokumen	4 dokumen	27.104.579	27.104.579	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					422.951.684	297.499.600			
2	22	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase tingkat pengembangan Kebudayaan di daerah	95 Persen	95 Persen	200.720.100	77.640.600				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan					
2	22	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang dikelola masyarakat dalam daerah Kab/Kota	3 Budaya	3 Budaya	170.449.200	57.105.800			
2	22	2.01	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 objek	2 objek	52.167.200	30.250.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2.01	2 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	25 orang	25 orang	118.282.000	26.855.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten	95 Persen	95 Persen	30.270.900	20.534.800			
2	22	2.02	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2 objek	2 objek	30.270.900	20.534.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang telah dikembangkan	85 Persen	85 Persen	146.296.684	49.471.200			
2	22	3.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dikelola oleh masyarakat dalam daerah Kab/Kota	3 Jenis	3 Jenis	146.296.684	49.471.200			
				Jumlah Kesenian Tradisional yang dikelola oleh masyarakat dalam daerah Kab/Kota	3 Kesenian	3 Kesenian					
2	22	3.01	3 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	146.296.684	49.471.200	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan	1 lembaga	1 lembaga	44.252.900	20.387.800			
				Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan	1 sejarah	1 sejarah					
2	22	4.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya wadah pembinaan sejarah	1 lembaga	1 lembaga	44.252.900	20.387.800			
2	22	4.01	1 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten yang ditingkatkan keberdayaannya	1 lembaga	1 lembaga	44.252.900	20.387.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase cagar budaya yang telah dilestarikan dan dikelola	85 %	85 %	31.682.000	150.000.000			
2	22	5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten	3 Cagar Budaya	3 Cagar Budaya	31.682.000	150.000.000			
2	22	5.2.02	3 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang telah didayagunakan	3 cagar budaya	3 cagar budaya	31.682.000	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	0 Persen	100 Persen	-	20.829.245.299			
1	2	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	0 OB	320 OB	-	20.829.245.299			
1	2	1.2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	0 jenis	13 jenis	-	20.829.245.299	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RSUD BATARA GURU
1	2	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1.381.199.310	1.299.673.332			
1	2	1.2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	1.381.199.310	1.299.673.332	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat	100 Persen	100 Persen	78.918.009.503	50.275.134.421			
1	2	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	25.792.810.063	149.999.981			
1	2	2.01	8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah unit rumah sakit yang direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	1 unit	1.995.950.000	149.999.981	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	53.125.199.440	50.125.134.440			
1	2	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah bulan operasional pelayanan kesehatan RS	12 bulan	12 bulan	53.000.000.000	50.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Lebani	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan akreditasi	9 Faskes	9 Faskes	125.199.440	125.134.440	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	68.565.816.571	59.813.991.259			
1	2	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	329.374.780	241.136.065			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja Yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	110.965.600	89.830.085		Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.887.480	13.887.480	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.727.700	6.727.700	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.461.600	10.709.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.215.100	6.665.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (LAKIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	177.117.300	113.316.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	66.427.344.904	58.182.140.129			
1	2	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	830 orang	830 orang	65.942.017.904	57.736.173.929	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	464.080.000	399.720.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	5.846.600	5.846.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggap pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	2.499.600	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	12.900.800	38.399.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi milik daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	19.200.000	19.200.000			
1	2	1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	36 OB	36 OB	19.200.000	19.200.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe		DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas & Fungsi	100 Pesen	100 Pesen	171.493.400	28.489.900			
1	2	1.2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	10 Orang	171.493.400	28.489.900	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	90 Persen	414.534.437	410.774.550			
1	2	1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	17 unit	17 unit	1.171.800	1.918.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 unit	8 unit	54.661.450	77.818.300	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis cetakan/penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2.400.000	1.200.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	30.000.000	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	26.010.887	17.772.250	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	15.000.000	7.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	120 OK	120 OK	281.789.000	284.566.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatus dalam kondisi baik	20 Persen	20 Persen	51.566.000	12.000.000			
1	2	1.2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	31.330.000	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	621.600.000	585.000.615			
1	2	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa sutar menyurat yang disediakan	400 Surat	400 Surat	16.800.000	16.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	159.600.000	124.200.615	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1646 OB	1646 OB	445.200.000	444.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	530.703.050	335.250.000			
1	2	1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin / berkala	13 unit	13 unit	304.153.050	207.150.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan	458 m2	458 m2	226.550.000	128.100.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Insentif Daerah	DINAS KESEHATAN
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	63.204.309.214	53.118.352.149			
1	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	22 Puskesmas	22 Puskesmas	28.112.499.096	17.489.514.232			
1	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	1 Puskesmas	4 Puskesmas	2.980.091.673	814.330.212	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah unit fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	3 unit	1 unit	454.421.868	231.549.566	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang direhab	9 unit	9 unit	2.210.200.000	834.795.032		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
											Pajak Rokok	
											DBH CHT	
											Dana Insentif Daerah	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	4 unit	4 unit	2.773.051.443	1.539.795.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket/unit alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 paket	3 paket	4.020.000.000	6.836.820.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah puskesmas yang didistribusikan obat dan perbekalan kesehatan	22 puskesmas	22 puskesmas	3.962.228.270	3.646.296.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	1 paket	1 paket	2.000.000.000	3.585.927.822	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	22 Puskesmas	22 Puskesmas	35.006.147.718	35.565.174.378			
1	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7508 orang	7508 orang	83.819.200	89.338.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7116 orang	7116 orang	2.520.400.000	416.828.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	7543 orang	7543 orang	90.325.200	72.746.900	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberi pelayanan sesuai standar	29841 orang	29841 orang	10.687.900	33.538.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19724 anak	19724 anak	95.746.550	24.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	27281 orang	27281 orang	71.537.300	35.150.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7090 orang	7090 orang	119.054.260	34.000.130	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				1.004.887.200	285.933.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Orientasi Pelaksanaan Gizi Masyarakat	22 Kelompok	22 Kelompok	497.245.597	734.757.108	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Laporan pelaksanaan kesehatan kerja dan olah raga	1 laporan	1 laporan	82.262.700	32.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan lingkungan	22 Kelompok	22 Kelompok	408.136.210	192.469.050	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	4 kelompok	4 kelompok	76.075.550	30.399.190	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah kelompok masyarakat yang diberikan surveillance kesehatan	22 Kelompok	22 Kelompok	150.588.650	49.340.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	22 Kelompok	22 Kelompok	74.896.000	50.000.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan khusus	420 orang	420 orang	70.829.350	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pelayanan kesehatan terhadap penyakit menular dan tidak menular	22 kelompok	22 kelompok	765.708.631	615.450.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah iuran jaminan kesehatan nasional bagi peserta Jaminan kesehatan Nasional	22 Puskesmas 60250 Jiwa	22 Puskesmas 60250 Jiwa	22.633.011.250	28.440.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok Dana Insentif Daerah	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah unsur kelayakan kabupaten sehat yang ditingkatkan	7 tatanan	7 tatanan	740.526.500	370.382.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
							Pajak Rokok					
							Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal					
1	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang disediakan biaya operasional puskesmas	22 puskesmas	22 puskesmas	3.500.000.000	3.315.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan akreditasi	9 faskes	9 faskes	2.010.409.670	703.140.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KESEHATAN
1	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	5 Sistem	5 Sistem	49.697.600	23.663.539			
1	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang digunakan dalam rangka informasi kesehatan	1 Sistem	1 Sistem	49.697.600	23.663.539	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang ditingkatkan mutunya	22 Puskesmas	22 Puskesmas	35.964.800	40.000.000			
1	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	35.964.800	40.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	77.27 Persen	77.27 Persen	551.409.750	108.667.720			
1	2	3.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	100 Persen	100 Persen	483.198.100	89.588.200			
1	2	3.2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.788.100	89.588.200	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	3.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang disertifikasi	360 Orang	360 Orang	68.211.650	19.079.520			
1	2	3.2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang disertifikasi	360 Orang	360 Orang	68.211.650	19.079.520	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	100 Persen	100 Persen	413.619.400	336.626.400			
1	2	4.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Industri Rumah Tangga Yang bersertifikasi	35 35	35 35	64.797.600	73.440.400			
1	2	4.2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, OMUT	65 Dokumen	65 Dokumen	64.797.600	73.440.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1	2	4.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat Produksi Pangan yang di terbitkan	50 Sertifikat	50 Sertifikat	348.821.800	263.186.000			
1	2	4.2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi	50 izin	50 izin	348.821.800	263.186.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 Persen	100 Persen	356.389.270	460.699.600			
1	2	5.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Promosi kesehatan, Advokasi Kemitraan, pemberdayaan masyarakat	22 Puskesmas	22 Puskesmas	134.703.320	324.274.800			
1	2	5.2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22 Puskesmas	22 Puskesmas	134.703.320	324.274.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Pajak Rokok	DINAS KESEHATAN
1	2	5.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan sehat dalam rangka promosi kesehatan	22 Puskesmas	22 Puskesmas	123.984.600	136.424.800			
1	2	5.2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas yang terlibat dalam upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat dan Bersih	22 Puskesmas	22 Puskesmas	123.984.600	136.424.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan					
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.961.014.978	1.646.081.851			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Yang menyediakan biaya operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.961.014.978	1.646.081.851			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.077.251.028	829.763.051	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Sampano	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	883.763.950	816.318.800		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.883.483.850	1.819.623.895			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.883.483.850	1.819.623.895			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.883.483.850	1.819.623.895			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.116.227.650	966.395.395	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	767.256.200	853.228.500	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.796.904.533	1.529.186.968			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen	1.796.904.533	1.529.186.968			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.796.904.533	1.529.186.968			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.011.100.000	695.113.188	Kab. Luwu, Suli, Suli	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	785.804.533	834.073.780	Kab. Luwu, Suli, Suli	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.963.072.744	1.926.227.830			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.963.072.744	1.926.227.830			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.963.072.744	1.926.227.830			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.174.720.094	1.116.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	788.352.650	810.227.830	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.385.099.971	1.369.771.739			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.385.099.971	1.369.771.739			
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.385.099.971	1.369.771.739			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	705.337.721	548.292.869	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	679.762.250	821.478.870	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fiskal	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.251.053.267	1.118.314.724			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian SPM dan Kinerja	100 persen	100 persen	2.251.053.267	1.118.314.724			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	80 persen	80 persen					
1	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan yang tersedia	80 persen	80 persen	2.251.053.267	1.118.314.724			
1	2	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.285.562.892	456.667.394	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	965.490.375	661.647.330	Kab. Luwu, Belopa Utara, Seppong		DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.013.361.636	1.682.443.219			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan					
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen	2.013.361.636	1.682.443.219			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen	2.013.361.636	1.682.443.219			
1	2	2.2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.037.382.686	834.932.719	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	975.978.950	847.510.500	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.806.757.323	1.731.948.730			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.806.757.323	1.731.948.730			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan pelayanan	100 Persen	100 Persen	1.806.757.323	1.731.948.730			
1	2	2.2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.048.870.773	899.507.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	757.886.550	832.441.230	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.412.747.347	1.188.043.262			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek kepuasan masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.412.747.347	1.188.043.262			
				Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen					
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	80 persen	80 persen	1.412.747.347	1.188.043.262			
1	2	2.2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	614.145.997	415.569.162	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	798.601.350	772.474.100	Kab. Luwu, Kamanre, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.953.375.725	1.884.176.863			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.953.375.725	1.884.176.863			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.953.375.725	1.884.176.863			
1	2	2.2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	820.661.800	632.011.434	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.132.713.925	1.252.165.429	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.989.940.497	1.897.488.591			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	1.989.940.497	1.897.488.591			
				Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen					
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.989.940.497	1.897.488.591			
				Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan yang tersedia	80 persen	80 persen					
1	2	2.2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.223.715.600	1.054.235.591	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Bakti	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	766.224.897	843.253.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Bakti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.642.696.250	2.179.688.466			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		0	0	2.642.696.250	2.179.688.466			
					0	100 Persen			100 Persen		
				Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen					
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan kesehatan untuk UKM DAN UKP	80 persen	80 persen	2.642.696.250	2.179.688.466			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.584.649.500	1.359.099.466	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.058.046.750	820.589.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	2.579.229.700	2.368.632.761				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH PUSKESMAS YANG MENYEDIAKAN BIAYA OPERASIONAL	1 PUSKESMAS	1 PUSKESMAS	2.579.229.700	2.368.632.761				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 puskesmas	1 puskesmas	1.742.511.400	1.508.612.506	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	836.718.300	860.020.255	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	2.762.711.320	2.468.237.739				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.762.711.320	2.468.237.739				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.964.418.260	1.555.849.416	Kab. Luwu, Bua, Sakti	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	798.293.060	912.388.323	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	2.085.877.500	1.880.321.680				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.085.877.500	1.880.321.680				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	984.082.500	779.192.180	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.101.795.000	1.101.129.500	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	2.402.029.730	2.035.457.183				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.402.029.730	2.035.457.183				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 puskesmas	1 puskesmas	1.346.889.730	938.636.717	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah dan jenis operasional pelayanan puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.055.140.000	1.096.820.466	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.632.172.600	1.538.759.976				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	1 puskesmas	1 puskesmas	1.632.172.600	1.538.759.976				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	839.667.600	726.958.000	Kab. Luwu, Walenrang, Walenrang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	792.505.000	811.801.976	Kab. Luwu, Walenrang, Walenrang	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.799.853.779	1.788.093.835				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 puskesmas	1 puskesmas	1.799.853.779	1.788.093.835				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	2	2.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.023.974.679	999.003.835	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Rantai Damai	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	775.879.100	789.090.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Rantai Damai	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.850.262.242	1.525.379.263			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 PUSKESMASK ESMAS	1 PUSKESMASK ESMAS	1.850.262.242	1.525.379.263			
1	2	2.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.022.398.742	680.355.288	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Salutubu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	827.863.500	845.023.975	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Salutubu	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	2.265.800.650	2.054.258.450			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.265.800.650	2.054.258.450			
1	2	2.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.176.000.000	1.018.144.448	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.089.800.650	1.036.114.002	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.907.229.414	1.605.083.759			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah puskesmas yang disediakan biaya operasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.907.229.414	1.605.083.759			
1	2	2.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 puskesmas	1 puskesmas	1.171.178.414	789.581.409	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	736.051.000	815.502.350	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase indikator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	100 Persen	100 Persen	1.198.105.200	1.259.133.190			
1	2	2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas Yang Menyediakan Biaya Oprasional	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.198.105.200	1.259.133.190			
1	2	2.2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	699.691.700	479.765.290	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	DINAS KESEHATAN
1	2	2.2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dan jenis pelayanan operasional puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	498.413.500	779.367.900	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	13.175.968.871	11.498.090.795			
1	3	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	62.986.570	50.179.730			
1	3	1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	38.822.470	39.425.130	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1.2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LKjIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.207.700	10.754.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Jenis	5 Jenis	10.107.377.262	8.744.158.316			
1	3	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	125 Orang	125 Orang	9.759.566.342	8.404.966.916	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Retribusi Jasa Usaha Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	3	1	2.02	3	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	180 Orang/Bulan	180 Orang/Bulan	329.520.000	329.520.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	9.671.400	9.671.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	9.857.070	9.881.380			
1	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD)	2 Laporan	2 Laporan	9.857.070	9.881.380	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Jenis	3 Jenis	254.511.000	175.311.000			
1	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	3 Orang	74.511.000	74.511.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	14 ORANG	14 ORANG	100.800.000	100.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 Jenis	9 Jenis	1.002.468.010	833.791.410			
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	10.306.000	10.306.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Unit	8 Unit	119.005.350	75.846.450	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	34.868.600	31.130.700	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	21.581.800	21.515.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	123.350.000	82.750.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	52.311.660	52.304.860	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 BULAN	12 BULAN	37.333.500	37.333.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum Yang disediakan Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	3 Jenis 92 Orang/Kali 105 Orang/Kali	3 Jenis 92 Orang/Kali 105 Orang/Kali	592.986.100 522.604.100	522.604.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.072.200.000	1.044.600.000			
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	42.000.000	42.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	151.800.000	151.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1200 Orang/Bulan	1200 Orang/Bulan	878.400.000	850.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	87 Unit/Set	87 Unit/Set	666.568.959	640.168.959			
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	47 Unit	47 Unit	229.312.580	202.912.580	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	24 Unit	24 Unit	414.113.500	414.113.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	20 UNIT/SET	20 UNIT/SET	10.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	4500 m2	4500 m2	13.142.879	13.142.879	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik Persentase irigasi dalam kondisi baik	38,17 Persen 40,11 Persen	38,17 Persen 40,11 Persen	21.070.446.482	11.498.292.333			
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Sungai yang dilakukan Pengelolaan SDA	5 Titik/Lokasi	5 Titik/Lokasi	3.576.813.060	2.245.974.334			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	3	2	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Lokasi yang dilakukan pengelolaan Sumber Daya Air	4 TITIK/LOKASI	4 TITIK/LOKASI	2.859.963.144	1.125.973.199	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi/ Restorasi/Pemeliharaan Sungai yang dilaksanakan	4206.24 METER	4206.24 METER	299.999.958	1.120.001.135	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terlayani sistem irigasi primer dan sekunder yang terlayani dengan baik	69 D.I	69 D.I	17.493.633.422	9.252.317.999			
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	80.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	26.94 METER	26.94 METER	1.045.601.317	99.989.805	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	1669.92 M2	1669.92 M2	9.449.517.222	6.717.830.537	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	5354.57 METER	5354.57 METER	1.964.509.912	1.349.979.607	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	69 DAERAH IRIGASI (D.I)	69 DAERAH IRIGASI (D.I)	868.992.200	917.668.050	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	1 BUAH	1 BUAH	50.001.239	86.850.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	72.00 Persen	72.00 Persen	14.127.000.000	10.162.630.000			
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang berakses air minum berkelanjutan	72.45 Persen	72.45 Persen	14.127.000.000	10.162.630.000			
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan pipa yang dibangun	240 SR	240 SR	7.060.000.000	3.511.530.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	1270 SR	1270 SR	3.800.000.000	5.334.731.875	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah yang sudah terpasang meteran air	134 SR	134 SR	3.067.000.000	1.316.368.125	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	3	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0 Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	73,00 Persen	73,00 Persen	2.300.000.000	648.000.000			
1	3	4	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dikelola melalui sistem pengelolaan persampahan	2 Unit	2 Unit	2.300.000.000	648.000.000			
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 KECAMATAAN	1 KECAMATAAN	1.800.000.000	648.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,20 persen	0,20 persen	3.199.981.213	4.647.115.052			
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan utama yang telah memiliki sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai	10 Persen	10 Persen	3.199.981.213	4.647.115.052			
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran drainase yang Dibangun	5896.3 M2	5896.3 M2	3.049.981.213	4.647.115.052	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	25,8 Angka	25,8 Angka	8.479.987.970	11.381.645.625			
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Cakupan penyelenggaraan penataan bangunan gedung	20 Angka	20 Angka	8.479.987.970	11.381.645.625			
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dilakukan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	3 Unit	2.099.987.970	3.099.648.686	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang direhabilitasi, renovasi dan Ubahsui	4 Unit	4 Unit	6.380.000.000	8.281.996.939	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	0,10 Persen	0,10 Persen	3.600.000.000	200.000.000			
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0,1 Persen	0,1 Persen	3.600.000.000	200.000.000			
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Volume penataan bangunan yang dilaksanakan	1 Unit	1 Unit	3.500.000.000	200.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	34,16 PERSEN	34,16 PERSEN	94.481.234.979	186.943.507.745			
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	34,04 PERSEN	34,04 PERSEN	94.481.234.979	186.943.507.745			
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen yang disusun		1 Dokumen	-	750.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Tanaman yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan		4,2 Ha	-	1.075.000.000		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Hasil pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	1.513.000.000	1.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	18567,37 METER	18567,37 METE R	3.299.993.251	44.203.204.007	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditingkatkan dari kerikil ke aspal atau beton	5322,8 METER	5322,8 METER	8.549.921.715	44.462.653.088	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	12436,69 METER	12436,69 METE R	48.724.894.269	50.647.964.127	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	197,06 METER	197,06 METER	5.991.055.522	722.099.062	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	6327,43 METER	6327,43 METER	15.359.947.039	23.122.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Titik Jalan Yang di Pelihara (ASPAL) Jumlah Titik Jalan Yang di Pelihara (KERIKIL)	6 TITIK 16 TITIK	6 TITIK 17 TITIK	819.969.443	4.078.496.097	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	19 UNIT	19 UNIT	10.222.453.740	16.882.091.364	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 Persen	10 Persen	200.000.000	100.000.000			
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah dilatih	58 Orang	58 Orang	200.000.000	100.000.000			
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	25 ORANG	25 ORANG	100.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	23,21 Persen	23,21 Persen	748.741.600	629.545.800			
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan RTRW dan RRTR Kabupaten	11,61 Persen	11,61 Persen	599.250.000	599.250.000			
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW Kabupaten yang telah diberikan/dilakukan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	599.250.000	599.250.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
1 3 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	1 Laporan	1 Laporan	59.891.600	30.295.800				
1 3 12 2.02	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten	2 LAPORAN	2 LAPORAN	30.295.800	30.295.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			16.199.870	16.199.870				
1 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	1 UPTD	1 UPTD	16.199.870	16.199.870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			16.199.870	16.199.870				
1 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				16.199.870	16.199.870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			16.199.870	16.199.870				
1 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				16.199.870	16.199.870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			16.199.870	16.199.870				
1 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.199.870	16.199.870				
1 3 2 2.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang disediakan biaya operasional dan pemeliharaan	69 DAERAH IRIGASI (D.I)	69 DAERAH IRIGASI (D.I)	16.199.870	16.199.870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			24.392.965.668	24.254.173.873				
1 4 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.185.826.110	4.029.703.290				
1 4 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	10 dokumen	10 dokumen	65.980.350	30.000.000			
1 4 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	34.912.850	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.911.300	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 dokumen	1 dokumen	4.673.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	2.903.371.985	2.872.555.469			
1 4 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	448 OB	448 OB	2.654.418.375	2.627.075.409	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	234.480.000	234.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	5.010.910	4.999.990	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	3.206.600	2.999.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 laporan	2 laporan	6.256.100	3.000.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	24.000.000	24.137.800			
1 4 1 2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	24.000.000	24.137.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 4 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan administrasi kepegawaian daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	221.137.060	49.000.220			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	70 orang	70 orang	23.592.060	24.000.220	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang	5 orang	100.000.000	25.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 kegiatan	9 kegiatan	802.415.412	468.447.801			
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	10.028.400	5.002.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	1 unit	146.960.000	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	38.714.150	20.000.120	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	26.737.300	19.999.620	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	34.800.000	19.980.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Bangunan yang di Sediakan Jumlah jenis ATK yang di Sediakan	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	54.995.712	22.599.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	12 bulan	12 bulan	35.750.000	9.990.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	355 kali	355 kali	425.003.850	328.613.511	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 aplikasi	1 aplikasi	12.000.000	12.262.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	584.976.753	455.540.000			
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	142.176.753	101.540.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	442.800.000	354.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	47 unit	47 unit	583.944.550	130.022.000			
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 bulan	12 bulan	156.377.550	115.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	21.567.000	15.022.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni	100 %	100 %	770.046.380	4.450.903.086			
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	1 laporan	1 laporan	61.131.790	53.000.000			
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	1 laporan	1 laporan	22.345.800	20.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Laporan hasil Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 laporan	1 laporan	10.284.200	9.100.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang didata dan diverifikasi	6 desa	6 desa	22.469.380	18.700.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Laporan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 laporan	1 laporan	6.032.410	5.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	10 unit	10 unit	610.000.000	4.397.903.086			
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi	10 kegiatan	10 kegiatan	200.000.000	163.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun		15 Unit	-	4.234.703.086	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah layak huni	20.84 %	20.84 %	3.159.493.050	4.200.701.000			
1	4	3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase permohonan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang difasilitasi	100 %	100 %	461.744.690	50.000.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	4	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 laporan	2 laporan	96.744.690	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan Penataan dan peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh)ha	7 Kegiatan	7 Kegiatan	118.699.150	23.500.000			
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Laporan hasil Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	1 laporan	1 laporan	14.415.000	12.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	2 laporan	2 laporan	19.590.470	11.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	2.03	5	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	"Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh"	10 laporan	10 laporan	2.579.049.210	4.127.201.000			
1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah rumah tidak layak huni dan PSU yang dilakukan perbaikan	100 unit	100 unit	2.528.437.000	4.127.201.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh kabupaten yang tertata	21,63 Persen	21,63 Persen	1.659.865.000	545.000.000			
1	4	4	2.01	5	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.659.865.000	545.000.000			
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	22 unit	22 unit	1.659.865.000	545.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	100 Persen	13.592.785.428	11.027.866.497			
1	4	5	2.01	5	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan di wilayah kabupaten yang telah memiliki PSU untuk mendukung fungsi hunian	150 unit	150 unit	13.592.785.428	11.027.866.497			
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	140.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	18 paket	18 paket	13.492.785.428	10.837.866.497	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fiskal Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan	20 laporan	20 laporan	100.000.000	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	100,00 Persen	3.489.742.627	3.743.627.278			
1	5	1	2.01	5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	31.521.000	27.198.700			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	19.161.200	24.497.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 Dokumen	5 Dokumen	3.422.700	2.701.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.02	5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	2.912.750.876	3.122.952.848			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	540 OB	540 OB	2.813.126.476	3.009.562.048	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 (Satu) Tahun	144 OB	144 OB	91.320.000	106.062.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1.961.400	4.691.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 laporan	2 laporan	6.343.000	2.637.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.03	5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	6.517.200	6.676.000			
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	6.676.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	5	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 persen	100 persen	18.000.000	200.000.000				
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (PDH,PKL,KORPRI,KHUSUS Hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	0 stel/ pasang	200 stel/ pasang	-	200.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	217.783.060	140.961.100				
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	12 Bulan	10.900.160	12.442.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	12 Bulan	1.063.600	6.562	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan dalam 1 (satu) Tahun	12 OB	12 OB	17.700.000	10.010.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material Kebutuhan Perkantoran 1 (satu) Tahun	12 OB	12 OB	12.841.600	8.148.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Kali	12 Kali	5.000.000	8.190.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	70 OK	70 OK	161.479.700	101.513.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	100 Persen	229.747.071	188.637.840				
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat yang disediakan	36 OB	36 OB	25.200.000	26.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	37.640.071	24.660.840	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	13 Unit	6.107.000	5.327.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	216 OB	216 OB	160.800.000	132.450.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	73.423.420	57.200.790				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	30 Unit	30 Unit	73.423.420	57.200.790	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan	42,00 persen	42,00 persen	2.507.050.950	2.154.743.500				
					Persentase Desa/Kelurahan yang telah memiliki Satlinmas	50,91 persen	50,91 persen						
					Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00 persen	100,00 persen						
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00 persen	100,00 persen						
1	5	2	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95 persen	95 persen	2.292.036.150	1.942.871.100				
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Aktivitas	5 Aktivitas	2.250.971.750	1.926.192.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disusun	10 SOP	10 SOP	10.337.200	12.178.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah tempat Pelayanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	1 tempat Pelayanan	1 tempat Pelayanan	1.000.000	4.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80 Persen	80 Persen	165.014.800	211.872.400				
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	50 orang	50 orang	28.050.200	24.039.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan Pengawasan atas Kepatuhan	13 lokasi	13 lokasi	118.350.000	183.890.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Aktivitas yang dilakukan dalam rangka penanganan	4 kasus	4 kasus	18.614.600	3.942.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pajak Rokok - Penegakan Disiplin	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.950.741.600	5.032.810.899				
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.940.317.000	5.032.810.899				
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	35.042.300	7.896.700				
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahaan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	27.658.000	7.896.700	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	1 tahun	1 tahun	144.335.200	2.144.987.999				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	12 Bulan	12 Bulan	-	2.032.949.799	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	6 OB	6 OB	126.480.000	103.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	5.168.700	8.238.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	12 0	12 0	8.400.000	8.400.000				
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	439.793.500	277.836.200				
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	21.002.900	9.999.700	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	105.516.000	14.996.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	23.678.600	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	29.900.000	11.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	2 OB	2 OB	-	12.768.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	28.800.000	41.990.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam daerah	129 Ok	129 Ok	158.796.000	177.081.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						jumlah perjalanan dinas luar daerah	42 Ok	42 Ok					
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 jenis	4 jenis	2.873.650.000	2.503.165.000				
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Surat masuk dan keluar yang diregister	600 Surat	600 Surat	28.800.000	25.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telpon,air dan listrik	12 bulan	12 bulan	87.900.000	57.875.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	8.950.000	9.990.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Operasional Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1989 orang/jam	1989 orang/jam	2.748.000.000	2.409.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
						Jumlah jasa Operasional Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2376 ob	2376 ob				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	7 jenis	7 jenis	61.500.000	90.525.000				
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	23 unit	23 unit	61.500.000	52.525.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 Jenis	10 Jenis	-	38.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	29.926.400	23.555.100				
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	19.925.650	10.475.100				
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	5 Jenis	5 Jenis	9.980.750	6.629.750	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya bahan cetak dan penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	4.954.000	1.705.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya atk kantor	15 jenis	15 jenis	4.990.900	2.140.400	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	1 tahun	10.000.750	13.080.000				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit	10.000.750	13.080.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	5	1			29.926.400	23.555.100							
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	29.926.400	23.555.100					
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	19.925.650	10.475.100				
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	5 jenis	5 jenis	9.980.750	6.629.700	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya bahan cetak dan penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	4.954.000	1.705.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material				4.990.900	2.140.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	1 tahun	10.000.750	13.080.000				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya atk kantor	3 unit	3 unit	10.000.750	13.080.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	5	1			29.926.400	23.555.100							
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	29.926.400	23.555.100					
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi Umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	19.925.650	10.475.100				
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor	5 Jenis	5 Jenis	9.980.750	6.629.700	Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya bahan cetak dan penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	4.954.000	1.705.000	Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya atk kantor	15 Jenis	15 Jenis	4.990.900	2.140.400	Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	1 tahun	10.000.750	13.080.000				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit	10.000.750	13.080.000	Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	5	1			3.914.795.917	2.844.340.733							
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	2.450.116.249	2.228.993.733					
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 kegiatan	6 kegiatan	22.359.900	13.643.750				
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	19.510.150	10.794.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.435	2.435	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.372	2.372	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	3.005	3.005	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.481	2.481	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	1.820.450	1.820.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 kegiatan	4 kegiatan	1.721.522.658	1.693.706.542				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	2683 OB	2683 OB	1.643.687.808	1.615.855.192	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang di verifikasi	108 OB	108 OB	76.080.000	76.080.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1 laporan	1 laporan	8.265	8.265	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	92.835	94.485	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	5	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD	2 kegiatan	2 kegiatan	7.061.100	6.467.600			
1	5	1	2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	2 laporan	2 laporan	1.061.100	400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.067.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	303.421.590	185.863.650			
1	5	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	5.686.400	5.686.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	20.200.000	13.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	25 jenis	25 jenis	25.429.590	20.154.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	13.304.000	11.493.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	42 ok	42 ok	238.801.600	135.529.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan	229.199.289	228.884.412			
1	5	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	91.200.000	91.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	53.999.289	53.684.412	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	96 OB	96 OB	84.000.000	84.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 kegiatan	3 kegiatan	166.551.712	100.427.779			
1	5	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	20 unit	20 unit	79.777.550	79.777.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 unit/set	3 unit/set	5.131.000	5.091.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala	2 unit/set	2 unit/set	81.643.162	15.559.229	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	1.464.679.668	615.347.000			
1	5	3	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	terlaksananya Sosialisasi Kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	35.925.000	1.000.000			
1	5	3	2.01	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	240 orang	240 orang	35.925.000	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penanganan Penanggulangan Bencana	10 kegiatan	10 kegiatan	1.363.236.768	591.600.000			
1	5	3	2.02	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	27.187.200	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan	62 orang	62 orang	589.149.200	588.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan yang disediakan	17 unit	17 unit	243.375.000	600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	9 Penyusunan Rencana Kontijensi	dokumen rencana kontijensi	1 dokumen	1 dokumen	68.248.050	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.02	10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Personil yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	150 orang	150 orang	66.699.380	1.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penanganan Darurat	2 kegiatan	2 kegiatan	21.768.250	21.272.000			
1	5	3	2.03	2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana	96 kali	96 kali	9.532.000	9.732.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.03	3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani	48 kali	48 kali	12.236.250	11.540.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi terkait	2 kegiatan	2 kegiatan	43.749.650	1.475.000			
1	5	3	2.04	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	24.045.050	675	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dalam rangka kerjasama antar lembaga	1 kali	1 kali	19.704.600	800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.712.302.334	4.608.483.976			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3.251.305.737	3.617.062.481			
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	56.498.080	9.933.480			
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA dan Perubahan Renja yang dibuat	2 Laporan	2 Laporan	34.930.680	2.071.720	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.751.000	851	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.751.000	851	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.701.780	1.231.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.734	8.734	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	2 Laporan	2 Laporan	15.490.220	4.054.860	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.425.297.130	3.045.295.231			
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	396 OB	396 OB	2.304.349.190	2.927.107.291	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	114.960.000	112.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.352.240	1.352.240	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	4.635.700	4.635.700	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	6.000.000	6.676.000			
1	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.676.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	23.100.000	35.000.000			
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	-	35.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	8 Jenis	8 Jenis	268.496.155	194.249.230			
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di Sediakan	9 Jenis	9 Jenis	2.000.925	2.070.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	3 Unit	47.000.000	35.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	4.959.400	4.963.050	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	2.999.650	2.817.650	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	9.600.000	9.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	16.019.180	15.128.430	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	3 Kali	3 Kali	2.700.000	2.250.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	180 Kali	180 Kali	183.217.000	121.919.900	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan perangkat daerah yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	289.260.000	267.861.500			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	1400 surat	1400 surat	18.000.000	18.201.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan listrik, luran Internet dan luran TV Kabel	12 Bulan	12 Bulan	55.260.000	61.260.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	147 OB	147 OB	216.000.000	188.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	19 Unit	19 Unit	102.258.397	58.047.040			
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil Dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	60.921.750	53.828.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	12 Unit	12 Unit	1.935.000	1.735.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	3 Unit	39.401.647	2.484.040	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Ketersediaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 Lembaga	2 Lembaga	147.056.460	114.060.100			
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	2 PSKS	2 PSKS	147.056.460	114.060.100			
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK laki-laki yang mendapatkan jasa upah kerja	17 orang	17 orang	134.252.160	101.255.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
						Jumlah TKSK perempuan yang mendapatkan jasa upah kerja	5 orang	5 orang					
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan layanan LK3	10 Keluarga	10 Keluarga	12.804.300	12.804.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
						Jumlah Sosialisasi LK3 yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali					
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang telah tertangani	100 Persen	100 Persen	12.628.900	10.596.300			
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah pelayanan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kel asal	5 Orang	5 Orang	12.628.900	10.596.300			
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Yang Dipulangkan ke Daerah Asalnya K	10 Orang	10 Orang	12.628.900	10.596.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas telantar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	80 %	80 %	265.773.100	94.010.550			
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	5 Layanan	5 Layanan	249.023.000	83.464.000			
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlanjar yang mendapatkan perumahan	50 Orang	50 Orang	106.990.600	27.873.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas telantar dan lansia telantar yang menerima bantuan alat bantu	3 Orang	3 Orang	26.196.950	9.375.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang direunifikasi dengan keluarganya	10 Orang	10 Orang	14.536.800	14.411.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS perempuan yang mengikuti bimtek	2 Orang	2 Orang	14.788.000	14.728.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
						umlah PMKS laki-laki yang mengikuti bimtek	3 orang	3 orang					
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lansia telantar yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	198 Orang	198 Orang	64.609.000	17.075.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang PMKS lainnya korban HIV/AIDS dan Napza	1 Layanan	1 Layanan	16.750.100	10.546.550			
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Sosialisasi NAPZA Yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	16.750.100	10.546.550	Kab. Luwu, Ponrang, Buntu Kamiri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80 %	80 %	693.656.200	536.973.340			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
1	6	5	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	2 Layanan	2 Layanan	693.656.200	536.973.340			
1	6	5	2.02	2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan penerima program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan sosial lainnya	22 Kecamatan	22 Kecamatan	126.521.200	91.407.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	5	2.02	3) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial Pangan (Sembako) APBN	21638 KK	21638 KK	567.135.000	445.566.090	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
					Jumlah Mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan bantuan penyelesaian study	244 Mahasiswa	244 Mahasiswa					
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan program PKH	17111 RT	17111 RT					
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penyelenggaraan pelayanan korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	317.259.650	216.932.960			
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	100 %					
1	6	6	2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan sosial bencana alam dan sosial kab	1 Layanan	1 Layanan	101.845.550	46.336.750			
1	6	6	2.01	1) Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Menerima Bantuan Makanan	80 Orang	80 Orang	73.050.650	46.336.750	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	6	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	1 Layanan	1 Layanan	215.414.100	170.596.210			
1	6	6	2.02	2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana yang mendapatkan jasa upah kerja	30 Orang	30 Orang	215.414.100	170.596.210	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan TMP Nasional Kabupaten	85 %	85 %	24.622.287	18.848.245			
1	6	7	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP Nasional Kabupaten yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	24.622.287	18.848.245			
1	6	7	2.01	2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Nasional Yang Terlaksana	2 Hari Nasional	2 Hari Nasional	24.622.287	18.848.245	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS SOSIAL
					Luas TMP yang dipelihara	8880 M2	8880 M2					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.034.287.292	6.093.392.651			
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.470.754.649	5.278.316.464			
2	7	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	11.772.200	7.822.400			
2	7	1	2.01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	9.486.800	5.537.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
					forum perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
2	7	1	2.01	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	390	390	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	390	390	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	390	390	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	390	390	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.01	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LKjIP)	1 dokumen	1 dokumen	7.254	7.254	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Jenis	2 Jenis	4.742.912.849	4.491.871.233			
2	7	1	2.02	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	612 orang/bulan	612 orang/bulan	4.662.992.849	4.395.751.233	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.02	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	12 dokumen	12 dokumen	79.920.000	96.120.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	6.000.000	6.460.200			
2	7	1	2.03	6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000	6.460.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	7	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	348.518.200	340.387.350				
				Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis							
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	2.223.500	6.623.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit	15.655.000	10.330.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	10.000.000	9.707.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	11.500.000	9.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	33.498.200	35.135.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan jamuan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	12.493.500	14.743.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	68 kali	68 kali	259.548.000	251.247.450	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali							
2	7	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	255.518.400	302.836.640				
				Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis							
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pegawai yang disediakan jasa surat menyurat	60 orang/bulan	60 orang/bulan	24.000.000	30.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	68.118.400	80.236.640	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	5.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	312 orang/bulan	312 orang/bulan	158.400.000	187.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	101.033.000	128.938.641				
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	15 unit	15 unit	76.533.000	96.203.196	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 unit	15 unit							
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	150 M2	150 M2	20.000.000	32.735.445	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 Persen	80 Persen	50.866.100	35.084.100				
2	7	2	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.866.100	35.084.100				
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	50.866.100	35.084.100	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	60,02 %	60,02 %	143.924.453	364.179.157				
2	7	3	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	50 %	50 %	118.349.453	333.400.957				
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun	16 orang	16 orang	92.639.453	99.970.453	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	25.710.000	233.430.504	Kab. Luwu, Bua, Karang-Karangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	4 Lembaga	4 Lembaga	15.875.000	15.978.200				
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	4 Lembaga	4 Lembaga	15.875.000	15.978.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	7	3	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang telah dilakukan pengukuran produktivitas tingkat daerah	15 %	15 %	9.700.000	14.800.000				
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laporan produktivitas tenaga kerja	1 Laporan	1 Laporan	9.700.000	14.800.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	10 %	10 %	55.801.990	47.249.990				
2	7	4	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	2200 orang	2200 orang	47.263.490	40.673.490				
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang dilayani	2000 orang	2000 orang	22.315.400	22.315.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan	50 orang	50 orang	5.938.090	5.938.090	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan	20 orang	20 orang	19.010.000	12.420.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja migran yang diberikan perlindungan	2 orang	2 orang	8.538.500	6.576.500				
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terlibat	2 orang	2 orang	8.538.500	6.576.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ((PP /PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	98 %	98 %	312.940.100	368.562.940				
2	7	5	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	100 perusahaan	100 perusahaan	16.060.250	17.685.300				
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	16.060.250	17.685.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	100 %	100 %	296.879.850	350.877.640				
					Jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	4 kali	4 kali	20.101.600	7.842.150	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	4 kali	4 kali	12.251.600	12.251.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	8654 orang	8654 orang	257.310.150	330.783.890	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				36.233.850	32.364.800				
3	32	2		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Luas cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yang disediakan	10000 Ha	10000 Ha	36.233.850	32.364.800				
3	32	2	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Cakupan penyelenggaraan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	1 Kawasan	36.233.850	32.364.800				
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah laporan verifikasi lahan transmigrasi	1 Laporan	1 Laporan	36.233.850	32.364.800	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Bolu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.727.607.340	3.057.468.815				
2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	3.079.688.860	2.695.996.165				
2	8	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	29.482.700	5.741.200				
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	23.646.300	3.604.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun (LAKIP dan SAKIP)	5 dokumen	5 dokumen	2.074.800	2.137.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	2.317.926.160	2.143.921.215				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangannya	300 OB	300 OB	2.154.486.160	2.062.081.215	Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang diberikan Honorarium/Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan	72 OB	72 OB	163.440.000	81.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi BMD pada SKPD	100 persen	100 persen	6.000.000	7.185.600			
2	8	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	7.185.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat Kinerja baik	100 persen	100 persen	85.830.000	22.125.000			
2	8	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Orang	1 Orang	44.250.000	22.125.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen	244.237.150	174.628.250			
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	2.414.550	30.012.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4.063.800	3.135.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	3.000.000	3.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	19 Jenis	19 Jenis	9.915.800	11.942.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	40 Kali	40 Kali	196.284.000	126.238.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	79.248.000	19.812.000			
2	8	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	1 unit	79.248.000	19.812.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	287.246.400	287.246.400			
2	8	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Aspri dan caraka yang disediakan	36 OB	36 OB	25.200.000	25.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan Listrik, Internet dan Tv	12 Bulan	12 Bulan	37.646.400	37.646.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	288 OB	288 OB	224.400.000	224.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100 persen	29.718.450	35.336.500			
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit	28.418.450	35.336.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	71,43 Persen	71,43 Persen	83.954.480	118.002.880			
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	80 persen	80 persen	18.068.680	24.771.080			
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	11.303.080	24.771.080	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 persen	100 persen	35.111.800	35.111.800			
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam sosialisasi PUG bidang politik, sosial dan ekonomi	50 Orang	50 Orang	35.111.800	35.111.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 persen	100 persen	30.774.000	58.120.000			
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku dan Korban KDRT yang diadvokasi	20 Orang	20 Orang	-	40.782.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	30.774.000	17.337.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	40,00 Persen	40,00 Persen	60.816.750	38.932.650			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	8	3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100 persen	100 persen	40.773.750	38.932.650			
2	8	3	2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat pertemuan dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Kali	2 Kali	40.773.750	38.932.650	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	100 Persen	162.273.850	81.062.020			
2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 persen	100 persen	62.213.850	30.949.400			
2	8	4	2.01	2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	2 kegiatan	2 kegiatan	35.943.800	30.949.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	100 persen	100 persen	100.060.000	50.112.620			
2	8	4	2.02	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan	15 Keluarga	15 Keluarga	100.060.000	50.112.620	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	100 Persen	100 Persen	35.726.000	41.742.200			
2	8	5	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Sistem data Gender dan anak	100 persen	100 persen	35.726.000	41.742.200			
2	8	5	2.01	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.726.000	41.742.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan penyelenggaraan pemenuhan hak anak	100 Persen	100 Persen	164.560.400	51.881.000			
2	8	6	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 persen	100 persen	164.560.400	51.881.000			
2	8	6	2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terlibat dalam pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	10 Orang	10 Orang	164.560.400	51.881.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penyelenggaraan perlindungan khusus anak	100 Persen	100 Persen	140.587.000	29.851.900			
2	8	7	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	25 persen	25 persen	68.824.000	29.851.900			
2	8	7	2.03	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	68.824.000	29.851.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.054.382.190	6.833.384.504			
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.297.506.520	3.194.385.834			
2	9	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	32.295.350	31.694.440			
2	9	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.592.700	14.894.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					
2	9	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.823.090	2.893.290	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.695.950	2.695.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.003.310	2.003.310	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.036.200	2.036.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.079.100	4.179.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2.065.000	2.992.090	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.399.109.015	2.538.058.349			
2	9	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah AsN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	29 orang	29 orang	2.203.301.365	2.384.942.999	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 OB	12 OB	172.620.000	130.860.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.811.000	5.061.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	15 Laporan	15 Laporan	15.376.650	17.194.350	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	4.740.810	4.740.810			
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	6 Laporan	6 Laporan	4.740.810	4.740.810	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	37.927.050	6.607.050			
2	9	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	6.607.050	6.607.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	411.834.145	254.771.035			
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	3.340.250	3.340.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	12.639.400	12.631.210	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	12.600.000	9.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	18.090.075	18.090.075	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	60 Kali	60 Kali	3.978.420	3.986.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	160 OK	160 OK	284.656.000	207.723.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	306.658.150	291.058.150			
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	32.680.000	32.680.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	348 OB	348 OB	273.978.150	258.378.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	45 unit	45 unit	80.486.000	67.456.000			
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	19 Unit	19 Unit	73.405.000	60.375.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	26 unit	26 unit	7.081.000	7.081.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka Ketersediaan Energi	3.450 kkal/kapita/hari	3.450 kkal/kapita/hari	1.016.690.000	3.008.300.000			
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Disediakan dalam 1 Tahun	15 Unit	15 Unit	1.016.690.000	3.008.300.000			
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang disediakan	3 Kelompok	3 Kelompok	1.000.000.000	3.008.300.000	Kab. Luwu, Suli, Towondo Kab. Luwu, Bua, Lengkong Kab. Luwu, Lamasi, Wiwitan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Komsumsi Protein	66 Gr/ Kapita/ Hari	66 Gr/ Kapita/ Hari	616.408.605	579.073.400			
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50 Persen	50 Persen	325.465.185	339.073.400			
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Frekuensi pelaksanaan pemantauan stok, pasokan, dan harga pangan	12 Bulan	12 Bulan	37.760.080	28.786.600	Kab. Luwu, Suli, Suli Kab. Luwu, Bajo, Bajo Kab. Luwu, Walenrang, Batusitanduk Kab. Luwu, Bua, Tana Rigella Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	3 kelompok	3 kelompok	149.127.950	310.286.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe Kab. Luwu, Suli, Towondo Kab. Luwu, Bua, Lengkong Kab. Luwu, Lamasi, Wiwitan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan penyelenggaraan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	45,44 Persen	45,44 Persen	238.448.670	240.000.000			
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Wanita yang Mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari	8 kelompok	8 kelompok	238.448.670	240.000.000	Kab. Luwu, Suli, Cimpu Kab. Luwu, Bajo, Saga Kab. Luwu, Bua Ponrang, Tampumia Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan Kab. Luwu, Bua, Raja Kab. Luwu, Lamasi, Wiwitan Kab. Luwu, Latimojong, Boneposi Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Penanganan Rawan Pangan	8 Skor	8 Skor	39.400.400	33.600.400			
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Rawan Pangan yang Ditangani	4 Jenis	4 Jenis	39.400.400	33.600.400			
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kerawanan pangan yang ditangani	4 Kejadian	4 Kejadian	39.400.400	33.600.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji	60 Persen	60 Persen	84.376.665	18.024.870			
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar yang Diuji Tingkat Keamanannya	30 Sampel	30 Sampel	84.376.665	18.024.870			
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terdaftar	30 Komoditi	30 Komoditi	22.411.550	18.024.870	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KETAHANAN PANGAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.462.868.637	2.778.146.460			
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.175.998.337	2.164.258.410			
2	10	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	11.004.900	8.265.550			
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	6.665.300	3.925.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.204.900	2.204.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	2.134.700	2.134.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	3 Jenis	3 Jenis	1.691.757.657	1.725.234.470			
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	216 OB	216 OB	1.588.653.157	1.623.546.970	Kab. Luwu, Belopa, Senga		DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (Satu) Tahun	144 OB	144 OB	97.080.000	97.080.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	6.024.500	4.607.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	137.578.060	131.609.590			
2	10	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	19 Unit	19 Unit	2.902.200	2.308.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis	19 Jenis	4.779.960	5.183.510	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	1.819.000	1.819.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	8.880.000	7.560.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	11.999.400	10.910.780	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	4.800.000	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	58 OK	58 OK	102.397.500	99.827.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 Unit	1 Unit	8.000.000	8.000.000			
2	10	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	8.000.000	8.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	302.172.720	267.600.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 10 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	21.972.720	7.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	470 OB	470 OB	274.200.000	254.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	25.485.000	23.548.800			
2 10 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	13 Unit	13 Unit	25.485.000	23.548.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang telah diselesaikan melalui mediasi	100 Persen	100 Persen	38.602.150	37.590.800			
2 10 4 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yg Diselesaikan	5 Kasus	5 Kasus	38.602.150	37.590.800			
2 10 4 2.01 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	10 Dokumen	10 Dokumen	22.459.650	21.444.550	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 4 2.01 2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konflik Pertanahan yang dimediasi	5 Kasus	5 Kasus	16.142.500	16.146.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap di distribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dari tanah absentee	100 Persen	100 Persen	16.116.450	16.122.300			
2 10 6 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset Tanah Pemda	5 dokumen	5 dokumen	16.116.450	16.122.300			
2 10 6 2.01 1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Inventarisasi	10 dokumen	10 dokumen	16.116.450	16.122.300	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 Persen	100 Persen	232.151.700	560.174.950			
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aset Tanah Pemda Yang Bersertifikat	75 Bidang / Persil	75 Bidang / Persil	232.151.700	560.174.950			
2 10 10 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Persil tanah yang dilakukan kordinasi dan sinkronisasi dalam rangka konsolidasi tanah kabupaten	75 Bidang	200 Bidang	232.151.700	560.174.950	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANAHAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.410.206.954	8.564.266.246			
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.031.664.654	2.571.769.596			
2 11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	22.611.200	25.265.000			
2 11 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra Renja, RKA dan DPA yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	22.611.200	11.610.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	-	3.060.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	0 Dokumen	1 dokumen	-	2.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	0 Dokumen	1 dokumen	-	1.024.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	0 Dokumen	1 dokumen	-	1.005.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	0 Dokumen	1 dokumen	-	3.468.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun	0 Dokumen	5 dokumen	-	2.996.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu			2.331.011.774	2.126.355.971			
2 11 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang	23 Orang	2.182.211.774	2.020.405.571		Retribusi Jasa Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2 11 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang di verifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	148.800.000	100.320.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	0 Laporan	1 Laporan	-	2.935.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	0 Laporan	14 Laporan	-	2.695.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen	10.500.000	9.000.000			
2 11 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	10.500.000	9.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	267.246.680	157.748.625			
2 11 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	3.187.250	3.127.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	10.647.000	2.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	17.415.380	17.995.525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	200.997.050	134.345.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa	100 Persen	100 Persen	264.170.000	189.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200 Surat	200 Surat	18.000.000	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan biaya tagihan telepon air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	72.600.000	67.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	41.570.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	132.000.000	95.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	112.725.000	63.500.000			
2 11 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	40 kendaraan	40 kendaraan	112.725.000	63.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup			-	100.000.000			
2 11 2 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		100 Persen	100 Persen	-	100.000.000			
2 11 2 2.02	1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	-	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	26.65 Angka	26.65 Angka	144.672.500	3.893.501.000			
2 11 3 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	20 %	20 %	144.672.500	3.893.501.000			
2 11 3 2.01	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan hasil pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	2 Laporan	2 Laporan	30.285.300	1.316.750.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk		
2 11 3 2.01	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0 dokumen	1 dokumen	-	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 3 2.01	3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan analis laboratorium	1 lab	1 lab	114.387.200	2.559.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk		
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase bahan berbahaya dan beracun (B3_ dan limbah B3 yang dapat dikendalikan	0 Persen	100 Persen	-	9.514.700			
2 11 5 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume limbah B3 yang dikumpulkan	0 m3	6 m3	-	9.514.700			
2 11 5 2.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				-	9.514.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	100 Persen	100 Persen	7.874.200	16.637.500			
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintahan			7.874.200	16.637.500			
2 11 6 2.01	3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	7.874.200	16.637.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah Perkantoran yang telah dilakukan Pengelolaan	90,19 %	90,19 %	2.225.995.600	1.972.843.450			
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Dokumen Pelaporan Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah	2 laporan	2 laporan	2.225.995.600	1.972.843.450			
2 11 11 2.01	1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaporan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah	0 dokumen	2 dokumen	-	18.491.450	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan sampah	4 KECAMATAN	4 KECAMATAN	2.225.995.600	1.954.352.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2	12								5.460.574.388	4.724.118.145			
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	3.858.342.888	3.763.409.345			
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	24.251.000	8.267.000			
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10.004.800	1.924.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.334	1.233.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.256	1.225.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.225.600	1.225.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.075.600	1.075.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.286.000	1.582.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.993.736.334	3.025.963.745			
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	2.881.001.534	2.924.118.145	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	107.580.000	98.115.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	1.498.600	9.892	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	3.466.000	2.741.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	9.347.000	9.251.600			
2	12	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	947	6.974	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	8.400.000	8.554.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana disiplin yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	99.511.000	40.261.000			
2	12	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim II/III	1 Orang	1 Orang	74.511.000	30.261.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang	2 orang	5.000.000	10.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	9 Jenis	9 Jenis	340.220.700	281.729.253			
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	3.939.000	3.939.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 unit	6 unit	114.540.000	18.540.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	15.989.150	12.594.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	2.286.200	1.848.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	27 Jenis	27 Jenis	33.420.000	29.920.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	12.444.350	16.572.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	9 Jenis	9 Jenis	150.557.000	198.315.303	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	333.388.538	350.191.581			
2	12	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500 Surat	500 Surat	8.400.000	9.750.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	200.188.538	224.040.781	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	19 OB	19 OB	124.800.000	116.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	31 unit/set	31 unit/set	57.888.316	47.745.166			
2	12	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	27 unit	27 unit	42.229.635	33.512.192	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	14 unit/set	14 unit/set	3.178.000	3.887.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	2000 m2	2000 m2	5.505.680	5.518.973	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	25 unit	5.453.001	4.827.001	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber KTP	100 Persen	100 Persen	1.066.812.550	758.380.900			
2	12	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk	4 Jenis	4 Jenis	948.359.200	695.961.400			
2	12	2	2.01	2 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah petugas pelayanan pendaftaran penduduk	6 OB	6 OB	57.600.000	57.882.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	4 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah unit pelayanan pendaftaran penduduk	29 unit	29 unit	104.019.200	66.622.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	7 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	87598 Dokumen	87598 Dokumen	508.540.000	310.056.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.01	8 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah petugas pengumpulan dan analisis data pendaftaran penduduk	34 OB	34 OB	278.200.000	261.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	2	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi dalam rangka penerbitan Pelayanan Administrasi Kependudukan	40 Kali	40 Kali	115.027.350	62.419.500			
2	12	2	2.03	1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan	45 kali	45 kali	113.490.750	62.419.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	0,35 Persen	0,35 Persen	203.193.150	132.604.500			
2	12	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	7 Jenis	7 Jenis	83.910.800	70.185.000			
2	12	3	2.01	2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas pelayanan pencatatan sipil	8 OB	8 OB	57.600.000	50.822.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.01	3 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	jumlah dokumen pencatatan sipil	7 dokumen	7 dokumen	26.310.800	19.362.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	3	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil	7 Jenis	7 Jenis	119.282.350	62.419.500			
2	12	3	2.02	3 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan	38 Kali	38 Kali	117.520.750	62.419.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	100 Persen	100 Persen	297.225.800	62.419.500			
2	12	4	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Laporan	5 Laporan	294.463.200	62.419.500			
2	12	4	2.03	1 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang di laksanakan	20 kali	20 kali	126.169.500	62.419.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	100 Persen	100 Persen	35.000.000	7.303.900			
2	12	5	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen profil kependudukan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	7.303.900			
2	12	5	2.01	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kependudukan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	5.576.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	5	2.01	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen profil kependudukan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1.727.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2	13	1			8.783.964.714	7.898.151.523			
2	13	1			4.124.306.842	3.767.962.469			
2	13	1	2.01						
2	13	1	2.01	1					
2	13	1	2.01	7					
2	13	1	2.02						
2	13	1	2.02	1					
2	13	1	2.02	3					
2	13	1	2.06						
2	13	1	2.06	2					
2	13	1	2.06	4					
2	13	1	2.06	5					
2	13	1	2.06	6					
2	13	1	2.06	7					
2	13	1	2.06	9					
2	13	1	2.08						
2	13	1	2.08	1					
2	13	1	2.08	2					
2	13	1	2.08	4					
2	13	1	2.09						
2	13	1	2.09	2					
2	13	3							
2	13	3	2.01						
2	13	3	2.01	1					
2	13	4							
2	13	4	2.01						
2	13	4	2.01	1					
2	13	4	2.01	3					
2	13	4	2.01	4					
2	13	4	2.01	8					
2	13	4	2.01	11					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	jumlah desa yang difasilitasi	150 desa	150 desa	95.067.400	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga desa dan lembaga adat desa	99.00 persen	99.00 persen	1.274.979.605	1.129.048.800			
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yang di bina	20 lembaga	20 lembaga	1.274.979.605	1.129.048.800			
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yang dibangun	20 lembaga	20 lembaga	40.168.800	29.048.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah kegiatan TP PKK yang difasilitasi	1 lembaga	1 lembaga	1.050.000.000	1.100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fiskal Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.286.954.820	10.527.770.529			
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.957.556.592	2.664.336.851			
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	23.282.000	1.590.000			
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	1 kegiatan 2 dokumen	1 kegiatan 2 dokumen	15.124.000	318		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	615	318	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	615	318	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	683	318	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	683	318	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.142.148.902	1.881.020.606			
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	240 OB	240 OB	1.902.444.902	1.881.020.606	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	408.310.190	365.219.580			
2	14	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	1.009.400	5.124	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	4 unit	44.000.000	57.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang di sediakan	8 jenis	8 jenis	6.437.250	4.311.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	4 jenis	4 jenis	5.475.500	11.182.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	4 jenis	4 jenis	13.020.000	15.060.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang di sediakan	42 jenis	42 jenis	37.902.040	24.085.280	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan Makan dan Minum yang di sediakan	1 jenis	1 jenis	2.700.000	17.665.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36 OK	36 OK	297.766.000	235.403.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 OK	36 OK									
		Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di SKPD	12 kali	12 kali									
2	14	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	205.837.200	254.208.840				
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1000 Surat	1000 Surat	-	11.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	11.437.200	9.438.840	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1596 OB	1596 OB	194.400.000	233.370.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	165.978.300	162.297.825				
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah biaya pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	53 unit	53 unit	160.683.300	162.297.825	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	53 unit	53 unit						
					Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	3 unit	3 unit						
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	80 %	80 %	124.031.000	86.669.794				
2	14	2	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Program KKBPK	1 laporan	1 laporan	124.031.000	86.669.794				
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	39.521.500	39.261.250	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Data dan informasi keluarga yang di sediakan	1 Data (RT/KK)	1 Data (RT/KK)	42.500.000	7.408.544		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pencatatan dan pelaporan program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	22.509.500	40.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Penggunaan MKJIP	80 %	80 %	6.111.422.728	5.192.269.384				
2	14	3	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah jenis sarana yang di terima masyarakat	3 jenis	3 jenis	1.641.130.800	1.363.930.694				
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Poktan Bangsa Kencana yang menerima sarana KIE	102 Kelompok	102 Kelompok	228.898.800	584.985.340	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan Bangsa Kencana yang dikelola	21 balai	21 balai	1.412.232.000	778.945.354	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kader IMP	1527 Orang	1527 Orang	1.089.600.000	1.089.600.000				
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Insttusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang digerakkan	1527 orang	1527 orang	1.089.600.000	1.089.600.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang bermitra dengan OPD	25 Faskes	25 Faskes	2.246.061.928	1.720.988.690				
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi	25 faskes	25 faskes	61.802.700	22.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor baru dan ulangan pengguna MKJP	960 orang	960 orang	1.231.099.057	701.231.691	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
											Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk		
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang diadakan	16 paket/unit	16 paket/unit	905.894.421	997.256.999	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan kesertaan ber-KB	6 Organisasi	6 Organisasi	1.134.630.000	1.017.750.000				
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	14 kali	14 kali	1.134.630.000	1.017.750.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase peran BKB,BKL,BKR yang Aktif	70 %	70 %	1.093.944.500	2.584.494.500				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah jenis Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	6 Kelompok	6 Kelompok	1.075.509.500	2.584.494.500			
2 14 4 2.01	2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Sarana dan Prasarana KB dan SIGA	16 paket	16 paket	358.500.000	642.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01	4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti Orientasi/Pelatihan	240 orang	240 orang	45.844.500	43.444.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 4 2.01	6 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menerima biaya operasional	22 kelompok	22 kelompok	615.860.000	1.899.050.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.438.943.288	4.020.460.681			
2 15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	58.610.570	29.612.490			
2 15 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun"	1 laporan	1 laporan	28.010.180	8.212.300	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000	3.615.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000	1.950.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.732.000	5.732.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.880.000	4.720.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	3.995.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8.888.390	1.388.190	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	12.670.000	3.219.929.497			
2 15 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	0 ob	50 ob	-	3.211.948.897	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	6.750.000	4.840.200	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	6 laporan	6 laporan	5.920.000	3.140.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	312.567.034	151.613.334			
2 15 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	3.446.600	2.482.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	21.351.134	12.998.634	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang yang disediakan	2 jenis	2 jenis	20.960.000	4.680.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	16 jenis	16 jenis	62.759.900	20.750.600	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	15.625.000	9.368.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 OK	25 OK	179.550.500	101.333.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	574.242.400	535.251.200			
2 15 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	2000 Surat	2000 Surat	44.000.000	31.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik"	12 Bulan	12 Bulan	146.602.400	140.751.200	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	20 OB	20 OB	383.640.000	363.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	288.238.284	84.054.160			
2 15 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	21 unit	21 unit	246.387.550	84.054.160	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	300 Titik	300 Titik	11.807.770.892	4.429.111.332			
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Rambu - Rambu Lalu Lintas yang Diadakan, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	1.584.985.067	901.535.900			
2 15 2 2.02	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Jenis prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	300 unit	300 unit	1.410.985.067	901.535.900	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.380.487.325	1.995.033.432			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 15 2 2.03	2 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	1 unit	5.380.487.325	1.995.033.432	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.06	2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	82 persen	82 persen	4.746.492.500	1.532.542.000			
2 15 2 2.06	2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Jenis Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diadakan dan dipasang	1 jenis	1 jenis	3.904.050.000	1.205.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.06	4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah titik pengawasan dan patroli keselamatan angkutan jalan	22 titik	22 titik	542.442.500	327.542.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah jaringan lintas penyeberangan yang dikelola	1 jaringan lintas	1 jaringan lintas	378.084.100	48.740.000			
2 15 3 2.12	2 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diawasi	10 Pelabuhan	10 Pelabuhan	178.084.100	48.740.000			
2 15 3 2.12	4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 pelabuhan	10 pelabuhan	115.264.100	48.740.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LLAJ)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	421300 Orang	421300 Orang	191.988.540	100.985.000			
2 15 2 2.05	2 Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1973 Unit	1973 Unit	191.988.540	100.985.000			
2 15 2 2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	2 unit	2 unit	33.969.040	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	3 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala	1973 unit	1973 unit	72.750.000	37.200.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1973 lembar	1973 lembar	36.785.000	36.785.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 2 2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah sarana dan prasarana penguji kendaraan bermotor yang di pelihara	2 unit	2 unit	28.484.500	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.410.926.447	3.274.654.480			
2 16 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	33.795.840	2.187.600			
2 16 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	22.776.440	8.628	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.911.200	1.324.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.767.580.744	2.932.534.857			
2 16 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	35 OB	35 OB	2.594.150.744	2.754.386.057	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	11 OB	11 OB	159.960.000	165.960.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	5.736.600	1.525.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	7.733.400	10.663.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	409.239.450	184.422.374			
2 16 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	16 Unit/set	16 Unit/set	2.909.200	7.984	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	1.847.290	2.999.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	5.899.060	2.220.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	6.750.000	990	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	10.320.350	10.320.350	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2 16 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	42 OK	42 OK	183.976.150	167.093.774	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	144.204.113	132.800.299			
2 16 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 OB	12 OB	10.400.000	10.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	21.004.113	24.000.299	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	9 OB	9 OB	112.800.000	98.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 Unit/set	5 Unit/set	50.106.300	22.709.350			
2 16 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	5 Unit	5 Unit	47.869.300	22.709.350	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Komunikasi Informasi dan Media Massa	35 Persen	35 Persen	1.592.778.450	1.472.170.880			
2 16 2 2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil layanan komunikasi dan informatika	100 Persen	100 Persen	1.592.778.450	1.472.170.880			
2 16 2 2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang Dikelola	100 konten	100 konten	410.009.600	330.500.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 2 2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis Informasi Publik yang diberikan pelayanan	3 Jenis	3 Jenis	50.048.800	22.273.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 2 2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang dilayani	40 Media	40 Media	999.994.400	999.998.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 2 2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	7 Vendor	7 Vendor	99.999.200	104.379.080	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 2 2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Laporan	1 Laporan	32.481.450	15.020.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi dalam rangka e-gov yang telah digunakan Pemda Kabupaten Luwu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	656.946.360	554.495.738			
2 16 3 2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	90.909090909090909 Persen	90.909090909090909 Persen	656.946.360	554.495.738			
2 16 3 2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dengan pusat data/ruang server monitoring jaringan informasi	35 OPD	35 OPD	598.497.540	532.027.738	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 16 3 2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikelola, website yang dikelola, perangkat lunak dan aplikasi yang diperbaiki, pengadaan hardware untuk aplikasi E-Gov, pembangunan/pengembangan /redesain aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	58.448.820	22.468.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				76.776.000	37.299.450			
2 20 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	45.00 Persen	45.00 Persen	76.776.000	37.299.450			
2 20 2 2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data statistik	45 Persen	45 Persen	76.776.000	37.299.450			
2 20 2 2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	4 Laporan	4 Laporan	32.038.550	26.269.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 20 2 2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah jenis infrastruktur yang dikembangkan	2 Jenis	2 Jenis	24.030.000	11.030.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				86.779.690	44.690.250			
2 21 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	1 level	1 level	86.779.690	44.690.250			
2 21 2 2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	42.785.340	9.959.000			
2 21 2 2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya koordinasi tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten yang ditetapkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.249.900	2.475.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21 2 2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	7.020.400	7.484.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2 21 2 2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	43.994.350	34.731.250			
2 21 2 2.02	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Laporan	4 Laporan	43.994.350	34.731.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	17	1			2.664.627.311	3.514.661.132						
2	17	1			2.664.627.311	2.744.415.282						
2	17	1	2.01			5.479.100						
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	0 Dokumen 2 Dokumen	- 930	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	- 8.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	- 8.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	- 8.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	0 Dokumen 1 Dokumen	- 8.752	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	0 Dokumen 5 Dokumen	- 1.048.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen 100 persen	2.378.825.701	2.054.877.622			
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	30 OB 30 OB	2.255.815.801	1.923.258.822	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	15 Dokumen 15 Dokumen	120.510.000	121.590.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	0 Laporan 1 Laporan	- 2.122.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan 14 Laporan	2.499.900	7.906.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	0 persen 100 persen	-	2.499.600			
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan 1 Laporan	- 2.499.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000	15.000.000			
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stell 30 Stell	-	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen 100 persen	270.801.610	318.228.660			
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis 19 Jenis	21.999.560	10.524.260	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 Jenis 6 Jenis	- 5.889.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	8 Jenis 8 Jenis	35.400.000	21.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	0 Jenis 61 Jenis	- 21.444.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis 3 Jenis	24.000.000	9.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	36 Ok 36 Ok 85 OK 85 OK	189.402.050	249.170.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.000.000			
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	0 Jenis 5 Jenis	- 41.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa			233.400.000			
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	0 Surat 300 Surat	- 12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 17 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	0 Bulan	12 Bulan	-	5.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	0 OB	312 OB	-	216.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	0 persen	100 persen	-	73.930.300			
2 17 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0 Unit	8 Unit	-	67.570.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	0 Unit	10 Unit	-	6.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	0 persen	100 persen	-	50.000.000			
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	0 persen	100 persen	-	50.000.000			
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti Pelatihan	40 Orang	40 Orang	-	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	0 persen	45 persen	-	670.245.850			
		Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	0 persen	45,00 persen					
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	0 persen	100 persen	-	670.245.850			
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran produk Koperasi dan UMKM dalam rangka peringatan HARKOPNAS Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan		1 kegiatan	-	670.245.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	0 persen	30,75 persen	-	50.000.000			
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0 %	2,50 %					
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan untuk Pelaku UMKM	0 kegiatan	1 kegiatan	-	50.000.000			
2 17 7 2.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang Mengikuti Pelatihan	0 orang	30 orang	-	50.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					515.006.400			
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pembangunan industri	0 %	0 %	-	515.006.400			
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dengan RPIP	0 %	0 %					
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0 %	1 %					
		Tingkat penerapan rencana pembangunan industri	0 Angka	100 Angka					
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	-	515.006.400			
3 31 2 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pameran yang dilakukan Melibatkan Pelaku Industri	0 Pameran	2 Pameran	-	465.006.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3 31 2 2.01 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta Pelatihan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0 Orang	30 Orang	-	50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					299.990.478			
3 31 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen		299.990.478			
3 31 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 persen	100 persen		65.266.750			
3 31 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	21.026.250	21.026.250	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4.815.000	4.815.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
3 31 1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	38 Jenis	38 Jenis	5.900.000	5.887.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	19.950.000	20.450.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa	3 OP	3 OP	13.575.500	13.588.500	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 OK	20 OK						
3 31 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75 Persen	75 Persen	8.000.000	7.500.000			
3 31 1 2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	8.000.000	7.500.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 persen	100 persen	141.000.000	141.000.000			
3 31 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	69.000.000	69.000.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	132 OB	132 OB	72.000.000	72.000.000	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
3 31 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	85.723.728	85.723.728			
3 31 1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas/jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	215 M2	215 M2	85.723.728	85.723.728	Kab. Luwu, Suli, Buntu Kunyi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2 18 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	4.398.953.066	3.974.065.360			
2 18 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	39.770.800	29.970.800			
2 18 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	13.953.600	4.153.600	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.765.200	3.765.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.765.200	3.765.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.765.200	3.765.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.765.200	3.765.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.765.200	3.765.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	6.991.200	6.991.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.848.099.070	2.608.079.710			
2 18 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	396 ob	396 ob	2.760.051.570	2.520.032.210	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112 ob	112 ob	75.840.000	75.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.600.500	3.600.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Laporan	1 Laporan	3.602.500	3.602.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	5.004.500	5.004.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	22.711.500	22.011.500			
2 18 1 2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	22.711.500	22.011.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	269.495.900	230.292.750			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 18 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	3.540.000	3.540.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	8.008.750	8.008.750	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	10.296.000	10.296.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	16.800.000	25.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	4.500.000	4.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	153 orang/kegiatan	153 orang/kegiatan	163.200.000	178.748.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	100 orang/hari	100 orang/hari					
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	383.400.000	417.000.000			
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	90.600.000	90.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	292.800.000	326.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	99.364.996	79.110.000			
2 18 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10 unit	10 unit	79.110.000	79.110.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN	85 persen	85 persen	200.240.050	60.928.300			
2 18 2 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	29.159.300	60.928.300			
2 18 2 2.01 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 Laporan	1 Laporan	29.159.300	60.928.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	100 persen	100 persen	156.997.800	56.317.000			
2 18 3 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten	100 %	100 %	156.997.800	56.317.000			
2 18 3 2.01 2	Peleksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 kali	1 kali	87.629.400	56.317.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lama Proses Perizinan penanaman modal	1-15 Investor	1-15 Investor	207.445.450	91.205.300			
2 18 4 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1 sistem	1 sistem	207.445.450	91.205.300			
2 18 4 2.01 1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan	2 layanan	2 layanan	173.274.950	85.179.650	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4 2.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan hasil Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	12 Bulan	12 Bulan	15.341.300	2.315.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Sistem Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang disediakan	1 sistem	1 sistem	4.342.800	3.710.150	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 persen	75 persen	135.150.700	379.150.000			
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	135.150.700	379.150.000			
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	48.537.400	99.756.300	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	6 Laporan	6 Laporan	19.400.000	180.613.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 5 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	67.213.300	98.780.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisk	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				11.603.197.941	10.166.558.866			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 19 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.455.648.048	4.263.257.447			
2 19 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	24.362.000	28.382.000			
2 19 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	12.328.000	11.588.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.840.000	1.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.840.000	1.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.840.000	1.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.840.000	1.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	4.674.000	9.434.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.714.693.048	2.747.727.433			
2 19 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	324 OB	324 OB	2.619.133.048	2.628.247.433	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	90.360.000	98.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.600.000	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	2.600.000	10.560.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	44.640.000	36.480.000			
2 19 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	44.640.000	36.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	30.000.000	75.240.000			
2 19 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 orang/stel	90 orang/stel	-	45.240.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	30.000.000	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	276.416.000	403.192.650			
2 19 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 unit/buah/set	8 unit/buah/set	2.171.200	2.171.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	3 bulan	3 bulan	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	51.000.000	51.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	18.414.000	18.414.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	90 Kali	90 Kali	161.596.000	319.607.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.100.000	272.495.200			
2 19 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	null	0 unit	3 Unit	-	106.995.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	32 Unit	32 Unit	32.100.000	70.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	null	0 null	3 Unit	-	95.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	251.990.832	255.693.996			
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	23.990.832	27.693.996	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	27 OB	27 OB	228.000.000	228.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 19 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Unit/Set	10 Unit/Set	81.446.168	444.046.168			
2 19 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	10 Unit	10 Unit	68.724.436	68.724.436	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 19 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit/Set	12 Unit/Set	2.658.000	2.658.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 19 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	500 m2	500 m2	10.063.732	372.663.732	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengembangan kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	90 Persen	90 Persen	701.295.000	427.539.400			
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	71 Orang	71 Orang	701.295.000	427.539.400			
2 19 2 2.01	9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Siswa yang di seleksi dan di latih sebagai Pasukan Pengibar Bendera	71 Orang	71 Orang	596.795.000	427.539.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang di gemari masyarakat Kab Luwu	3 cabang olahraga	3 cabang olahraga	7.188.964.893	5.375.762.019			
2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	3.549.968.697	2.493.031.611			
2 19 3 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	"Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan "	11 Paket	11 Paket	3.549.968.697	2.493.031.611	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
								Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	1 Organisasi	1 Organisasi	3.000.000.000	1.500.000.000			
2 19 3 2.04	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi pengembangannya	1 Organisasi	1 Organisasi	3.000.000.000	1.500.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	498.550.196	1.382.730.408			
2 19 3 2.05	3 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang disediakan, dikembangkan, dan dipelihara	9 Paket	9 Paket	350.000.196	1.382.730.408	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100 Persen	100 Persen	257.290.000	100.000.000			
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	257.290.000	100.000.000			
2 19 4 2.01	2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.698.935.952	14.162.890.513			
2 23 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.426.539.622	3.840.835.138			
2 23 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	10.308.750	9.851.550			
2 23 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	6.135.100	6.552.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.815	3.815	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	28.375	28.375	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.815	3.815	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.675	3.675	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.759.400	1.884.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					
2 23 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	3.640.359.584	3.120.630.760			
2 23 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	34 Orang	34 Orang	3.531.401.184	3.022.361.560	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				105.600.000	94.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.786.600	2.034.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		Pagu Indikatif				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
2 23 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	1.571.800	2.034.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	6.000.000	6.161.850			
2 23 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	6.000.000	6.161.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100 %	100 %	30.261.000	30.261.000			
2 23 1 2.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.261.000	30.261.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	223.791.410	183.072.750			
2 23 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	2.993.200	9.952	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	6.645.510	7.318.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	11.430.000	9.930.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	33.900.000	39.660.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	18.158.700	15.251.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan minum yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	10.350.000	3.550.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diselenggarakan	126 kali	126 kali	140.314.000	106.368.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.06		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diselenggarakan	68 Kali	68 Kali					
2 23 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	418.056.103	421.656.103			
2 23 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon air dan listrik	12 bulan	12 bulan	54.009.103	54.009.103	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	430 OB	430 OB	364.047.000	367.647.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	97.762.775	69.201.125			
2 23 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	8 unit	8 unit	57.847.540	51.700.890	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	10 Unit	10 Unit	12.405.000	9.990.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	27.510.235	7.510.235	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat Kegemaran membaca	100 %	100 %	263.568.830	10.314.612.875			
2 23 2 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan tingkat Kabupaten	100 %	100 %	234.401.380	10.307.541.875			
2 23 2 2.01	2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat Kab/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	10.250.738.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01	4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Mengikuti Lomba Perpustakaan Tingkat SD, SMP dan Desa/Kelurahan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	15.143.800	19.949.200	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01	7 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan rujukan yang dikembangkan	100 Layanan	100 Layanan	25.044.500	21.201.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.01	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikembangkan	150 bahan pustaka	150 bahan pustaka	19.043.305	15.652.475	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka pembudayaan gemar membaca	2 Kegiatan	2 Kegiatan	29.167.450	7.071.000			
2 23 2 2.02	4 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah event/media pengembangan literasi	2 kali	2 kali	12.571.000	7.071.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 23 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	100 %	100 %	8.827.500	7.442.500			
2 23 3 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kelestarian Naskah Kuno	100 %	100 %	8.827.500	7.442.500			
2 23 3 2.01	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang melakukan Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 orang	5 orang	8.827.500	7.442.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				107.746.225	45.131.675			
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional	100 %	100 %	107.746.225	45.131.675			
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	58.569.800	39.225.300			
2 24 2 2.01	1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 Orang	100 Orang	9.660.400	10.769.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	24	2.2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah rapat koordinasi/pengawasan yang dilakukan	2 kali	2 kali	48.909.400	28.455.500	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					Jumlah Unit Pengolah arsip yang di monitoring	57 OPD	57 OPD						
2	24	2.2.02	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten	100 %	100 %	17.533.375	5.906.375				
2	24	2.2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	57 Berkas	57 Berkas	17.533.375	5.906.375	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3	25	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	4.410.095.506	4.313.531.708				
3	25	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	9 dokumen	52.000.000	47.951.196				
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	23.023.196	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dekumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.928.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	3.575.702.141	3.624.127.068				
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai kelentuan	46 Orang	46 Orang	3.467.942.141	3.465.047.068	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	1087 OB	1087 OB	107.760.000	159.080.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 persen	100 persen	26.400.000	12.000.000				
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	26.400.000	12.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 OK	2 OK	52.386.000	22.125.000				
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	52.386.000	22.125.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	409.283.150	366.495.317				
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	12 Jenis	12 Jenis	4.519.000	4.519.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Unit	10 Unit	91.500.000	93.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	12.066.000	8.270.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	10.284.000	13.212.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	16.200.000	10.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	80.522.150	69.992.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	300 OK	300 OK	8.400.000	7.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan atau diikuti	400 OK	400 OK	185.792.000	159.202.317	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis	191.650.000	194.050.000				
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air, dan listrik perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	34.450.000	34.450.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	156 OB	156 OB	157.200.000	159.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	41 unit	41 unit	102.674.215	46.783.127				
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan (unit)	17 Unit	17 Unit	95.769.215	39.228.127	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22 unit/set	22 unit/set	6.905.000	7.555.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.180,25 Ton	18.180,25 Ton	973.704.850	3.194.960.000			
3 25 3 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan data dan informasi perikanan tangkap	1 dokumen	1 dokumen	843.372.900	2.808.400.000			
3 25 3 2.01	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap	68 Unit	68 Unit	809.300.000	2.808.400.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3 25 3 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	60 OB	60 OB	32.819.800	386.560.000			
3 25 3 2.03	2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pembinaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	4 TPI	4 TPI	30.000.000	386.560.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	661.589,79 ton	661.589,79 ton	607.105.059	3.339.442.600			
3 25 4 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 rekomendasi	11 rekomendasi	2.914.200	3.550.600			
3 25 4 2.01	1 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.914.200	3.550.600	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar	20 Pokdakan	20 Pokdakan	583.721.059	3.335.892.000			
3 25 4 2.04	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia bagi kelompok pembudidaya ikan	6 Paket	6 Paket	265.546.859	746.804.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3 25 4 2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan/BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan	59 Pokdakan	59 Pokdakan	318.174.200	2.589.088.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3 25 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Lokasi	4 Lokasi	60.000.000	27.000.000			
3 25 6 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan Gemarikan yang dilaksanakan	4 lokasi	4 lokasi	45.000.000	27.000.000			
3 25 6 2.02	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Jenis Produk	4 Jenis Produk	45.000.000	27.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				99.091.000	65.000.000			
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				99.091.000	65.000.000			
3 25 4 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				99.091.000	65.000.000			
3 25 4 2.04	3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI Yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan	4 BBI	4 BBI	99.091.000	65.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERIKANAN
		Jumlah benih yang dihasilkan dalam pembenihan pembudidayaan ikan air tawar	700000 Ekor/Benih	700000 Ekor/Benih					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.559.115.052	4.202.077.503			
3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.058.304.782	3.435.557.489			
3 26 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	51.349.300	24.061.200			
3 26 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	30.130.100	7.341.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.525.600	2.781.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.525.600	3.263.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.525.600	3.494.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.525.600	3.263.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
3 26 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5 dokumen	5 dokumen	11.116.800	3.916.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	1.135.110.537	2.625.078.808			
3 26 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB	2683 OB	818.858.637	2.488.428.008	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 jenis	2 jenis	302.520.000	117.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	6.972.800	13.922.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	1.038.900	6.756	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	5.720.200	4.212.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jenis	1 Jenis	57.045.000	12.575.600			
3 26 1 2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	53 orang	53 orang	8.420.000	12.575.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	1.399.309.820	332.948.091			
3 26 1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	7.085.950	5.602.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 unit	7 unit	88.565.000	55.705.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	3.779.000	3.779.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	20.999.800	6.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	17.280.000	15.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	6 jenis	6 jenis	84.414.970	18.378.740	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jama'ah makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	31.100.000	15.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	336 OK 67 OK	336 OK 67 OK	1.146.085.100	212.042.601	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit/Set	2 Unit/Set	30.350.000	16.575.000			
3 26 1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	8.840.000	16.575.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	343.800.000	305.496.744			
3 26 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	25 OB	25 OB	50.400.000	78.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	89.400.000	52.296.744	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	75 OB	75 OB	204.000.000	175.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	0 Unit/Set	0 Unit/Set	41.340.125	118.822.046			
3 26 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	0 unit	19 unit	-	89.312.488	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	0 unit/set	24 unit/set	-	5.015.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 1 2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	200 m2	200 m2	41.340.125	24.494.558	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan Secara Terpadu	0 Destinasi	1 Destinasi	93.508.800	608.520.014			
3 26 2 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikelola	0 Destinasi	1 Destinasi	-	299.999.107			
3 26 2 2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	0 Destinasi	1 Destinasi	-	299.999.107	Kab. Luwu, Bua, Pabbasseng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 2 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikelola	4 Destinasi	4 Destinasi	93.508.800	308.520.907			
3 26 2 2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dilakukan pengadaan sarana dan prasarana dan pemeliharaan destinasi pariwisata kabupaten yang diadakan	4 destinasi	4 destinasi	66.808.800	308.520.907	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga Kab. Luwu, Basse Sangtempe, To'long Kab. Luwu, Larompong, Buntu Matabing	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3 26 3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten	13,216 Orang	13,216 Orang	190.960.970	158.000.000			
3 26 3 2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran/Promosi Kepariwisataaan	2 kali	2 kali	190.960.970	158.000.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang dilakukan	3 kali	3 kali	3.280.000	8.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3	26	3	2.01	2	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dalam rangka pemasaran destinasi wisata yang diikuti	1 kali	1 kali	187.680.970	150.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				29.178.565.802	29.848.949.582			
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	17.175.141.539	15.893.200.572			
3	27	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	26.288.600	3.807.900			
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	15.819.000	790	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.665.000	595	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.949.200	595	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.065.000	6.652	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.065.000	6.652	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 dokumen	1 dokumen	2.725.400	4.975	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Jenis	4 Jenis	16.315.931.229	15.218.257.386			
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan	16.113.730.829	15.019.076.586	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	204 OB	204 OB	194.880.000	194.280.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 dokumen	14 dokumen	7.320.400	4.900.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara tepat waktu	100 persen	100 persen	74.511.000	30.000.000			
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 orang	1 orang	74.511.000	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	364.711.210	293.756.600			
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	1 jenis	2.000.000	500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	8.050.000	8.050.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 jenis	15 jenis	19.800.000	19.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	33.902.960	33.507.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	7 jenis	7 jenis	17.453.250	13.419.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	270 kali	270 kali	248.305.000	213.561.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 persen	100 persen	4.200.000	4.918.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	255.354.800	248.018.400			
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	75.354.800	68.018.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	420 OB	420 OB	171.600.000	180.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi baik	65 persen	65 persen	138.344.700	99.360.286			
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	109 unit	109 unit	117.164.700	99.360.286	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 persen	3 persen	2.562.600.000	3.517.500.000			
						Persentase peningkatan produksi bibit ternak	10 persen	10 persen					
						Persentase peningkatan produksi peternakan	10 persen	10 persen					
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian dalam kondisi baik	91 persen	91 persen	2.340.000.000	3.317.500.000			
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan dan diawasi penggunaannya	68 unit	68 unit	2.340.000.000	3.317.500.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Insentif Daerah	DINAS PERTANIAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
3	27	2	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah jenis bibit ternak yang disediakan	2 jenis	2 jenis	92.500.000	200.000.000			
3	27	2	2.06	1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang diadakan	5010 ekor	5010 ekor	92.500.000	200.000.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Bulolondong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	3 persen	3 persen	6.160.528.328	7.218.725.340			
					Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	3 persen	3 persen					
					Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	3 persen	3 persen					
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3 persen	3 persen					
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pengembangan prasarana pertanian	2 jenis	2 jenis	89.562.700	151.103.340			
3	27	3	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Sarana Pendukung pertanian lainnya yang di koordinasikan	2 keg	2 keg	58.400.000	151.103.340	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
											DBH CHT	
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	31 unit	31 unit	5.703.907.553	7.067.622.000			
3	27	3	2.02	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	16 unit	16 unit	2.028.250.000	2.607.668.700	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
											DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	
3	27	3	2.02	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun	3 unit	3 unit	384.000.000	528.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Sinjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
										Kab. Luwu, Larompong, Ranlebelu		
										Kab. Luwu, Walenrang Utara, Salutubu		
3	27	3	2.02	3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun	13 unit	13 unit	1.653.500.000	1.590.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
											DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	
3	27	3	2.02	6 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	2 unit	2 unit	37.750.000	129.250.000	Kab. Luwu, Larompong, Komba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	3	2.02	8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan sarana pendukungnya yang di rehab	3 unit	3 unit	670.957.553	1.796.453.300	Kab. Luwu, Walenrang, Barammase	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Kab. Luwu, Larompong Selatan, Dadeko		
										Kab. Luwu, Latimojong, Kadundung		
3	27	3	2.02	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun	2 unit	2 unit	802.450.000	416.250.000	Kab. Luwu, Kamanre, Salu Paremang Selatan	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	DINAS PERTANIAN
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan Populasi Ternak	3 Persen	3 Persen	102.818.235	73.396.470			
					Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 persen	10 persen					
3	27	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyelenggaraan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten	12 Laporan	12 Laporan	102.818.235	23.396.470			
3	27	4	2.01	1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit	12 laporan	12 laporan	102.818.235	23.396.470	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten	0 Jenis	2 Jenis	-	50.000.000			
3	27	4	2.03	2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah permohonan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilayani	0 pemohon	50 pemohon	-	50.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	DINAS PERTANIAN
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang didampingi penyuluh pertanian	100 persen	100 persen	3.177.477.700	3.146.127.200			
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	100 persen	100 persen					
					Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	227 desa/ke	227 desa/ke	3.177.477.700	3.146.127.200			
3 27 7 2.01	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	0 BPP	22 BPP	-	156.200.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	DINAS PERTANIAN
3 27 7 2.01	2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dikembangkan	125 kp tani	125 kp tani	1.899.070.900	1.927.170.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3 27 7 2.01	3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan pertanian yang menerima dan difasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	22 BPP	22 BPP	1.278.406.800	1.062.756.800	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	peningkatan produksi komoditi hortikultura	3 persen	3 persen	142.918.950	169.809.750			
		Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan	3 persen	3 persen					
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten	19 ha	19 ha	142.918.950	169.809.750			
3 27 2 2.02	3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan Pemanfaatan SDG Hewan / Tumbuhan	15 ha	15 ha	142.918.950	169.809.750	Kab. Luwu, Walenrang, Barammase	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERTANIAN
							Kab. Luwu, Ponrang, Tirowali		
							Kab. Luwu, Walenrang Utara, Bolong		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.156.294.388	4.750.125.571			
3 30 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				49.408.700	16.530.000			
3 30 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra & Renja serta perubahan Renstra & Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	21.099.800	6.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.291.900	1.120.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.237.000	1.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.666.000	1.120.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA_SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.956.200	1.120.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.390.800	490	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun (LAKIP)	5 Dokumen	5 Dokumen	16.767.000	4.480.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.278.233.788	4.067.715.298			
3 30 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	396 OB	396 OB	4.128.244.288	4.063.901.878	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.600.500	1.660.720	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelolah dan Disiapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.004.500	9.769	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	5.004.500	1.175.800	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				390.062.400	235.625.560			
3 30 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 persen	100 persen	24.336.000	585	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	9 Unit	9 Unit	26.955.000	22.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	3.375.700	2.834.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	22.181.500	2.499.210	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	10.296.000	1.450.350	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	29.400.000	18.900.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/ bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	44 Jenis	44 Jenis	36.438.200	17.789.900	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Jamuan makan dan minum yang disediakan	44 Jenis	44 Jenis	16.200.000	2.675.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2500 Surat	2500 Surat	220.880.000	166.392.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
3 30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				289.080.000	387.355.584			
3 30 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	5 Dokumen	5 Dokumen	64.080.000	27.535.584	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan kantor	6 Dokumen	6 Dokumen	225.000.000	359.820.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.031.000	42.899.129			
3 30 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	10 Unit	77.500.000	42.899.129	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				548.025.261	2.468.248.120			
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				484.129.511	2.468.248.120			
3 30 3 2.01	1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang disediakan/direhabilitasi	5 Pasar	5 Pasar	-	2.097.388.160	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 3 2.01	2 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Database dan Pengelolaan Pedagang Pasar	1 Unit	1 Unit	484.129.511	370.859.960	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
		Jumlah sarana distribusi perdagangan (pasar) yang difasilitasi	16 pasar	16 pasar					
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				153.356.890	100.623.820			
3 30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				52.614.000	2.670.000			
3 30 4 2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	12 Kali	12 Kali	5.160.000	1.320.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 Bln	12 Bln	23.727.000	500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.01	3 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan pelaksanaan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 Bln	12 Bln	23.727.000	850	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				76.637.890	95.011.320			
3 30 4 2.02	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	12 Kali	12 Kali	40.887.000	30.566.570	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.02	2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	18.605.890	6.073.250	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.02	3 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Lokasi pasar murah	1 OK	1 OK	17.145.000	58.371.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				24.105.000	2.942.500			
3 30 4 2.03	1 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaksanaan pengawasan	1 OK	1 OK	-	850	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.03	2 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	3 Kali	3 Kali	6.621.000	1.242.500	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 4 2.03	3 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan	3 Kali	3 Kali	17.484.000	850	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				128.150.000	19.658.000			
3 30 5 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				128.150.000	19.658.000			
3 30 5 2.01	3 Pameran Dagang Lokal	pameran produk dan potensi daerah dalam provinsi	2 kali	2 kali	55.575.000	19.658.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				113.217.850	85.165.940			
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				113.217.850	85.165.940			
3 30 6 2.01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang	12 Kali	12 Kali	38.604.380	45.660.850	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 6 2.01	2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan	12 Kali	12 Kali	32.346.570	26.509.090	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
3 30 6 2.01	3 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan penyidikan	52 Kali	52 Kali	42.266.900	12.996.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	DINAS PERDAGANGAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				39.438.223.811	32.139.019.979			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana											
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan														
4	1	1																		
4	1	1	2.01																	
4	1	1	2.01	1																
4	1	1	2.01	2																
4	1	1	2.01	3																
4	1	1	2.01	4																
4	1	1	2.01	5																
4	1	1	2.01	6																
4	1	1	2.01	7																
4	1	1	2.02																	
4	1	1	2.02	1																
4	1	1	2.02	3																
4	1	1	2.02	4																
4	1	1	2.02	5																
4	1	1	2.02	6																
4	1	1	2.02	7																
4	1	1	2.02	8																
4	1	1	2.03																	
4	1	1	2.03	4																
4	1	1	2.03	5																
4	1	1	2.03	6																
4	1	1	2.05																	
4	1	1	2.05	2																
4	1	1	2.06																	
4	1	1	2.06	1																
4	1	1	2.06	2																
4	1	1	2.06	3																
4	1	1	2.06	4																
4	1	1	2.06	5																
4	1	1	2.06	6																
4	1	1	2.06	8																
4	1	1	2.06	9																
4	1	1	2.06	10																
4	1	1	2.07																	
4	1	1	2.07	5																
4	1	1	2.07	10																
4	1	1	2.07	11																
4	1	1	2.08																	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surt Masuk dan Keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	285.600.000	206.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	1.460.760.000	1.464.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 OB	21 OB	851.715.600	753.591.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	24 OB	24 OB	5.833.119.650	5.349.000.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	1.101.890.035	1.111.335.012			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	5 unit	5 unit	176.496.200	197.719.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	486 unit	486 unit	393.155.740	493.025.270	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas Bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3000 Meter	3000 Meter	486.181.067	396.255.502	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	19.506.029	24.335.040	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	1.290.946.544	1.523.083.244			
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	430.646.544	702.933.244	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	57 Set	57 Set	190.300.000	150.150.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedia Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 orang	220.000.000	220.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional yang dibutuhkan	1 tahun	1 tahun	450.000.000	450.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Penunjang Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	2.659.251.268	2.737.249.190			
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.354.540.600	1.372.540.586	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.020.040.176	1.020.038.241	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	12 Bulan	12 Bulan	284.670.492	344.670.363	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Cakupan penyelenggaraan Penataan Organisasi	100 %	100 %	780.108.270	411.036.020			
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	257.679.850	92.384.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga		SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik dan tata laksana	57 PD	57 PD	262.250.650	125.128.010	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	73.446.030	69.407.430	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Evaluasi Pengendalian kualitas pelayanan Publik dan tata laksana yang dimonitoring	1 Laporan	1 Laporan	26.857.140	17.417.730	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	159.874.600	106.697.950	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Penyelenggaraan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	445.644.750	520.614.250			
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang difasilitasi	24 kegiatan	24 kegiatan	254.835.000	131.835.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog/audiensi/koordinasi pimpinan yang difasilitasi	12 kali	12 kali	161.128.500	347.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	36 kali	36 kali	29.681.250	40.939.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	2885 Nilai	2885 Nilai	6.380.663.803	5.194.657.250			
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi tata Pemerintahan	100 %	100 %	2.237.305.526	432.870.000			
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	186.450.450	151.058.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	1.989.356.806	154.053.060	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	61.498.270	127.758.490	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	2.799.196.157	3.441.496.750			
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan dalam rangka fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.711.454.457	473.930.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	43.714.800	1.638.969.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	44.026.900	1.328.596.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	100 %	100 %	1.303.667.120	862.038.320			
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan produk hukum daerah yang difasilitasi	315 Produk hukum	315 Produk hukum	560.102.250	428.146.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum	20 Kali	20 Kali	307.502.300	236.275.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	sistem informasi hukum yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem	436.062.570	197.616.170	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %	100 %	40.495.000	458.252.180			
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	jumlah kerja sama dalam negeri yang difasilitasi	2 MoU	2 MoU	23.039.900	428.237.890	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
												Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kerja sama	5 Laporan	5 Laporan	17.455.100	30.014.290	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga Keuangan	80 Jumlah	80 Jumlah	1.773.036.790	1.041.601.366			
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %	100 %	956.472.360	537.067.536			
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	548.787.700	229.252.926	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
												DBH CHT	
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	1 Laporan	149.902.550	124.464.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD dan BLUD	1 Laporan	1 Laporan	22.754.430	22.754.430	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Laporan	1 Laporan	235.027.680	160.595.580	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	100 %	100 %	90.988.200	77.509.250			
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	90.988.200	77.509.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Penyelenggaraan Pengadaan barang dan Jasa	100 %	100 %	635.778.230	379.237.730			
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	269.920.810	139.160.810	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Dokumen Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	163.488.500	146.690.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	202.368.920	93.386.920	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan penyelenggaraan pemantauan kebijakan terkait Sumber daya Alam	100 %	100 %	89.798.000	47.786.850			
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	4 Dokumen	89.798.000	47.786.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	2				SEKRETARIAT DPRD				32.722.296.089	32.467.765.419			
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	22.240.856.589	21.837.877.919			
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	78.124.400	100.984.400			
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	30.329.600	30.329.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.715.000	11.430.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.715.000	11.430.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.715.000	11.430.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.715.000	11.430.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.934.800	24.934.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	3.823.325.584	3.721.878.769			
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	3.437.748.384	3.337.741.569	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	343.110.000	341.670.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	12.329.600	12.329.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	11.817.400	11.817.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	18.320.200	18.320.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000	8.400.000			
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	284.163.000	356.286.000			
4	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	1 Unit	7.625.000	7.625.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	43 Stell/Pasang	43 Stell/Pasang	30.360.000	30.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
4	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen data dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	16.900.000	12.080.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	25 Orang	25 Orang	229.278.000	306.221.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pemenuhan administrasi perkatoran perangkat daerah	8 Laporan	8 Laporan	889.554.000	901.110.850			
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10.685.000	10.685.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	12.328.000	12.328.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	39.582.000	39.099.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	50.191.800	50.190.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	236.250.000	261.900.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	47 Jenis	47 Jenis	133.183.700	133.192.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	91.800.000	91.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	32 Kali	32 Kali	315.533.500	301.916.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
						jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 Kali	6 Kali					
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen pengadaan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	792.963.000	368.631.000			
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 Jenis	8 Jenis	708.491.000	195.725.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis					
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	84.472.000	172.906.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis					
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan	4 Laporan	914.974.500	927.007.250			
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	8000 Surat	8000 Surat	15.225.000	27.257.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	321.349.500	321.349.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	24.000.000	24.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	528 Orang/Bulan	528 Orang/Bulan	554.400.000	554.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipenuhi jasa pemeliharaannya	5 Jenis	5 Jenis	598.099.455	598.190.072			
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	129.898.095	130.033.095	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	32 Unit	32 Unit	218.714.260	218.967.205	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	177 Unit/Set	177 Unit/Set	49.700.000	46.460.380	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15000 M2	15000 M2	183.056.100	182.386.382	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	7 Unit/Set	7 Unit/Set	16.731.000	20.343.010	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terpenuhi layanan keuangan dan kesejahteraannya	35 Orang	35 Orang	13.807.262.250	13.811.327.178			
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dokumen Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.423.262.250	13.427.327.178	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	182 Stel/Pasang	182 Stel/Pasang	384.000.000	384.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Dokumen layanan administrasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.043.990.400	1.044.062.400			
4	2	1	2.16	2	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi	10 Fraksi	10 Fraksi	120.000.000	120.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan/kali pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	36 Bulan	36 Bulan	923.990.400	924.062.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	10.481.439.500	10.629.887.500			
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan daerah dan peraturan DPRD yang di sahkan	4 Peraturan	4 Peraturan	3.073.299.500	2.995.313.000			
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah yang disusun dan dibahas	1 Dokumen	1 Dokumen	131.137.500	8.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan Peraturan daerah yang dibahas	4 Ranperda	4 Ranperda	2.786.162.000	2.811.313.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	51.000.000	36.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
4	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	4 Naskah	4 Naskah	105.000.000	140.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	634.916.750	623.538.000			
4	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS	8 Kali	8 Kali	28.785.000	28.785.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	8 Kali	8 Kali	28.785.000	28.785.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD	8 Kali	8 Kali	206.340.250	202.796.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan	8 Kali	8 Kali	206.340.250	202.796.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6 Kali	6 Kali	164.666.250	160.376.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	191.097.500	204.631.500			
4	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran	90 Kali	90 Kali	54.000.000	54.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat dalam rangka Laporan Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6 Kali	6 Kali	137.097.500	150.631.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah pendalaman materi peraturan perundang-undangan yang diikuti dalam rangka peningkatan kasitas Anggota DPRD	8 Peraturan	8 Peraturan	1.902.264.800	2.004.009.550			
4	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD/kali mengikuti bimbingan teknis	141 Orang/Kali	141 Orang/Kali	1.420.221.500	1.515.105.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	121.639.550	121.639.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pakar dan tim ahli yang disediakan	4 Orang	4 Orang	100.000.000	100.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang/bulan penyediaan tenaga ahli fraksi	120 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	180.000.000	180.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pertemuan dengan masyarakat	4 Kali	4 Kali	60.803.750	67.664.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah rapat dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD	12 Kali	12 Kali	19.600.000	19.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah rekomendasi dari aspirasi masyarakat yang dihimpun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	1.649.842.950	1.664.968.450			
4	2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja	420 Orang/Kali	420 Orang/Kali	185.981.250	204.867.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	34.383.200	34.383.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan Reses	105 Orang/Kali	105 Orang/Kali	1.429.478.500	1.425.717.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	SEKRETARIAT DPRD
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi	35 Kegiatan	35 Kegiatan	3.030.018.000	3.137.427.000			
4	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	3.017.218.000	3.127.827.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000	9.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SEKRETARIAT DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1			PERENCANAAN				6.465.257.319	7.167.385.427			
5	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	5.227.997.589	5.754.991.827			
5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	33.188.400	29.967.250			
5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	7.348.600	5.548.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4.056.400	1.072.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4.025.200	5.655.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4.727.200	4.727.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.663.000	3.595.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	9.368.000	9.368.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	3.044.406.181	3.027.531.955			
5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	876 OB	876 OB	3.013.660.431	3.003.769.105	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	8.442.250	6.057.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	4 laporan	4 laporan	14.712.900	17.705.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	164.811.750	97.210.250				
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50 Paket	-	25.125.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 Orang	2 Orang	164.811.750	72.085.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	1.006.404.110	1.108.519.560				
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	53.612.600	32.050.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	17 unit	17 unit	26.875.200	12.104.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	52.975.300	52.975.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	31.577.000	31.577.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	99.540.000	99.540.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	66.368.150	66.368.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	24.165.000	24.165.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar daerah	167 OK	167 OK	515.879.500	653.674.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 aplikasi	1 aplikasi	135.411.360	136.065.360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	20 Unit	20 Unit	129.567.450	138.585.000				
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	-	27.670.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	118.907.450	110.915.000	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	507.029.396	638.924.396				
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 OB	12 OB	17.585.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	203.724.396	200.224.396	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	324 OB	324 OB	285.720.000	430.300.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 Unit/Set	10 Unit/Set	342.590.302	714.253.416				
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	10 unit	10 unit	181.792.860	288.074.601	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	35 unit/set	35 unit/set	26.684.012	35.450.012	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	348.62 m2	348.62 m2	98.794.179	384.282.032	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 unit	25 unit	35.319.251	6.446.771	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	100 Persen	625.640.260	770.990.980				
5	1	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah	7 tahapan	7 tahapan	336.211.860	372.312.380				
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditelaah dan diintegrasikan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	146.757.000	212.967.680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah Konsultasi Publik yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	15.570.000	14.170.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	26.950.000	22.650.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikordinasikan dalam pelaksanaan musrenbang	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22.406.960	22.405.400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang dikordinasikan	2 dokumen	2 dokumen	99.634.900	95.319.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi pemerintahan daerah	3 dokumen	3 dokumen	189.494.000	154.007.200			
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kali	2 kali	73.026.000	73.007.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	57 skpd	57 skpd	116.468.000	81.000.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah	1 dokumen	1 dokumen	99.934.400	244.671.400			
5	1	2	2.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	kerjasama daerah yang dilaksanakan		1 kerjasama	-	155.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	99.934.400	89.671.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	80 Persen	80 Persen	611.619.470	641.402.620			
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan koordinasi perencanaan	43 perangkat daerah	43 perangkat daerah	283.988.670	298.996.270			
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	15.276.400	15.276.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	29 perangkat daerah	29 perangkat daerah	33.441.570	32.886.570	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah bidang Pemerintahan yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	58.620.400	63.494.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 perangkat daerah	14 perangkat daerah	16.076.400	16.076.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	70.924.100	68.109.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	89.649.800	103.152.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	100.105.900	100.651.400			
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	39.470.100	55.908.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	12.304.500	6.740.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang SDA yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	39.956.650	33.916.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah Bidang SDA yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	8.374.650	4.086.850	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dilakukan koordinasi perencanaan	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	227.524.900	241.754.950			
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	82.072.150	90.149.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	11.145.000	6.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	63.486.000	66.432.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	31.227.050	29.787.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 perangkat	3 perangkat	9.000.000	3.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				30.594.700	44.986.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				810.926.080	739.765.800			
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Rekomendasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	810.926.080	739.765.800			
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Penelitian	3 Penelitian	655.361.040	618.480.900			
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi	1 Penelitian	1 Penelitian	300.000.000	250.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	5	2	2.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	1 Penelitian	1 Penelitian	175.000.000	150.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	12 bulan	12 bulan	180.361.040	218.480.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Penelitian	5 Penelitian	155.565.040	121.284.900			
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Inovasi	9 Inovasi	9 Inovasi	155.565.040	121.284.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				279.988.885.803	259.491.117.011			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	8.485.663.003	8.770.247.692			
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	95 Persen	95 Persen	123.433.400	84.910.000			
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.705.400	6.470.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.082.400	9.142.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.115.000	4.945.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.835.400	21.030.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.249.000	2.875.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	52 Dokumen	52 Dokumen	1.250.800	1.250.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	62.195.400	39.195.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	6.544.086.003	6.362.391.882			
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	53 ASN	53 ASN	6.422.244.603	6.230.029.482	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang ditatausahakan dan diverifikasi	2500 Dokumen	2500 Dokumen	99.255.000	120.817.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	7.650.200	5.435.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	7.650.200	6.110.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan BMD SKPD yang Tertib	90 Persen	90 Persen	10.205.400	27.595.400			
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10.205.400	27.595.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja Baik	91 Persen	91 Persen	157.356.000	149.952.000			
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	49 Buah	29 Buah	66.000.000	20.776.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 ASN	2 ASN	44.250.000	44.250.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10 ASN	10 ASN	47.106.000	84.926.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	639.962.850	985.059.400			
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	7.657.700	7.657.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	30.236.500	29.053.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	32.881.200	27.541.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	45 Jenis	45 Jenis	146.750.000	133.840.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	33 Jenis	33 Jenis	46.891.500	23.629.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	2	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	30 Orang	30 Orang	31.882.500	66.937.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60 Kali	60 Kali	343.663.450	696.400.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	92 Persen	92 Persen	449.312.200	522.086.200			
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit	30.767.000	30.767.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17 Jenis	17 Jenis	418.545.200	491.319.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	329.016.400	281.017.360			
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat yang terdistribusi	1250 surat	1250 surat	40.800.000	19.212.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	222.216.400	195.805.360	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah luas gedung yang dibersihkan	450 M2	450 M2	66.000.000	66.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	92 Persen	92 Persen	232.290.750	357.235.450			
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan pemeliharaan/rehab dan terbayar pajaknya	25 Unit	25 Unit	127.306.750	255.376.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	35 Unit	35 Unit	14.984.000	11.859.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan	450 M2	450 M2	90.000.000	90.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyerapan APBD	97 Persen	97 Persen	270.664.834.550	249.822.186.369			
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perentase SKPD yang Menyusun RKA Sesuai Ketentuan dan Kebutuhan	99 Persen	99 Persen	1.373.841.300	1.507.719.150			
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	25.166.450	26.858.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	24.166.450	23.058.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan RKA	57 PD	57 PD	24.887.150	20.007.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan RKA Perubahan	57 PD	57 PD	12.772.000	12.142.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan DPA	57 PD	57 PD	9.446.000	9.446.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan Perubahan DPA	57 PD	57 PD	9.342.000	9.342.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	523.855.750	590.417.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	500.304.050	419.752.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen ASB yang disusun	50 ASN	50 ASN	47.494.950	59.478.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	14 PD	14 PD	61.534.650	88.283.150	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja	57 PD	57 PD	134.871.850	144.463.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah		114 Peserta	-	104.471.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu	95 Persen	95 Persen	381.080.650	449.258.250			
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi pengelolaan kas	57 PD	57 PD	65.420.800	82.357.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	1150 Dokumen	1150 Dokumen	46.673.600	45.995.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah bidang yang melaksanakan koordinasi dana perimbangan dan dana transfer	15 Bidang	15 Bidang	80.763.300	83.614.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran laporan aliran kas yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	110.638.200	153.058.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D	57 PD	57 PD	77.584.750	84.231.750	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	98 %	98 %	628.913.600	658.424.150				
5	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	57 PD	57 PD	32.672.450	53.662.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	57 PD	57 PD	60.528.900	32.599.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	54.290.550	62.248.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	5 Laporan	5 Laporan	115.644.650	122.014.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Perbup tentang pertanggungjawaban APBD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	67.655.250	65.020.350	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	7.362.300	6.612.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Tertuntut yang melaksanakan koordinasi penyelesaian perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	50 Tertuntut	50 Tertuntut	78.911.850	96.125.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi yang disusun Jumlah Dokumen Sistem Akuntansi Pemerintahan yang disusun	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	103.779.500 103.779.500	84.093.950 84.093.950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	29.593.050	65.879.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 50% perempuan dan 50% laki-laki	114 Peserta	114 Peserta	73.403.800	70.167.850	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Capaian Target Penyaluran Bantuan Keuangan	100 Persen	100 Persen	267.948.504.000	246.875.489.819			
5	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima Dana Alokasi Desa	207 Desa	207 Desa	261.505.450.000	237.727.914.997	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah peristiwa darurat bencana yang tertangani	10 Peristiwa	10 Peristiwa	3.000.000.000	5.000.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terselenggaranya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa	207 Desa	207 Desa	3.443.054.000	4.147.574.822	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang mengimplementasikan Sistem Informasi secara terbib	96 Persen	96 Persen	332.495.000	331.295.000			
5	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi keuangan daerah	57 PD	57 PD	332.495.000	331.295.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD dalam penatausahaan BMD secara akurat	98 Persen	98 Persen	838.388.250	898.682.950			
5	2	3.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	94 Persen	94 Persen	838.388.250	898.682.950			
5	2	3.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	87.193.900	156.438.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26.008.650	36.680.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan penatausahaan barang milik daerah	57 PD	57 PD	110.634.800	40.354.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan inventarisasi barang milik daerah	57 PD	57 PD	125.392.950	172.289.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diamankan	60 Unit	60 Unit	75.930.750	56.766.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	60 Unit	60 Unit	113.358.500	164.470.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dioptimalkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan	360 Unit	360 Unit	93.346.300	142.309.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan rekonsiliasi BMD dan Update SIMDA Barang	57 PD	57 PD	66.208.550	77.202.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	37.216.000	52.170.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2			KEUANGAN				12.996.378.331	13.697.991.635			
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	10.060.198.447	10.381.790.556			
5	2	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	122.204.400	74.351.400			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2022		Pagu Indikatif							
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	2	1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	19.860.400	26.366.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	2.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	68.306.000	44.185.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	5.907.023.631	6.515.827.235			
5	2	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	2683 OB	2683 OB	5.592.294.431	6.283.241.035	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	12 Bulan	264.440.000	216.920.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	29.837.000	8.016.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	20.452.200	7.650.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	15.887.600	12.000.000			
5	2	1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	7 Laporan	7 Laporan	15.887.600	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	132.385.400	64.222.000			
5	2	1.2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan/jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	0 kali/jenis	1 kali/jenis	-	3.360.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.04	4	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang dilakukan pendaftaran dan pendaftaran	0 Objek Retribusi	1 Objek Retribusi	-	8.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen pengolahan data retribusi daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	-	32.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Laporan	1 Laporan	67.936.700	18.362.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	350.297.050	33.804.000			
5	2	1.2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	84.814.850	22.125.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	100 Orang	100 Orang	59.562.200	11.679.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	558.786.400	468.666.190			
5	2	1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	10.001.700	9.236.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	2 Unit	150.295.000	20.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	25.324.250	30.061.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	53.400.000	53.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 OB	12 OB	24.244.450	69.754.240	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	30 Kali	30 Kali	10.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	162 OK	162 OK	285.521.000	281.214.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	2.842.612.166	2.848.562.166			
5	2	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	12 OB	12 OB	20.300.000	16.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.625.512.166	2.628.762.166	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 OB	21 OB	-	8.520.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	324 OB	324 OB	196.800.000	194.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 Unit/Set	10 Unit/Set	131.001.800	364.357.565			
5	2	1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	20 Unit	20 Unit	111.001.800	75.001.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	702 M2	702 M2	20.000.000	40.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	249.355.765	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	86.98 Persen	86.98 Persen	2.936.179.884	3.316.201.079			
						Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Di Tetapkan	100 %	100 %					
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	2.936.179.884	3.316.201.079			
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	0 %	100 %	-	218.376.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	0 %	100 %					
						Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Terhadap Target yang ditetapkan	0 %	100 %					
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	175.18 Wajib Pajak	175.18 Wajib Pajak	23.472.600	44.850.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	7 Jenis Pajak	7 Jenis Pajak	147.308.170	94.420.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah yang dipelihara dan dimutakhirkan	2 Basis Data	2 Basis Data	465.610.050	120.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	175.18 Wajib Pajak	175.18 Wajib Pajak	835.099.660	1.373.353.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	168.000.000	168.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %					
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilayani	175180 Wajib Pajak	175180 Wajib Pajak	229.209.230	73.872.650	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	44.610.000	9.750.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %					
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah	100 %	100 %	319.401.090	447.781.745	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase realisasi pajak daerah terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan dana perimbangan terhadap target yang ditetapkan	100 %	100 %					
						Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	100 %	100 %					
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	703.469.084	765.795.984	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				88.598.330	88.598.080			
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	86.98 Persen	86.98 Persen	88.598.330	88.598.080			
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	88.598.330	88.598.080			
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100 %	100 %	88.598.330	88.598.080	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				131.878.730	131.878.520			
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap target yang ditetapkan	86,9 persen	86,9 persen	131.878.730	131.878.520			
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	131.878.730	131.878.520			
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	100 %	100 %	131.878.730	131.878.520	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun					
						Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				88.600.000	88.599.830			
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	86.98 Persen	86.98 Persen	88.600.000	88.599.830			
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	terwujudnya Realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	88.600.000	88.599.830			
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	100 %	100 %	88.600.000	88.599.830	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	2				KEUANGAN				111.190.180	111.190.050			
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	86.98 Persen	86.98 Persen	111.190.180	111.190.050			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
5	2	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	terwujudnya Realisasi pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	100 %	111.190.180	111.190.050				
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan	100 %	100 %	111.190.180	111.190.050	Kab. Luwu, Belopa, Senga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun						
					Terwujudnya Realisasi Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	100 %						
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	3			KEPEGAWAIAN									
5	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	42.735.829.515	16.429.996.271				
5	3	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen renstra, renja, RKA, dan DPA serta renja perubahan, RKA, dan DPA yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	74.756.600	78.277.100				
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	15.118.000	15.742.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	12.333.300	14.005.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.067.800	14.291.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.424.600	12.424.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.558.000	9.558.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	12.254.900	12.254.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah PNS dan PPPK yang dibayarkan gaji dan tunjangan	258 orang	258 orang	41.014.485.616	14.817.439.072	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan penatausahaan keuangan	12 bulan	12 bulan	305.820.000	284.220.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.940.000	11.940.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang di susun	6 dokumen	6 dokumen	12.145.400	12.145.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah bulan penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek	6 orang	6 orang	65.000.000	65.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	7.953.400	5.453.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan kantor yang diadakan	6 unit	6 unit	54.000.000	37.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	14.990.000	14.991.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	219.200.000	174.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material yang disediakan	25 jenis	25 jenis	25.086.700	25.206.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah jenis fasilitas kunjungan tamu	3 jenis	3 jenis	22.000.000	22.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan biasa dan dalam kota	200 kali	200 kali	303.104.000	276.776.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					jumlah pengadaan barang milik daerah	2 unit	2 unit	80.008.800	80.008.800				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
5 3 1 2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 unit	2 unit	80.008.800	80.008.800	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	85 %	85 %	464.400.000	464.400.000			
5 3 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100.800.000	100.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	333.600.000	333.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang di pelihara	60 unit	60 unit	52.538.999	52.538.999			
5 3 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	25 unit	25 unit	35.940.000	35.940.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	30 unit	30 unit	16.598.999	16.598.999	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian, dan informasi ASN	100 Persen	100 Persen	3.080.806.110	2.893.662.310			
			persentase pemenuhan kebutuhan PNS sesuai Formasi	100 %	100 %					
5 3 2 2.01	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	100 %	1.190.783.700	1.058.466.200			
5 3 2 2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	jumlah dokumen penyusunan kebutuhan	3 Dokumen	3 Dokumen	108.097.000	60.032.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	jumlah CPNS dan PPPK yang diterima	150 orang	150 orang	862.586.500	797.651.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah ASN yang di selesaikan pemberhentiannya	80 orang	80 orang	59.943.000	48.716.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah ASN yang difasilitasi	50 orang	50 orang	49.090.700	49.070.300	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah sistem informasi yang di kelola	1 sistem informasi	1 sistem informasi	56.099.600	49.038.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data ASN yang di kelola	6113 data	6113 data	54.966.900	53.956.900	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.02		Mutasi dan Promosi ASN	persentase mutasi ASN	100 persen	100 persen	486.593.560	483.353.560			
5 3 2 2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah mutasi dalam satu tahun	100 Dokumen	100 Dokumen	92.253.560	89.013.560	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah dokumen kenaikan pangkat	120 Dokumen	120 Dokumen	394.340.000	394.340.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	85 %	85 %	1.175.115.150	1.185.359.750			
5 3 2 2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah dokumen penilaian kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	291.438.600	256.510.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	jumlah ASN yang mengikuti assesment	22 Orang	22 Orang	427.962.250	263.697.150	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	jumlah PNS yang mengikuti diklat dan sertifikasi	11 orang	11 orang	140.261.000	376.037.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03	8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah dokumen kebutuhan	1 dokumen	1 dokumen	81.071.370	81.071.370	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				153.393.230	133.222.930		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen pembinaan karir	1 Dokumen	1 Dokumen	80.988.700	74.820.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	85 %	85 %	228.313.700	166.482.800			
5 3 2 2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	jumlah PNS yang diberikan penghargaan	20 orang	20 orang	98.086.100	102.019.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 3 2 2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	jumlah ASN yang fasilitasi	20 orang	20 orang	78.468.700	64.463.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.005.625.870	1.195.478.000			
5 4 2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.005.625.870	1.195.478.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
5	4	2	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								
5	4	2	2.01	3) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti bimtek	120 orang	50 orang	312.140.570	300.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %	100 %	3.693.485.300	895.478.000			
5	4	2	2.02	7) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi	225 orang	225 orang	3.538.860.000	895.478.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1			INSPEKTORAT DAERAH				11.553.514.548	9.475.136.013			
6	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	7.351.010.908	5.858.648.323			
6	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	135.854.530	87.173.650			
6	1	1	2.01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	77.349.500	42.319.350	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.533.850	10.568.150	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.121.170	8.994.450	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.175.870	9.186.350	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.333.970	7.952.800	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.01	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP) dan evaluasi RENJA Triwulan	5 Dokumen	5 Dokumen	10.340.170	8.152.550	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	5.103.748.085	4.675.036.811			
6	1	1	2.02	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	44 Orang	44 Orang	4.858.084.225	4.473.361.211	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	221.910.000	181.940.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.815.210	9.817.800	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.02	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	11.938.650	9.917.800	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	12.626.600	12.000.000			
6	1	1	2.03	6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.626.600	12.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	535.243.500	220.740.000			
6	1	1	2.05	9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	43 Orang	43 Orang	535.243.500	220.740.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	635.897.950	300.873.350			
6	1	1	2.06	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 jenis	9 jenis	10.956.100	7.310.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 unit	41 unit	201.393.100	7.216.500	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	20 jenis	20 jenis	24.893.100	11.421.650	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1	2.06	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	9 j	9 j	27.323.050	10.933.950	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
6	1	1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	3 Jenis	3 Jenis	14.290.000	10.510.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	500 exemplar	500 exemplar	50.000.000	47.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	35 jenis	35 jenis	50.550.100	40.335.750	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	3 jenis	3 jenis	32.500.000	9.500.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	43 ok	43 ok	223.992.500	156.645.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	512.322.960	362.580.000			
6	1	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	12.000.000	8.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	193.122.960	114.180.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	31 OB	31 OB	307.200.000	240.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	209.217.283	200.244.512			
6	1	1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	47 Unit	47 Unit	156.187.500	77.769.250	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	53 unit/buah/set	53 unit/buah/set	18.605.000	10.480.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	300 M2	300 M2	34.424.783	111.995.262	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	3.549.787.100	2.988.335.550			
6	1	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	2.396.748.200	1.713.245.300			
6	1	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	36 Laporan	36 Laporan	945.901.900	560.093.700	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 Laporan	25 Laporan	216.000.000	676.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	8 Laporan	8 Laporan	172.800.000	53.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	14 Laporan	14 Laporan	302.400.000	17.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	54 Laporan	54 Laporan	455.988.200	218.038.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	5 Laporan	5 Laporan	109.345.700	71.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	20 Temuan	20 Temuan	194.312.400	116.313.400	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase tindak lanjut temuan BPK	85 Persen	85 Persen	1.153.038.900	1.275.090.250			
6	1	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	20 Orang	20 Orang	373.401.850	365.009.600	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	30 Laporan	30 Laporan	779.637.050	910.080.650	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	652.716.540	628.152.140			
6	1	3.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	7.939.250	10.759.250			
6	1	3.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	7.939.250	10.759.250	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100 Persen	100 Persen	644.777.290	617.392.890			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	5 Laporan	5 Laporan	68.161.000	74.161.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	34.652.290	54.152.290	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	35 PD	35 PD	410.242.800	357.358.400	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asisten dan verifikasi penegakan integritas	1 Laporan	1 Laporan	131.721.200	131.721.200	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	INSPEKTORAT DAERAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				2.567.698.331	2.189.626.451			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.438.546.231	2.176.834.351			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.809.900	9.930.000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	5.257.900	5.257.900	Kab. Luwu, Bajo, Bajo		KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	573	3.081	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	523	258	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	623	273	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	773	773	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	3.060.000	3.060.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persenn	100 persenn	2.245.826.281	2.037.127.551			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	28 Orang	28 Orang	2.197.272.981	1.989.626.751	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	60 Ob	60 Ob	47.040.000	47.040.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	100 persen	100 persen	1.513.300	4.608	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.300.000			
						Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12					
						Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	100 Persen					
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	6.000.000	6.300.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	51.170.050	29.151.400			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	100 persen	100 persen	2.645	2.645	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	4.999.600	3.492.100	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	100 persen	100 persen	9.900.950	4.609.800	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamanuan makan dan minum yang disediakan	120 Kotak	120 Kotak	3.000.000	5.840.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 Kali	4 Kali	21.205.000	13.145.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	100 Persen	100 Persen	91.200.000	82.340.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	12.000.000	12.740.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	79.200.000	69.600.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 Pesen	100 Pesen	28.000.000	11.985.400			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Tahun	1 Tahun	11.000.000	9.985.400	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dilakukan pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	44.552.100	10.152.100			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	44.552.100	10.152.100			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	12 Desa	12 Desa	12.152.100	4.152.100	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	100 Persen	100 Persen	32.400.000	6.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.640.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	12 Desa	12 Desa	2.000.000	2.640.000			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	11 Desa	11 Desa	2.000.000	2.640.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				508.065.313	416.823.690			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	508.065.313	416.823.690			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	100 persen	222.988.475	266.823.690			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	100 persen	222.988.475	266.823.690	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sarana dan prasarana kelurahan	100 persen	100 persen	285.076.838	150.000.000			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananya sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	100 persen	100 persen	285.076.838	150.000.000	Kab. Luwu, Bajo, Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				1.548.225.019	1.271.526.971			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.404.472.619	1.259.001.971			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 dokumen	10 dokumen	5.131.770	4.920.270			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4.066.500	3.933.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	19.383	19.383	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.256	2.256	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-RKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.028	2.028	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-RKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	273	273	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen	17.004	9.204	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	4 triwulan	4 triwulan	1.276.531.749	1.125.587.721			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	11 orang	11 orang	1.224.619.749	1.071.550.221	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.02	3	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	51.600.000	53.725.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	4 Dokumen	4 Dokumen	312	312	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25.946.900	26.352.530			
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 eksamlar	12 eksamlar	1.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	3.438.400	3.844.030	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	100 kotak	100 kotak	2.500.000	2.500.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 kegiatan	30 kegiatan	18.808.500	18.808.500	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis	80.400.000	90.600.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	800 surat	800 surat	6.000.000	27.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Tagihan Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	10.800.000	10.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo		KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 OB	10 OB	63.600.000	52.800.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 unit	3 unit	11.662.200	11.541.450			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Jenis	4 Jenis	11.662.200	11.541.450	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	8.800.000	10.000.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	8.800.000	10.000.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Kordinasi/Sinergi Perencanaan	1 kali	1 kali	5.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	3.800.000	5.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	3.352.400	525			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.352.400	525			
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.352.400	525	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	2.000.000	2.000.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Desa	9 Desa	2.000.000	2.000.000			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	9 Desa	9 Desa	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	jumlah kegiatan yang dilakukan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa	1 tahun	1 tahun	1.000.000	1.000.000	Kab. Luwu, Bajo Barat, Bonelemo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BAJO BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				1.779.957.045	2.023.283.332			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.749.781.345	1.992.516.232			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.161.500	8.001.060			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4.229.500	3.549.500	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SDPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	523	484	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	523	48.556	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	523	484	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	523	484	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	3.840.000	2.514.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	1.598.356.544	1.476.411.861			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1 tahun	1 tahun	1.546.624.944	1.424.680.641	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Orang Bulan	48 Orang Bulan	47.160.000	47.160.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1.512.000	1.512.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14 laporan	14 laporan	3.059.600	3.059.220	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	7 Jenis	7 Jenis	6.000.000	6.000.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan dalam penatusahaan Barng Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	52.906.450	83.171.350				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000	5.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	3 Unit	3 Unit	-	22.500.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang diadakan	7 jenis	7 jenis	2.191.700	2.191.700	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	4.583.650	4.594.700	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundanga-uundangan yang diadakan	1 jenis	1 jenis	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	25 jenis	25 jenis	5.800.900	5.894.950	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makan dan Minum yang diadakan	3 jenis	3 jenis	4.290.000	13.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 OH	12 OH	28.640.200	27.590.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 Unit/Set	10 Unit/Set	-	18.118.000			
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	0 Unit	2 Unit	-	13.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan lainnya	0 jenis	8 jenis	-	5.118.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	71.602.601	57.299.711			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 Surat	300 Surat	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan tagihan telepon, listrik dan air	12 bulan	12 bulan	4.402.601	4.499.711	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 OB	48 OB	58.800.000	44.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	10.754.250	343.514.250			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 unit	2 unit	10.754.250	43.514.250	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1806 M2	1806 M2	-	300.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	akupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	18.752.100	18.752.100			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	18.752.100	18.752.100			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 Kali	1 Kali	8.152.100	8.152.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unit kerja kecamatan yang bekerja dengan efektif	9 unit kerja	9 unit kerja	10.600.000	10.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentrman dan keterlibatan umum	100 Persen	100 Persen	11.423.600	8.590.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100 Persen	100 Persen	11.423.600	8.590.000			
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	16 kali	16 kali	11.423.600	8.590.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	0 Persen	100.00 Persen	-	2.750.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Kali	1 Kali	-	2.750.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	5	2.01	8	Peleaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Kali	1 Kali	-	2.750.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Persen	100.00 Persen	-	675			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0 Persen	100 Persen	-	675			
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	0 desa	12 desa	-	675	Kab. Luwu, Basse Sangtempe, Lissaga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				1.457.854.132	1.317.109.001			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.436.294.132	1.295.749.001			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	5.114.400	5.114.400			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.657.400	2.657.400	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	273	273	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	273	273		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	273	273	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	273	273	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.365.000	1.365.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 Persen	100 Persen	1.307.811.312	1.168.344.191			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	1.257.329.712	1.117.862.591	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	47.160.000	47.160.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	1.512.000	1.512.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	1.809.600	1.809.600	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah pengurus barang yang disediakan honorariumnya	100 Persen	100 Persen	4.800.000	4.800.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang disediakan Honorariumnya	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 Persen	100 Persen	42.173.200	41.095.190			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	8.795	8.795	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun	1 Tahun	3.700.110	3.700.110	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.320.000	1.320.000			KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	4 Kegiatan	4 Kegiatan	7.847.100	7.847.100	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	120 Kotak	120 Kotak	500	500	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	3 Kegiatan	3 Kegiatan	27.926.490	26.848.480	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan	100 persen	100 persen	49.420.320	49.420.320			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	24 OB	24 OB	12.000.000	12.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.420.320	1.420.320	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	36.000.000	36.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	26.974.900	26.974.900			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.974.900	11.974.900	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	81 M2	81 M2	15.000.000	15.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	11.360.000	11.160.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa yang dilakukan koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa	100 persen	100 persen	11.360.000	11.160.000			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	72 OK	72 OK	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	8.960.000	8.760.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	600	600			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	600	600			
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 kali	2 kali	600	600	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	3.600.000	3.600.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	3.600.000	3.600.000			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pendayagunaan aset desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Basse Sangtempe Utara, Pantilang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				3.678.066.714	3.567.857.015			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.504.632.714	3.567.857.015			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur dilindungi Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	3.289.124.544	3.413.186.225			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	42 OB	42 OB	3.233.386.544	3.367.850.225	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	51.600.000	42.556.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4 kegiatan	4 kegiatan	2.780.000	2.780.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100 Jenis	100 Jenis	6.000.000	6.195.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang/aset yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.195.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	95.504.660	45.432.480			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	1.562.200	1.562.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	15 Unit	23.800.000	5.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7 1 1 2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	3.193.000	2.190.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	2 Jenis	2 Jenis	5.703.000	2.487.680	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	12 Bulan	2.880.000	2.880.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	18 Jenis	18 Jenis	10.151.510	8.045.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makan dan Minum Yang Disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan	6.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	22 OK	22 OK	42.009.950	19.267.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	84.096.510	84.096.510			
7 1 1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	100 Persen	100 Persen	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	14.496.510	14.496.510	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	15 OB	15 OB	63.600.000	63.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Belopa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 Unit/Set	10 Unit/Set	14.930.000	18.946.800			
7 1 1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Disediakan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan	3 Unit	3 Unit	1.800.000	10.809.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 1 2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesinnya Lainnya Yang di pelihara	2 Unit	2 Unit	13.130.000	8.137.400	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1		KECAMATAN				607.957.875	390.791.986			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				607.957.875	390.791.986			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				607.957.875	390.791.986			
7 1 3 2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				315.770.000	241.258.000	Kab. Luwu, Belopa, Balo-Balo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN YANG DI BANGUN	6 Unit	6 Unit	292.187.875	149.533.986	Kab. Luwu, Belopa, Balo-Balo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
7 1		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1		KECAMATAN				850.000.000	393.999.990			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				850.000.000	393.999.990			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				850.000.000	393.999.990			
7 1 3 2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	350.000.000	243.999.990	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	2 Unit	2 Unit	500.000.000	150.000.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
7 1		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1		KECAMATAN				504.020.106	421.000.000			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				504.020.106	421.000.000			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				504.020.106	421.000.000			
7 1 3 2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				300.417.500	271.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun	5 unit	5 unit	203.602.606	149.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	KECAMATAN BELOPA
7 1		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1		KECAMATAN				513.947.851	363.999.765			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				513.947.851	363.999.765			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				513.947.851	363.999.765			
7 1 3 2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	296.877.920	214.008.000	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	5 uni	5 uni	217.069.931	149.991.765	Kab. Luwu, Belopa, Tanamanai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA
7 1		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1		KECAMATAN				2.718.690.588	2.652.203.556			
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	2.621.090.588	2.648.051.456			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	2.092.000	2.092.000				
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	2 dokume	2 dokume	523	523	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	523	523	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				523	523		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	523	523	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	5 jenis	5 jenis	2.512.325.874	2.493.016.559				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	31 OB	31 OB	2.471.645.874	2.452.196.159	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	40.680.000	40.820.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah yang disusun	5 jenis	5 jenis	4.800.000	4.940.400				
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan dalam penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 orang / bulan	12 orang / bulan	4.800.000	4.940.400	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 persen	100 persen	5.500.000	19.500.000				
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Presentase ASN dengan tingkat kehadiran tepat waktu	100 persen	100 persen	5.500.000	5.500.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	0 orang	28 orang	-	14.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan		KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	10 Jenis	10 Jenis	24.842.480	56.871.566				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	1.880.860	1.880.860	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 unit	3 unit	-	15.800.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	3.000.000	3.000.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	3.960.000	6.600.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	23 jenis	23 jenis	7.057.620	11.199.520	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	2 jenis	2 jenis	3.750.000	7.215.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	36 OK	36 OK	5.194.000	11.176.186	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
						Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 OK	30 OK					
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 persen	100 persen	67.157.784	67.258.481				
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 surat	400 surat	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	19.157.784	19.258.481	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 OB	14 OB	44.400.000	44.400.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	100 persen	100 persen	4.372.450	4.372.450				
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 unit	8 unit	3.232.450	3.232.450	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	3 unit	1.140.000	1.140.000	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 persen	100 persen	4.000.000	4.152.100				
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100 persen	100 persen	4.000.000	4.152.100				
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	4.000.000	4.152.100	Kab. Luwu, Belopa Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN				594.174.526	458.799.988				
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	594.174.526	458.799.988				
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	594.174.526	458.799.988				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun	5 unit	5 unit	367.773.126	149.918.960	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	226.401.400	308.881.028	Kab. Luwu, Belopa Utara, Pammanu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN				633.760.150	434.199.993				
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				633.760.150	434.199.993				
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				633.760.150	434.199.993				
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Presentase kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen	224.578.726	284.634.366	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BELOPA UTARA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang dibangun	3 unit	3 unit	409.181.424	149.565.627	Kab. Luwu, Belopa Utara, Sabe	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	KECAMATAN BELOPA UTARA
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN				1.892.400.459	1.766.866.236				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 persen	100.00 persen	1.864.166.459	1.753.399.236				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	8.311.478	2.122.000				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Perubahan Renstra	4 Dokumen	4 Dokumen	5.563.838	624	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	937	312	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	29.964	234	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	893	484	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	618	468	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	5 Jenis	5 Jenis	1.575.083.947	1.508.346.297				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang disediakan gaji dan tunjangan	17 Orang	17 Orang	1.526.477.947	1.467.284.897	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	1 Tahun	1 Tahun	47.160.000	39.740.400	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	712	712	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	734	609	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	6.140.400			
7 1 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	6.140.400	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	128.537.040	51.950.530			
7 1 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	3.602.200	2.546.500	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	1.804.140	1.554.030	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2.880.000	2.880.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	12.120.700	13.956.550	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	42.445.000	31.013.450	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	79.800.000	155.767.000			
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	22.800.000	14.142.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	52.200.000	136.825.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	39.393.994	29.073.009			
7 1 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1 Tahun	1 Tahun	27.783.994	27.723.009	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	1.610.000	1.350.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	11.234.000	6.117.000			
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Unit Kerja	9 Unit Kerja	11.234.000	6.117.000			
7 1 2 2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 Kali	1 Kali	6.234.000	6.117.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	10.500.000	3.400.000			
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Diwilayah Kecamatan yang dilakukan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	10.500.000	3.400.000			
7 1 3 2.01	3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Di Wilayah Kecamatan yang Di Lakukan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	10.500.000	3.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	2.500.000	1.550.000			
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	1.550.000			
7 1 4 2.01	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000	1.550.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	4.000.000	2.400.000			
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	2.400.000			
7 1 6 2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang dilakukan Pendayagunaan Aset Desa	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000	2.400.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				522.949.114	488.800.000			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	522.949.114	488.800.000			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	522.949.114	488.800.000			
7 1 3 2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	98.815.524	100.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	3 unit/jenis	3 unit/jenis	310.133.590	150.000.000	Kab. Luwu, Bua Ponrang, Noling Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilakukan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	114.000.000	238.800.000	Semua Kab/Kota, Bua Ponrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUPON
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				1.880.985.484	1.679.745.110			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.829.476.084	1.674.805.110			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.855.000	3.855.000			
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.855.000	3.855.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.538.814.484	1.367.591.711			
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	16 orang	16 orang	1.500.918.184	1.329.745.211	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	48 bulan	48 bulan	36.240.000	36.240.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	2 laporan	2 laporan	1.656.300	1.606.500	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000	6.000.000			
7 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.081.400	32.241.000			
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4.849.900	4.771.900	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2.820.000	2.820.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Material yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	12.874.500	7.419.100	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 OH	12 OH	36.844.000	17.230.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.301.400	107.301.400			
7 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	4 Surat	4 Surat	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	18.600.000	15.600.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	4.701.400	4.701.400	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	108 bulan	108 bulan	78.600.000	78.600.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.423.800	157.815.999			
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 unit	4 unit	18.423.800	7.816.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	216 m2	216 m2	15.000.000	149.999.999	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.940.000	4.940.000			
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4.940.000	4.940.000			
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	6 Kali	6 Kali	4.940.000	4.940.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				550.408.201	435.248.586			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				550.408.201	435.248.586			
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				144.172.100	86.560.700			
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum masyarakat d kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	144.172.100	86.560.700	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				406.236.101	348.687.886			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibanun	1 unit/jenis	1 unit/jenis	249.036.101	149.487.886	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN KAMANRE
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang di fasilitasi untuk meningkatkan pemberdayaan di kelurahan	264 OB	264 OB	157.200.000	199.200.000	Kab. Luwu, Kamanre, Cilallang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN KAMANRE
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				2.421.773.433	2.119.990.728			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.319.973.433	2.102.590.728			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.330.500	1.000.000			
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	751	250	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	751	250	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	751	250	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	751	250	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	2.119.190.683	1.977.643.928			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	24 Orang	24 Orang	2.066.030.683	1.920.335.728	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	53.160.000	57.308.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100 %	6.000.000	9.502.200			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000	9.502.200	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	85.052.750	28.561.100			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	33.024.000	2.268.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	5.055.750	3.306.750	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan	14 Jenis	14 Jenis	12.375.500	6.006.350	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah perjalanan dinas luar daerah	62 kali	62 kali	28.397.500	13.380.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	94.042.000	79.700.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 surat	300 surat	3.600.000	7.200.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	49.642.000	35.300.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 OB	12 OB	40.800.000	37.200.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11.357.500	6.183.500			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 unit	5 unit	9.457.500	4.433.500	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	15 unit	1.900.000	1.750.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	4										
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelaksanaan koordinasi oleh kecamatan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	44.400.000	10.800.000				
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	10.800.000	10.800.000			
7	1	4	2.02	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Polri	36 OB	36 OB	10.800.000	10.800.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan	100 Persen	100 Persen	12.000.000	6.600.000			
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah	100 %	100 %	12.000.000	6.600.000			
7	1	5	2.01	8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 kali	12 kali	12.000.000	6.600.000	Kab. Luwu, Lamasi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN			573.216.180	505.000.000				
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	573.216.180	505.000.000			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100 %	100 %	573.216.180	505.000.000			
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	240.953.900	100.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	306.462.280	150.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dilaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	25.800.000	255.000.000	Kab. Luwu, Lamasi, Lamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAMASI
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN			1.451.871.568	1.355.850.235				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.425.521.568	1.339.050.235				
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.155.500	2.400.000				
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	6.750.000	1.200.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu	2 Dokument	2 Dokument	3.405.500	1.200.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.194.006.803	1.155.850.235				
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan	75 Dokument	75 Dokument	1.194.006.803	1.155.850.235	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			110.928.320	61.823.200				
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	2.574.430	7.070.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, To'lemo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Material disediakan	20 Jenis	20 Jenis	11.493.100	15.379.200			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Perjalanan Dinas Luar	2 Jenis	2 Jenis	49.853.500	37.574.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kelurahan		KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.720.445	85.856.800				
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Dan Keluar yang diregistrasi	0 surat	250 surat	-	4.800.000	Kab. Luwu, Lamasi Timur, Semua Kelurahan		KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Air Dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	5.040.445	5.696.800			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	76.680.000	75.360.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.710.500	33.120.000				
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Sediakan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan	4 Unit	4 Unit	4.305.500	10.620.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	1	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Gedung Lainnya Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	22.500.000	22.500.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.000.000	4.800.000				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7.000.000	4.800.000				
7	1	2	2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Efektivitas di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7.000.000	4.800.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			19.350.000	12.000.000				
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19.350.000	12.000.000				
7	1	6	2.01	3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Desa	9 Desa	-	12.000.000			KECAMATAN LAMASI TIMUR
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN			2.247.687.897	2.087.903.424				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.072.067.147	2.087.903.424			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	14.000.000	1.450.000			
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	14.000.000	1.450.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pegawai	100 persen	100 persen	1.844.573.487	1.888.171.999			
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang disediakan	1 tahun	1 tahun	1.844.573.487	1.888.171.999	Kab. Luwu, Larompong, Larompong		KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.124.500	44.524.075			
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.700.000	2.710.200	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	jumlah kegiatan yang laksanakan	12 bulan	12 bulan	11.724.500	11.473.875	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi	12 bulan	12 bulan	3.000.000	750	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	60 kegiatan	60 kegiatan	30.900.000	27.790.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 jenis	3 jenis	146.390.500	143.719.200			
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	200 surat	200 surat	36.507.900	46.291.900	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	18.700.000	18.700.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	84 bulan	84 bulan	91.182.600	78.727.300	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 unit	4 unit	16.978.660	10.038.150			
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	4 unit	4 unit	16.978.660	10.038.150	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN			632.366.800	474.800.000				
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			632.366.800	474.800.000				
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			632.366.800	474.800.000				
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	277.366.800	324.800.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	6 paket	6 paket	355.000.000	150.000.000	Kab. Luwu, Larompong, Larompong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LAROMPONG
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN			1.971.681.338	1.900.644.803				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100 persen	100 persen	1.861.338.488	1.900.644.803			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	35.130.700	35.130.700			
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja Yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.050.500	5.050.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.050.000	2.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000			
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (LAKIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	1.030.200	1.030.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	1.613.022.658	1.703.617.673			
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu			1.610.056.618	1.700.651.633	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1.171.040	1.171.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.02	6 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	690	690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	1.105.000	1.105.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	69.446.010	57.157.310			
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan			485	485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis cetakan/penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	7.030.800	7.030.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	1.560.000	1.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis/bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	10.549.660	10.549.660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	9.000.000	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 OK	12 OK	40.820.550	28.531.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	96.539.120	96.539.120			
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	100 Surat	100 Surat	20.230.000	20.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	5.869.120	5.869.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	1646 OB	1646 OB	70.440.000	70.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.200.000	8.200.000			
7 1 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin / berkala	3unit	3unit	8.200.000	8.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				533.432.478	415.947.143			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				533.432.478	415.947.143			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sarana dan prasarana kelurahan	100 persen	100 persen	533.432.478	415.947.143			
7 1 3 2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dipasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	133.554.200	96.849.200	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute		
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	2 Unit	2 Unit	275.078.278	149.297.943	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute		
7 1 3 2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan kelurahan	100 persen	100 persen	124.800.000	169.800.000	Kab. Luwu, Larompong Selatan, Bone Pute		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				1.251.663.506	1.431.926.111			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.204.791.406	1.408.974.011			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	28 Dokumen	28 Dokumen	12.765.200	9.175.200			
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yg di susun	2 Dokumen	2 Dokumen	7.083.200	7.083.200	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-RKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	523	523	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	523	523	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang di susun	1 Dokumen	1 Dokumen	523	523	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	523	523	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	13 Orang	13 Orang	1.051.103.806	1.083.171.802			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				999.840.206	1.031.908.202			KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah ASN yang yang di sedikan tunjangan verivikasi	48 Bulan	48 Bulan	47.160.000	47.160.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang di susun	1 Laporan	1 Laporan	1.512.000	1.512.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester yang di susun	30 eksamplar	30 eksamplar	2.591.600	2.591.600	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 Jenis	1 Jenis	4.800.000	4.800.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang di benikan Honorarium	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan	52.746.700	62.625.323			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik Kantor Yang di adakan	7 jenis	7 jenis	3.184.750	3.184.750	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak penggandaan yang di adakan	3 Jenis	3 Jenis	5.365.000	7.640.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang di adakan	12 eksamplar	12 eksamplar	1.200.000	1.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis ATK yang di sediakan	31 jenis	31 jenis	9.967.450	10.450.350	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang di sediakan	1 jenis	1 jenis	5.000.000	12.120.000	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan dan jumlah perjalanan luar daerah	11 Kali	11 Kali	28.029.500	28.030.223	Kab. Luwu, Latimojong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	42.255.000	39.000.000			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	846 OB	846 OB	39.000.000	39.000.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	3 Kegiatan	3 Kegiatan	10.201.700	210.201.686			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan pajak perisinan kenderaan dinas yang di pelihara	5 unit	5 unit	9.701.700	9.701.700	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	4 unit	4 unit	500	500	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana gedung kantor yang di pelihara	1 Paket	1 Paket	-	199.999.986	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	46.872.100	22.952.100			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.752.100	17.752.100			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah pelaksana koedniasi/sinergi perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	8.152.100	8.152.100	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	peningkatan kapasitas aparatur di bidang perencanaan dan keuangan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	9.600.000	9.600.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/sinergi Perencanaan yang di laksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.120.000	5.200.000			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa diwilayah kecamatan yang dilakukan kegiatan peningkatan epektifitas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	29.120.000	5.200.000	Kab. Luwu, Latimojong, Pajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN LATIMOJONG
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				3.591.231.762	3.239.566.561			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	3.428.571.762	3.237.566.561			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	100 %	8.537.000	4.079.800			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3.325.500	1.523.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1.2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	1.308.000	6.392	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	751	6.392	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	1.308.000	6.392	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	1.191.000	6.392	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %	100 %	3.158.174.572	3.112.051.765			
7	1	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	492 OB	492 OB	3.085.632.572	3.039.999.565	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	70.160.000	70.454.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1.670.000	1.061.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	712	5.372	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	100 %	100 %	6.080.000	6.070.800			
7	1	1.2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	1.280.000	6.503	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 OB	12 OB	4.800.000	5.420.500	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	93.521.690	29.942.150			
7	1	1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Unit	1 Unit	45.371.290	10.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	2.184.000	1.140.500	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	1.560.000	2.400.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis material kebutuhan kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis	12.282.850	3.911.650	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 tahun	1 tahun	25.708.000	12.490.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Jasa	100 %	100 %	112.760.000	79.189.546			
7	1	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	36 OB	36 OB	13.200.000	13.087.850	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	36 Bulan	36 Bulan	19.160.000	10.901.696	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	204 OB	204 OB	80.400.000	55.200.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	19.498.500	6.232.500			
7	1	1.2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2 Unit	2 Unit	18.608.500	6.232.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	15.760.000	2.000.000			
7	1	2.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	15.760.000	2.000.000			
7	1	2.2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.360.000	2.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN				500.779.219	510.100.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	100 persen	500.779.219	510.100.000			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan yang di fasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 tahun	1 tahun	500.779.219	510.100.000			
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Difasilitasi Dalam Pelaksanaan ForumMusyawarah Di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	135.653.900	100.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang di bangun	5 unit	5 unit	186.925.319	150.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG		
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Diberdayakan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	178.200.000	260.100.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Subur Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				532.932.874	450.999.472			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 persen	100 persen	532.932.874	450.999.472			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan yang di fasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 tahun	1 tahun	532.932.874	450.999.472			
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang Di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	309.114.530	301.000.000	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Di adakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	223.818.344	149.999.472	Kab. Luwu, Ponrang, Padang Sappa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG		
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				2.518.023.403	2.285.982.146			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.479.135.153	2.266.751.146			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.443.400	12.859.400			
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkant ran	20 Jenis	20 Jenis	2.723.000	2.665.800	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Ju mlah pro gram dan kegiatan perangkat daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.866.000	1.670.800	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.853.000	1.670.800	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	3.217.200	2.250.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.932.200	1.750.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	10 Dokumen	10 Dokumen	2.051.000	2.051.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	801	801	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.012.594.467	2.088.933.620			
7 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.007.409.067	2.085.965.020			
7 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD yang disusun	8 Laporan	8 Laporan	3.548.400	2.968.600	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				79.594.700	28.350.526			
7 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25 Jenis	25 Jenis	2.432.500	1.041.300	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	5.700.500	1.495.126	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	4.680.000	2.400.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		
7 1 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material Yang disediakan	50 Jenis	50 Jenis	13.448.200	1.006.600	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum KECAMATAN PONRANG SELATAN		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Jamuan makanan dan minum yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	12.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70 OK	70 OK	34.639.500	18.407.500	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
					Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 OK	5 OK						
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.380.600	124.927.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang diregistrasi	500 Surat	500 Surat	40.113.200	6.648.600	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Biaya Tagihan Telepon/Internet, Air dan Air	12 Bulan	12 Bulan	14.500.000	12.000.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kerja yang disediakan jasa pemeliharaan/perbaikan	10 unit/Paket	10 unit/Paket	118.767.400	106.278.400	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong		KECAMATAN PONRANG SELATAN
					Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan	12 OB	12 OB						
					Penyediaan Jasa Upah Kerja	174 OB	174 OB						
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.281.986	11.680.600			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan dana Jasa Sopir yang disediakan	12 OB	12 OB	22.221.200	11.680.600	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
						Jumlah Penyediaan dana Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.783.500	6.031.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9.783.500	6.031.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Koordinasi/sinergi perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.452.500	1.700.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Peningkatan Efektifitas kegiatan kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	4.331.000	4.331.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.704.750	3.600.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				5.704.750	3.600.000			
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Peningkatan Efektifitas kegiatan PPK kecamatan	13 Kel/Desa	13 Kel/Desa	5.704.750	3.600.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				23.400.000	9.600.000			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	23.400.000	9.600.000			
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diberikan insentif	96 OB	96 OB	23.400.000	9.600.000	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong		KECAMATAN PONRANG SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				553.847.791	385.600.000			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				553.847.791	385.600.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				553.847.791	385.600.000			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	208.557.700	235.909.952	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	4 unit	4 unit	345.290.091	149.690.048	Kab. Luwu, Ponrang Selatan, Pattedong	PENDAPATAN TRANSFER	KECAMATAN PONRANG SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				1.818.365.285	1.586.724.818			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu	100 %	100 %	1.712.264.885	1.580.649.818			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	100 %	1.450.198.701	1.422.964.818			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	16 OB	16 OB	1.418.721.701	1.386.724.818	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	30.240.000	36.240.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai ketentuan	100 %	100 %	6.000.000	6.140.400			
7	1	1	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	6.000.000	6.140.400	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	74.918.545	37.354.200			
7	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.380.000	1.380.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	15.398.120	9.549.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	36.964.000	26.425.000	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	117.600.000	108.140.400			
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Registrasi	2 OB	2 OB	12.000.000	12.140.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembiayaan Biaya Tagihan Listrik dan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 OB	10 OB	81.600.000	72.000.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	21.042.739	6.050.000			
7	1	1	2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan Pezinan Kendaraan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	14.168.900	2.400.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis	3.950.000	3.650.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik di kecamatan	100 %	100 %	10.140.400	6.075.000			
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi dengan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	10.140.400	6.075.000			
7	1	2	2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	umlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.140.400	6.075.000	Kab. Luwu, Suli, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN				553.849.689	534.399.310			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	100 Persen	553.849.689	534.399.310			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang dilakukan Pemberdayaan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	553.849.689	534.399.310			
7	1	3	2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	334.457.250	385.796.750	Kab. Luwu, Suli, Suli		KECAMATAN SULI
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	9 Unit	9 Unit	219.392.439	148.602.560	Kab. Luwu, Suli, Suli		KECAMATAN SULI
7				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1			KECAMATAN				1.417.902.135	1.639.880.830			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.351.749.635	1.629.580.830			
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 persen	100 persen	4.311.500	4.721.200			
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja	2 dokumen	2 dokumen	1.287.000	1.115.600	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	523	700	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	523	700	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	523	700	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	523	700	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	9.325	8.056	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	100 persen	1.148.195.253	1.085.953.217			
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	16 OB	16 OB	1.105.085.253	1.044.743.017	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.02	3	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	12 bulan	12 bulan	41.040.000	41.210.200	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	12 OB	12 OB	4.800.000	4.970.200			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.970.200	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	85 persen	85 persen	70.227.475	46.680.100			
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6.057.500	3.217.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	2.410.000	2.301.600	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	10.000.775	11.673.500	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam/luar daerah	20 OK	20 OK	36.381.000	23.488.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Jasa	100 persen	100 persen	81.984.200	68.701.390			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 surat	400 surat	14.400.000	5.400.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	9.084.200	9.301.390	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	18 OB	18 OB	58.500.000	54.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	42.231.207	418.554.723			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 unit	5 unit	26.717.750	15.078.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor yang dipelihara	2500 m2	2500 m2	15.513.457	403.476.723	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100 Persen	100 Persen	8.200.000	6.000.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 persen	100 persen	8.200.000	6.000.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 kali	1 kali	4.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	9.352.500	4.300.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang dilakukan pemberdayaan Desa	7 Desa	7 Desa	9.352.500	4.300.000			
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	18 kali	18 kali	9.352.500	4.300.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				573.478.091	361.000.000			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	573.478.091	361.000.000			
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang dilakukan pemberdayaan	1 kelurahan	1 kelurahan	573.478.091	361.000.000			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	170.467.995	104.200.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	32 paket	32 paket	313.010.096	150.000.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilakukan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat	180 OB	180 OB	90.000.000	106.800.000	Kab. Luwu, Suli Barat, Lindajang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN SULI BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				2.802.350.038	2.751.472.870			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.749.490.038	2.737.152.870			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan Secara Tepat Waktu	11 Dokumen	11 Dokumen	9.577.000	3.150.000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Dokumen Renstra dan Renja yang di Susun	4 Dokumen	4 Dokumen	3.669.000	800	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	751	400	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	751	400	Kab. Luwu, Walenrang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif								
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	751	400	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	751	400	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2.904.000	750	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyelesaian Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan	75 Dok	75 Dok	2.526.740.238	2.602.104.898			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	384 OB	384 OB	2.473.962.638	2.550.944.898	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	24 Dokumen	24 Dokumen	49.560.000	50.160.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1.616.600	500	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	1.601.000	500	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	53 Jenis	53 Jenis	111.679.500	49.375.000			
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4.425.000	4.865.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	3.600.000	3.600.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	13.941.500	12.516.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	120 Kali	120 Kali	46.418.000	28.394.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	9 Jenis	9 Jenis	72.372.000	57.764.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang diregritasi	750 Surat	750 Surat	14.400.000	14.400.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Biaya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	19.572.000	10.964.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	168 OB	168 OB	38.400.000	32.400.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diselenggarakan	9 Jenis	9 Jenis	24.321.300	19.958.972			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	24.321.300	19.958.972	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	22.400.000	4.800.000			
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan	9 Desa/Kel	9 Desa/Kel	22.400.000	4.800.000			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan	9 Desa/Kel	9 Desa/Kel	5.600.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	10.560.000	9.520.000			
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Desa/Kel	9 Desa/Kel	10.560.000	9.520.000			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa/Kel yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kel dan Pendayagunaan Aset Desa/Kel	9 Desa/Kel	9 Desa/Kel	8.320.000	9.520.000	Kab. Luwu, Walerang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1			KECAMATAN					503.057.270	400.000.000			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					503.057.270	400.000.000			
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					503.057.270	400.000.000			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum Musyawarah dikelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	224.478.318	250.016.014	Kab. Luwu, Walerang, Bulo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Unit/Jenis	1 Unit/Jenis	278.578.952	149.983.986	Kab. Luwu, Walenrang, Bulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 1	KECAMATAN				1.395.936.560	1.479.927.662			
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.376.296.560	1.466.907.662			
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	5.242.000	4.692.000			
7 1 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2.171.000	1.871.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	434	434	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	434	434	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	434	434	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				434	434		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.335.000	1.085.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu		KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	1 jenis	1 jenis	1.230.855.210	1.321.735.662			
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.189.047.210	1.279.927.662			KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	24 laporan	24 laporan	39.720.000	39.720.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1.062.000	1.062.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.026.000	1.026.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi isusunBarang Milik daerah yang d	1 jenis	1 jenis	4.800.000	4.800.000			
7 1 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	6 jenis	6 jenis	65.249.200	53.459.200			
7 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	6 jenis	1.820.200	1.820.200	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	2.925.000	2.925.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material				10.320.000	10.530.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 oh	60 oh	36.384.000	36.384.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	0 set	2 set	-	12.000.000			
7 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	0 set	2 set	-	12.000.000			
7 1 1 2.07	5 Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	2 set	2 set	-	12.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	7 jenis	7 jenis	45.420.000	45.420.000			
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar dan surat masuk yang diregistrasi	250 suratt	250 suratt	14.400.000	14.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.020.000	1.020.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 ob	14 ob	30.000.000	30.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	7 unit	7 unit	24.730.150	24.800.800			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 unit	8 unit	24.730.150	24.800.800	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	4.000.000	4.000.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.000.000	4.000.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 kali	1 kali	4.000.000	4.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 Persen	100 Persen	10.280.000	5.660.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan Pemberdayaan	6 desa	6 desa	10.280.000	5.660.000			
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	6 desa	6 desa	10.280.000	5.660.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	3.360.000	3.360.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6 desa	6 desa	3.360.000	3.360.000			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 desa	6 desa	1.680.000	1.680.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 desa	6 desa	1.680.000	1.680.000	Kab. Luwu, Walenrang Barat, Ilan Batu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				1.784.400.753	1.792.390.827			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100.00 persen	100.00 persen	1.736.980.753	1.781.190.827			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	8 Dokumen	8 Dokumen	7.253.000	2.550.000			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	3.046.000	800	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	523	250	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	523	250	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	523	250	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	523	250	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	2.115.000	750	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan	50 Laporan	50 Laporan	1.426.547.042	1.488.347.421			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji Dan tunjangan sesuai ketentuan	23 Orang	23 Orang	1.380.344.542	1.442.827.421	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Honor Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	44.520.000	44.520.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	687	375	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	9.955	625	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	40 Jenis	40 Jenis	68.061.430	70.251.570			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	415	1.010.800	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	1.826.000	2.633.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	4.526.630	8.216.420		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan			1.800.000	1.800.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan			18.908.350	19.655.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan dinas luar daerah	70 oh	70 oh	28.435.450	36.935.450	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	3 Jenis	3 Jenis	41.239.699	41.239.699			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	200 surat	200 surat	4.800.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	4.039.699	4.039.699	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum kantor	11 OB	11 OB	32.400.000	32.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	9 Jenis	9 Jenis	179.079.582	174.002.137			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	6 unit	6 unit	17.519.400	23.043.700	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.140.000	1.395.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi		184 m2	160.420.182	149.563.437		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	12.300.000	4.800.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Dan Koordinasi Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12.300.000	4.800.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	4.000.000	4.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	5.600.000	6.400.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	8 desa	8 desa	5.600.000	6.400.000			
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	8 Desa	8 Desa	2.800.000	3.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	8 Desa	8 Desa	2.800.000	3.200.000	Kab. Luwu, Walenrang Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN WALENRANG TIMUR
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN				2.687.248.508	2.359.587.814			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.625.328.508	2.346.167.814			
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.910.350	12.910.350			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4.108.800	4.108.800	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.141.000	1.141.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.141.000	1.141.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.141.000	1.141.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.141.000	1.141.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4.237.550	4.237.550	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disediakan gaji dan Tunjangan Sesuai Ketentuan	408 OB	408 OB	2.372.246.898	2.211.059.829			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	408 OB	408 OB	2.319.034.898	2.159.887.829	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang diverifikasi	4 dokumen	4 dokumen	49.560.000	47.520.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.051.000	2.051.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.601.000	1.601.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi yang Disediakan	12 OB	12 OB	6.000.000	6.000.000			
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 OB	12 OB	6.000.000	6.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diSediakan	25 pasang/Stel	25 pasang/Stel	16.500.000	5.000.000			
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	25 Pasang/Stell	25 Pasang/Stell	16.500.000	5.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				105.103.705	43.698.630			
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	3.037.800	3.037.800	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	3.997.400	3.997.400	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5.853.700	5.860.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	1.800.000	1.800.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	11.253.430	11.253.430	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	120 OK	120 OK	40.410.000	17.750.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.859.505	54.459.505			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	400 Surat	400 Surat	8.400.000	8.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.059.505	10.059.505	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	120 OB	120 OB	68.400.000	36.000.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.708.050	13.039.500			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	6 Unit	6 Unit	10.708.050	13.039.500	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.000.000	2.400.000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12.000.000	2.400.000			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 Kali	1 Kali	2.400.000	2.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.600.000	4.400.000			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1 Kali	1 Kali	13.600.000	4.400.000			
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan	10 Desa	10 Desa	13.600.000	4.400.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.400.000	4.500.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				2.400.000	4.500.000			
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Kali	2 Kali	2.400.000	4.500.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.120.000	2.120.000			
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	100 Persen	2.120.000	2.120.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Desa	10 Desa	2.120.000	2.120.000			
7 1 6 2.01	5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10 Desa	10 Desa	2.120.000	2.120.000	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7 1		KECAMATAN			517.278.952	351.222.508			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			517.278.952	351.222.508			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			517.278.952	351.222.508			
7 1 3 2.02	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	209.783.895	250.534.095	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7 1 3 2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	3 Paket	3 Paket	307.495.057	100.688.413	Kab. Luwu, Walenrang Utara, Basso	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN WALENRANG UTARA
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7 1		KECAMATAN			3.748.061.958	3.569.609.559			
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.557.914.458	3.561.609.559			
7 1 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.191.205.852	3.431.871.883			
7 1 1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai kelentuan	50 orang	50 orang	3.127.984.852	3.369.609.883	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	84 OB	84 OB	60.480.000	62.262.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000	5.151.000			
7 1 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan barang milik daerah	12 OB	12 OB	6.000.000	5.151.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			144.743.340	37.770.860			
7 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	6.015.000	3.113.060	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	4.620.000	4.620.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	9.596.200	5.164.550	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3 jenis	3 jenis	18.450.000	4.200.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	46 OH	46 OH	60.981.400	20.673.250	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137.155.116	82.655.116			
7 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300 surat	300 surat	6.000.000	4.900.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	26.755.116	26.755.116	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	84 OB	84 OB	104.400.000	51.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.169.250	4.160.700			
7 1 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 unit	2 unit	13.749.250	4.160.700	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.642.500	8.000.000			
7 1 2 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			21.642.500	8.000.000			
7 1 2 2.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan koordinasi/sinergi perencanaan	1 kali	1 kali	12.342.500	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7 1 2 2.01	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	15 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	9.300.000	4.000.000	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7		UNSUR KEWILAYAHAN							
7 1		KECAMATAN			505.003.602	421.810.134			
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			505.003.602	421.810.134			
7 1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			505.003.602	421.810.134			
7 1 3 2.02	1	Jumlah Kelurahan Yang difasilitasi dalam pelaksanaan Forum musyawarah di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana					
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	312.512.404	271.865.219	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	7 unit/jenis	7 unit/jenis	192.491.198	149.944.915	Kab. Luwu, Bua, Sakti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	KECAMATAN BUA
8	1				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.430.687.146	4.296.900.687			
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.912.034.242	2.955.965.060			
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	19.866.000	7.865.090			
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	7.216.500	3.553.590	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.680.000	1.580.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	3.348.000	2.731.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Jenis	8 Jenis	2.156.637.342	2.223.466.340			
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	23 OB	23 OB	1.898.104.942	2.064.128.840	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	14 OB	14 OB	237.270.000	142.580.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	7.085.000	10.287.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	5 laporan	5 laporan	14.177.400	6.470.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun	1 jenis	1 jenis	3.412.510	1.309.700			
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD	2 laporan	2 laporan	3.412.510	1.309.700	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	1 jenis	1 jenis	54.132.550	21.600.000			
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	55 pasang	55 pasang	36.300.000	21.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	352.074.090	380.585.280			
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	4 unit	30.000.000	27.380.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	57 unit/set	57 unit/set	2.171.500	1.253.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	10.627.250	11.340.690	Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	11.400.000	4.200.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	12 bulan	12 bulan	40.379.200	45.082.440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	48 kali	48 kali	6.497.390	4.188.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dikuti	189 OK	189 OK	247.658.500	287.140.550	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	25.000.000			
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan		1 unit	-	15.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	-	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	100 %	267.331.200	238.531.200			
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	8.131.200	8.131.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 OB	26 OB	259.200.000	230.400.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 unit	12 unit	58.580.550	57.607.450			
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	3 unit	3 unit	54.775.550	55.577.450	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	9 unit	9 unit	3.805.000	2.030.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penyelenggaraan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	58.784.000	22.814.450			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana			
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan						
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 laporan	2 laporan	58.784.000	22.814.450			
8	1	2	2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	1 kali	1 kali	23.560.000	15.844.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	2.01	5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	1 laporan	1 laporan	11.734.000	6.970.200	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat	100 %	100 %	1.233.488.504	1.199.962.727			
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan kegiatan bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/pemilukada, serta pemantauan situasi politik	3 laporan	3 laporan	1.233.488.504	1.199.962.727			
8	1	3	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan,	Hibah Bantuan Keuangan Parpol yang terealisasi	100 %	100 %	27.585.600	1.177.519.904	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	12 parpol	12 parpol					
8	1	3	2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Koordinasi pemantauan situasi politik	1 kali	1 kali	1.180.459.904	12.345.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	2.01	5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Monitoring Perkembangan Politik Daerah	2 kali	2 kali	25.443.000	10.097.223	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100 %	100 %	37.205.600	17.474.700			
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	37.205.600	17.474.700			
8	1	4	2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas	1 kali	1 kali	21.485.600	15.145.600	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	2.01	5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Monitoring keberadaan dan aktivitas ormas di kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	6.580.000	2.329.100	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	85 %	85 %	53.405.200	24.246.250			
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	2 laporan	2 laporan	53.405.200	24.246.250			
8	1	5	2.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosialisasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	1 kali	1 kali	20.965.600	21.944.250	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	5	2.01	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	1 kali	1 kali	23.545.600	2.302.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	100 Persen	100 Persen	135.769.600	76.437.500			
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Luwu	100 %	100 %					
8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	7 laporan	7 laporan	135.769.600	76.437.500			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana				
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini	1 kali	1 kali	26.540.000	17.600.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 kali	1 kali	20.745.600	2.302.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Monitoring keberadaan orang asing di daerah	1 laporan	1 laporan	10.884.000	3.735.500	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kab. Luwu	4 kegiatan	4 kegiatan	77.600.000	52.800.000	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL													
									1.518.261.846.508	1.475.950.546.489			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja. RKPD memuat indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal, Norma Standar Prosedur Kriteria, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta indikator mandiri lainnya yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu dan Renstra-PD Tahun 2019-2024, sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi *Indikator Makro Pembangunan*, *Indikator Kinerja Utama (IKU)* maupun *Indikator Kinerja Kunci (IKK)*.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum dengan menilai kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan dan bidang pemerintahan. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator. Enam Indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah. Adapun indikator makro pembangunan terdiri dari :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Gini Ratio
5. Indeks Pembangunan Manusia

6. PDRB Perkapita

Capaian dan target kinerja makro pembangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1.
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Luwu
Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Makro	Satuan	Capain Tahun 2021	Pokok Tahun 2022	Target Perubahan Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,03	4,62-5,98	6,06
2	Kemiskinan				
	Tingkat Kemiskinan	%	12,53	12,10	12,30
	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	46,26		45,27
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka/Nilai	1,77	1,527	1,42
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	4,24	4,10
	Jumlah Penganggur	Ribu Orang	8.232	-	7.461
4	Gini Ratio	Angka/Nilai	0,375	0,398	0,369
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka/Nilai	70,85	72,68	71,09
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,44	70,58	70,58
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,35	8,47	8,60
	Pengeluaran per kapita (d disesuaikan)	Ribu Rupiah/Orang	771,10	780,11	790,38
6	PDRB Perkapita				
	ADHB	Jt Rp	48,55	48,05	53,63
	ADHK	Jt Rp	28,44	28,95	29,67

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Rumusan **indikator kinerja utama berikut capaian tahun lalu, asumsi capaian tahun berjalan dan target pada tahun rencana** dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 6.2**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Asumsi Capaian Tahun 2022**

Indikator	Satuan	Capaian	Pokok	Target Perubahan
		2021	2022	2022
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor Indeks	C (49,21)	57,35 (CC)	59,80 (CC)
2. Nilai SAKIP	Skor Indeks	B (60,08)	69,51 (B)	69,51 (B)
3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Opini	WTP	WTP	WTP
4. Indeks Pembangunan Manusia	Skor Indeks	70,85	72,01	71,09
5. Indeks Kesehatan	Skor Indeks	77,60	78,30	78,30
6. Indeks Pendidikan	Skor Indeks	65,03	65,44	65,44
7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Skor indeks	Cukup	Baik	Baik
8. Tingkat Mobilitas	%	0,87	0,87	0,87
9. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0,97	0,98	0,98
10. Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,97	0,98	0,98
11. Tingkat Kemiskinan	%	12,53	12,10	12,30
12. PDRB Perkapita (ADHB)	Juta Rp	48,55	48,05	53,63
13. Indeks Ketahanan Pangan	Skor	81,28	86	86,0
14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	5,29	5,41	5,41
15. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor Indeks	74,31	76,03	76,03
16. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Angka	2,80	2,43	2,43
17. Persentase desa berstatus mandiri	%	0,97	1,45	1,45
18. Pertumbuhan ekonomi	%	6,03	5,84	6,06
19. Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,66	11,51	11,51
20. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Penegakan Hukum	Skor Indeks	80,06	81,27	81,27
21. Cakupan Kasus Hukum yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
22. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor Indeks	71,50	72,90	72,90
23. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor Indeks	187,71	187,71	187,71

Data yang tertuang dalam tabel diatas bersumber dari data BPS atau perangkat daerah yang terkait, merupakan gambaran dari kondisi tahun 2021 dan menjadi *baseline* perencanaan, proyeksi tahun 2022 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021, serta target tahun 2023 yang diturunkan dari RPJMD tahun berkenaan atau sesuai capaian tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022.

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan suatu daerah digambarkan melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator). Penetapan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: (1) *Aspek Kesejahteraan Masyarakat*; (2) *Aspek Daya Saing Daerah*; dan (3) *Aspek Pelayanan Umum*. Penetapan Indikator Kinerja Daerah yang terbagi dalam tiga aspek tersebut di atas, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program/kegiatan pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, rangkuman Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu yang terdiri dari capaian tahun lalu, proyeksi tahun berjalan dan target tahun rencana, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3
Capaian, Asumsi Capaian dan Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Pertumbuhan PDRB	%	7,23	6,03	6,06
2.	Laju Inflasi	%	3,86	0,65	1,1
3.	PDRB per kapita	Juta Rp	38,98	48,55	57,02
4.	Angka Melek Huruf	%	100,00	93,62	100,00
5.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,35	8,60
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,96	13,39	14,06
7.	Angkat Harapan Hidup	Tahun	70,63	70,44	70,58
8.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,03
9.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	5,32	5,06	4,81
10.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,88	64,22	65,20

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
12.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	60,38	60,38	61,89
13.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	38,11	38,11	36,20
14.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,48	9,43	9,83
15.	Penguatan cadangan pangan		48,12	48,12	49,32
16.	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	4
17.	Ketersediaan pangan utama	%	68,78	68,78	70,19
18.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,35	53,21	53,89
19.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,89	10,07	11,17
20.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	5,60	3,94	6,35
21.	Pertumbuhan Industri	%	6,44	4,1	6,60
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
2.1.	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	771,10	771,10	810,14
2.2.	Nilai tukar petani		-	-	-
2.3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	53,98	53,98	56,71
2.4.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	89,41	89,41	93,94
2.5.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan (ekonomi)	%	0,79	0,79	0,83
2.6.	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100
2.7.	Rasio ketergantungan	%	61,33	61,33	61,34
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
A.	URUSAN WAJIB DASAR				
1.	PENDIDIKAN				
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	61,55	93,66	98,90
1.2.	Angka partisipasi kasar:				
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	100,00	94,36	98,88
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	100,00	80,93	95,52
1.2.3.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	8.317	8.317	8.738
1.3.	Angka Partisipasi Murni :				
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,00	94,14	96,17
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,73	96,56	96,93
1.4.	Angka partisipasi sekolah :				
1.4.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100,00	94,14	97,00
1.4.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	73,67	96,08	98,73
1.5.	Angka Putus Sekolah:				
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0
1.6.	Angka Kelulusan:				
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	95,58	99,51
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	97,04	99,21
1.7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	98,80	99,87
1.8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100,00	98,03	99,93
1.9.	Fasilitas Pendidikan:				

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
1.10.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	63,31	16,44	24,23
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	68,93	67,36	67,75
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	870,00	67,16	99,91
1.13.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,81	98,24	98,36
1.14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,46	84,24	86,18
1.15.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	61,55	91,85	98,89
1.16.	Presentase sekolah yang telah melaksanakan manajemen pendidikan yang baik	%	0,00	0,00	0,00
1.17.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	N.A	N.A	N.A
1.18.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	N.A	N.A	N.A
1.19.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	N.A	N.A	N.A
1.20.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	N.A	N.A	N.A
2. KESEHATAN					
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0,01	0.0002	10
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	%	100,00	98.87	99,00 %
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8,54	1.4	0.00
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	6,29	0.001	0.011
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	234	234	5
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	0,02	0.01	0.01
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,0006	0.000006	0.000006
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0.000005	0.000005	0.000005
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0.008	0.008	0.008
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0.013	0.013	0.013
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	74,59	93,10	79,00
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94,33	84,45	90,00
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92,14	90,30	90,30
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)		NA	NA	NA
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100,00	100,00	100,00
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,75	0,75	1,00
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	46,84	45,00	90,00
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	252	252	211
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	7,10	7,10	29
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100,00	40,35	55,00
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	96,97	90,00	95,00
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	100,00	100,00
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00
2.26.	Angka kejadian Malaria		117	117	<1
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	NA	NA	100,00
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	NA	NA	100,00
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,0000	0,0000	0,000
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100,00	NA	100,00
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100,00	NA	100,00
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100,00	56.66	100,00
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	100,00	100,00	100,00
2.35.	Cakupan puskesmas	%	100,00	100,00	100,00
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	%	49,25	54.42	65
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	89,26	81.71	89
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%	94,45	87.83	88
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	61,18	93	95
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%	73,33	70.37	78
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100,00	NA	78
2.42.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	94,35	16	92
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,00	56.66	75
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	NA	100,00
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00
2.46.	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	22,00	22,00	22,00
2.47.	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	Tahun	1	1	1
2.48.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	NA	85
2.49.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,0009	0,0009	0,0009
2.50.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100
2.51.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91.14	91.14	95

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
2.52.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89.45	89.45	90
2.53.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91.88	91.88	93
2.54.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16	16	91
2.55.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	75,08	75,08	90,00
2.56.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	95,00
2.57.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	61.3	61.3	90
2.58.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	86.6	86.6	100
2.59.	Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	79	79	100
2.60.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	42	42	75
2.61.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	84.36	84.36	95
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	34,55	34,55	28,88
3.2.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	22,8	17,76	28,88
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	86,53	86,53	87,64
3.4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0
3.5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	42,01	47,56	42,99
3.6.	Persentase penduduk berakses air minum	%	84,09	81,40	86,19
3.7.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	49,90	68,36	51,15
3.8.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	NA	NA	NA
3.9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	NA	NA	NA
3.10.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	17,23	6,15	6,45
3.11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	46,18	46,18	48,49
3.12.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	99,81	8,26	8,76
3.13.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0,000020	0,000028
3.14.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA	NA	NA
3.15.	Ketaatan terhadap RTRW	%	18,81	18,81	23,21
3.16.	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	64,23	35,27	31,36

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
3.17.	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,87	0,87	0,87
3.18.	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Km	5.415	5.415	3.208
3.19.	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	NA	N.A	N.A
3.20.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	100,00	80,00	90,00
3.21.	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	1	3	7
3.22.	Persentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	100,00	100,00	100,00
3.23.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Angka	8.904	8.904	8.904
3.24.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	81,39	81,39	86,19
3.25.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	4,15	4,15	4,58
3.26.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Angka	5,38	5,38	15,25
3.27.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Angka	N.A	N.A	N.A
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
4.1.	Rasio rumah layak huni		0,207	0,207	0,228
4.2.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0688	0,0688	0,076
4.3.	Rasio permukiman layak huni		0,97	0,97	1,069
4.4.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,50	88,50	97,351
4.5.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	74,59	74,59	82,04
4.6.	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,224	0,224	0,246
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,88	3,88	4,26
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	1.60	1.60	1.761
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,97	0,97	0,97
4.10.	Jumlah kawasan kumuh Kabupaten yang ditata secara keseluruhan	%	-	-	-
4.11.	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	100	100	100
4.12.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100,00	100,00	100,00
4.13.	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	100,00	100,00	100,00
4.14.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	N.A	N.A	N.A

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
4.15.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,119	0,119	0,131
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,70	0,70	0,72
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	76,88	100,00	100,00
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	82,00	95,00	95,00
5.4.	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15 menit	15 menit	15 menit
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	79,95	100,00	100,00
5.6.	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00
5.7.	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00
5.8.	Cakupan Jumlah Konflik/Gangguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	90,00	80,00	85,00
5.9.	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	95,00	95,00	95,00
5.10.	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	6,00	0,00	0,00
5.11.	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	100	60,00	60,00
5.12.	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	25,00	25,00
5.13.	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	100	0	0
5.14.	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	29,72	83,05
5.15.	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0	0	0
5.16.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100	30,00	52,00
5.17.	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	0	0	0
5.18.	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang dilaporkan	%	100	100	100
5.19.	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	0	0	0
5.20.	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00
5.21.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	N.A	N.A	N.A
5.22.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	N.A	N.A	N.A
5.23.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	514	514	N.A
5.24.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
5.25.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15
6.	SOSIAL				
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	30,45	30,45	40,75
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	12,35	12,35	12,75
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,63	0,63	0,65
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	3,39	3,39	3,48
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	69,12	69,12	70,85
6.10.	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	98,00	98,00	100,00
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1.	TENAGA KERJA				
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	%	NA	NA	0
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	11,36	11,36	6,40
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	68,35	68,35	75,80
1.6.	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	41,11	41,11	43,02
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	36,20	36,20	38,17
1.11.	Perluasan kesempatan kerja sector formal maupun informal	%	3,91	3,91	4,13
1.12.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	25,00	25,00	45,45
1.13.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	33,33	33,33	55,04
1.14.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta /Pekerja	N.A	N.A	109,01
1.15.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	22,03	22,03	39,10
1.16.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	%	7,97	7,97	6,40

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
	layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.				
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,94	49	50
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	12,55	5,71	14
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	6,94	28	30
2.4.	Rasio KDRT	%	0,001	0,001	0,001
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	38,96	35,42	38,96
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	-	-
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	-	-	-
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	-	-	-
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	56,00	18,51	20,00
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	7,45	6,85	7,45
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00
2.14.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	94,14	94,14	95,90
2.15.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	96,56	96,56	95,49
2.16.	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	-	-	-
2.17.	Rasio APM perempuan/laki- laki di Perguruan Tinggi	%	-	-	-
2.18.	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02	1,02	1,02
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	36,00	30,00	40,00
2.20.	Indeks Pembangunan Gender	%	92,90	92,58	91,35
2.21.	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	71,43	50,00	60,00
2.22.	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	40,00	70,00	75,00
2.23.	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	100,00	75,00	80,00
2.24.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,19	0,19	5,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
2.25.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	80,00	80,00	85,00
2.26.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	24,00	24,00	15,00
3. PANGAN					
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	68,78	68,78	70,19
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	3.425	3.425	3.450
		Protein per Kpt	70,00	70,00	70,00
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00	100,00	100,00
3.4.	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/P erkapita /Perhari	3.425,00	3.425,00	3.450,00
3.5.	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	Pak	100,00	100,00	100,00
3.6.	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapi ta/Hari	66,00	66,00	67,00
4. PERTANAHAN					
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	118,95	118,95	100,00
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100,00	33,33	100,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	%	-	-	-
4.4.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-
4.5.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	-	-	-
4.6.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	-
4.7.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-
4.8.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	33,33	33,33	100,00
5. LINGKUNGAN HIDUP					
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	50,00	50,00	50,50
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	90,12	90,12	93,00
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	74,18	74,18	74,20
5.7.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten :	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.8.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Jumlah	1	1	1
5.9.	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standard Minimum	Jumlah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
5.10.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah	-	-	-
5.11.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Jumlah	-	-	-
5.12.	Terverifikasihak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah	-	-	-
5.13.	Penetapan hak MHA	Jumlah	N.A	N.A	N.A
5.14.	Fasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	0	0
5.15.	Fasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	0	0	0
5.16.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	N.A	N.A	N.A
5.17.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada	Tidak ada	Tidak ada
5.18.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00
5.19.	Timbulan sampah yang ditangani	%	85,01	77,13	73
5.20.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	17,45	7,53	8
5.21.	Persentase cakupan area pelayanan	%	90,19	27,27	36,36
5.22.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	90,19	77,13	73
5.23.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,75	50	52
5.24.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0
5.25.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0
5.26.	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	N.A	N.A	N.A
5.27.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	71,50	71,50	72,90
5.28.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Terlaksana/Belum	Terlaksana Belum Mencapai Target	Terlaksana Belum Mencapai Target	Terlaksana Belum Mencapai Target
5.29.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.		28	28	28
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
6.1.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	97,07	97,07	98,00
6.2.	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	33,83	33,83	
6.3.	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	95,63	95,63	
6.4.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,35	0,35	0,45
6.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	ada	ada	ada
6.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah
6.7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,20	97,07	98,09
6.8.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,63	95,63	96,02

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubah an
			2021	2021	2022
6.9.	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00	100,00	100,00
6.10.	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	100,00	100,00	100,00
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100,00	98,55	100
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Nilai	-	228	250
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Nilai	-	227	229
7.4.	Persentase LSM aktif	%	21,36	44,06	80
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	-	0	0
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100,00	100	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	-	418	418
7.9.	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	6	0	22
7.10.	Jumlah desa tertinggal	Jumlah	52	52	27
7.11.	Jumlah status desa mandiri	Jumlah	2	2	145
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,82	0,83	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,96	2,86	2,70
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,93	8,57	9,00
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	-	-	-
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	-	-	-
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	2,4	3-4	2-3
8.7.	Ratio Akseptor KB	Rasio	76,99	78,87	79,50
8.8.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	65,45	67,95	70,00
8.9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	0,98	20,02	15,00
8.10.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,33	12,41	11,00
8.11.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,75	23,73	25,90
8.12.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	88,68	126,77	127,00
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	63,89	61,44	64,00
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	52,35	50,17	55,00
8.15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,25	40,71	41,90
8.16.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	27,27	9,09	10,00
8.17.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	168,18	170,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
8.18.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100,00	100	100
8.19.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	-	-	-
8.20.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
8.21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	125,22	134,91	136,00
8.22.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	50,15	43,75	50,00
8.23.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100,00	95,65	99,94
8.24.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	-	-	-
8.25.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	-	-	-
8.26.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	-	-	-
8.27.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	24-29 Th	24-29 Th	-
8.28.	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	-	-	-
8.29.	Tahapan Keluarga Sejahtera	Jumlah	85.410	85.410	86.000
8.30.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	40,90	43,50
8.31.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	67,95	67,95	70,00
8.32.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,41	12,41	11,00
9.	PERHUBUNGAN				
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	433.908	0	444.755
9.2.	Rasio ijin trayek	Rasio	0,6	0,0	0,62
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.973	0	2.022
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah	1/1/1	0/0/0	1/1/1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	%	8,75	8,75	8,97
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	37,4	37,4	38,34
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	20,67	20,00	21,19
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0657	0,0657	0,0673
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	421300	421300	433.0500
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Jumlah	575,60	575,60	620,60
9.11.	Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan & Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah	78,00	0	5
9.12.	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah	82,00	0	1
9.13.	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,80	0,80	0,80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
9.14.	Kinerja lalu lintas kabupaten	Rasio	0,37	0,37	0,53
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	15,00	15,00	25,00
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80,00	80,00	85,00
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	75,00	75,00	80,00
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	55,00	55,00	60,00
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	35,00	35,00	40,00
10.6.	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	10	10	10
10.7.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	7	7	10
10.8.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	%	25,00	25,00	40,00
10.9.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	%	60,00	60,00	70,00
10.10.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia / Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.11.	Persentase Website OPD	%	41,00	30,00	40,00
10.12.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	25,00	25,00	40,00
10.13.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,00	50,00	60,00
10.14.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	80,00	80,00	85,00
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	46,00	46,00	47,25
11.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	36,77	36,77	37,69
11.3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	25.221	27.000
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	90,13	90,13	92,00
11.5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	22	18	18
11.6.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	N.A	N.A	N.A
11.7.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	90,13	90,13	92,00
12.	PENANAMAN MODAL				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	14
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	17,53	17,53	17,97
12.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	(juta rupiah)	17,56	17,25	17,56
12.4.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7	7
12.5.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2	2
12.6.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14	14

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
12.7.	Lama Proses Perizinan	hari	1-15	1-15	1-15
12.8.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4	4
12.9.	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7	7
12.10.	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3	3	3
12.11.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	20,96	20,96	21,35
12.12.	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,75	87,75	87,90
12.13.	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	85,00	85,00	85,00
12.14.	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13,00	13,00	14,00
12.15.	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	65,00	65,00	65,00
12.16.	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	75,00	75,00	75,00
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100,00	50,00	70,00
13.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,25	N.A	60,00
13.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,35	N.A	50,00
13.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100,00	N.A	40,00
13.5.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	N.A	35
13.6.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	N.A	N.A
13.7.	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	25	31	40
13.8.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	9	2	4
13.9.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	8		10
13.10.	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	1	1
13.11.	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	52,00	50,00	70,00
13.12.	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	54,00	N.A	N.A
13.13.	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	3	N.A	N.A
13.14.	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	N.A	N.A
13.15.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	Jumlah	1/229	1	1
13.16.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	-	N.A	N.A
13.17.	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan yang dilaksanakan	%	100,00	80,00	85,00
13.18.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	50	50	90
13.19.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	50	50	90
14.	STATISTIK				
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.4.	Buku "PDRB"	ada/tidak ada	ada	ada	ada
14.5.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100,00	100,00	100,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
14.6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukakn evaluasi pembangunan daerah.	%	100,00	100,00	100,00
15. PERSANDIAN					
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
15.2.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Sangat Kurang/ Kurang/ Cukup/ Baik/Sa ngat Baik	Baik	Baik	Baik
15.3.	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00
16. KEBUDAYAAN					
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	6	6	6
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah	4	4	4
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	-	-	-
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4	4	4
17. PERPUSTAKAAN					
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	5,15	5,15	5,75
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	52.531	52.377	52.377
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00147	0,00147	0,00147
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Jumlah	2.773	2.505	2.505
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.345	52.377	52.377
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100,00	100,00	100,00
17.7.	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	111	2	2
17.8.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	2	0	0
17.9.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2
17.10.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N.A	N.A	N.A
17.11.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	N.A	N.A	N.A
18. KEARSIPAN					
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	35,75	52,45	52,45
18.2.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	9	7	7
18.3.	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	-	4	4
18.4.	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	13	13	13
18.5.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah	-	-	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
18.6.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah	-	-	-
C. LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1.1.	Produksi perikanan	ton	701.838,7 0	645.919,1 6	679.770,0 4
1.2.	Konsumsi ikan	%	106,53	54,21	55,47
1.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100,00	10,00	10,00
1.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	12,00	41,18	44,08
1.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100	100	100
1.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	N.A	N.A	N.A
1.7.	Nilai tukar nelayan		N.A	N.A	N.A
2. PARIWISATA					
2.1.	Kunjungan wisata	Jumlah	13.216	1.800	4.000
2.2.	Lama kunjungan Wisata	hari	1	1	1
2.3.	PAD sektor pariwisata	%	0,16	114,36	100
2.4.	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	10	11	11
2.5.	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	27
2.6.	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	12	12	12
2.7.	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2
2.8.	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		3	3	3
2.9.	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	2	2	2
2.10.	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	-	2	2
2.11.	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	0	0
2.12.	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1
2.13.	Jumlah Objek wisata yang dikelola oleh Swasta	Jumlah	3	2	2
2.14.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0,0	0,0	2,00
2.15.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	2,2	2,2	4
2.16.	Tingkat hunian akomodasi	%	0,5	0,5	0,5
2.17.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	38,98	38,98	39,95
2.18.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,09	0,09	0,10
3. PERTANIAN					
3.1.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.130.415 ,00	1.249.42	1.132.435 ,00
3.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	26,53	7,00	26,54

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
3.3.	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.631.475,00	2.631.475,00	2.635.435,00
3.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	62,05	53,21	62,40
3.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	-	-	-
3.6.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	-	-	-
3.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	5,84	5,84	6,50
3.8.	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,5	6,5	6,6
3.9.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	10	10
6.	PERDAGANGAN				
6.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	9.380.224.938.000	9.380.224.938.000	N.A
6.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	65,64	65,64	79,32
6.3.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	51,16	51,16	64,19
6.4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70,27	70,27	85,63
6.5.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	57,00	57,00	100,00
7.	PERINDUSTRIAN				
7.1.	Pertumbuhan Industri	%	4,11	4,11	4,87
7.2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20	20	25
7.3.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	5	5	15
7.4.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah	81	81	100
7.5.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	90	90	95
7.6.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	70	70	80
7.7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPIU) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	%	N.A	N.A	N.A
7.8.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A	N.A	N.A
7.9.	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini		Cukup	Cukup	Baik
8.	TRANSMIGRASI				
8.1.	Transmigran swakarsa	KK	50	50	50
8.2.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	12	12	25
8.3.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	254	254

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
D.	PENUNJANG URUSAN				
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100,00	100,00	100,00
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	100,00	100,00	100,00
1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100,00	100,00	100,00
2	KEUANGAN				
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,59	4,59	4,59
2.3.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,45	0,45	0
2.4.	Persentase belanja pendidikan	%	20,00	27,76	27,76
2.5.	Persentase belanja kesehatan	%	10,00	17,13	17,13
2.6.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20	0,20	0,20
2.7.	Persentase Belanja Operasi	%	63,44	63,44	63,44
2.8.	Persentase Belanja Modal	%	17,54	17,54	17,54
2.9.	Persentase Belanja Tidak Terduga	%	0,10	0,10	0,10
2.10.	Persentase Belanja Transfer	%	18,61	18,61	18,61
2.11.	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.12.	Rasio PAD	%	9,41	9,41	9,41
2.13.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
2.14.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
2.15.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	81,33	81,33	81,33
2.16.	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	21	21	21
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,07	5,07	7,00
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	15	15	20
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38	38	40
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	208	208	211
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah	3348	3348	3348
3.7.	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	%	N.A	N.A	N.A

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubaha n
			2021	2021	2022
3.8.	Cakupan PNS yang telah lulus diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat managerial	%	100%	100%	100%
3.9.	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	-	-	-
3.10.	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,776%	1,776%	1,776%
3.11.	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	8%	8%	10%
3.12.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100%	100%	100%
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100,00	100,00	100,00
4.3.	PENERAPAN SIDA :		100,00	100,00	100,00
4.4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00
4.5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100,00	100,00	100,00
5	PENGAWASAN				
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	100,00	92%	92%
5.2.	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	100,00	92%	92%
5.3.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100,00	92%	92%
5.4.	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	100,00	100%	100%
5.5.	Jumlah temuan BPK	Jumlah	12	12	12
6	SEKRETARIAT DEWAN				
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	ada	ada	ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	ada	ada	ada
7	SEKRETARIAT DAERAH				
6.4.	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	85,00	85,00	90,00
6.5.	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	290	290	296

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Capaian	Target Perubahan
			2021	2021	2022
6.6.	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	100	100	100
6.7.	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	NA	NA	-
6.8.	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
6.9.	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100,00	100,00	100,00
6.10.	Persentase Besaran Efisiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	5,96	5,96	5-7
6.11.	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	100,00	100,00	80,00
6.12.	Nilai LPPD	Nilai	N.A	N.A	3.980
6.13.	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	90,00	90,00	100,00
6.14.	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	100,00	100,00	100,00
6.15.	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100,00	100,00	100,00
6.16.	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretariat daerah yang diverifikasi	%	100,00	100,00	100,00
8	KECAMATAN				
6.1.	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80 %	jumlah	22	22	22
6.2.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00
6.3.	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00
6.4.	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	100,00	100,00	100,00

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan gambaran dari kondisi tahun 2021 yang diperoleh dari masing-masing perangkat daerah dan menjadi *baseline* perencanaan, proyeksi tahun 2022 yang diukur berdasarkan hasil evaluasi program/ kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020.

6.4 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Capaian dan Target Kinerja SPM Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2022

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Perubahan RKP
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	8		
1.	PENDIDIKAN						
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	100	100	94,71	99,00
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	30,21	50,00
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	93,66	98,00
2.	KESEHATAN						
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Perubahan RKPD
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)		8	
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100	100	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100
3.	PEKERJAAN UMUM						
3.1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	88,5	89,55
3.2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	98,78	99,14
4.	PERUMAHAN RAKYAT						
4.1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	N.A	N.A

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Nasional	Capaian		Target Perubahan RKPD
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)		8	
5.	TRANTIBUM LINMAS						
5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum	%	100	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Perda dan perkada	%	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
6.	SOSIAL						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%	100	100	100	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mutu layanan di bidang pendidikan dan kesehatan perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan yang berhubungan langsung dengan masing-masing jenis layanan.

6.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sebagaimana diketahui bahwa TPB merupakan agenda pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia serta merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan yang mencakup bidang sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target .

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan.Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5
Capaian dan Target Kinerja TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun
2021 – 2022

No	Indikator	Satuan	Capaian		OPD Penanggung Jawab
			2021	Target Perubahan RKPD 2022	
1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
1.1	Jumlah desa tertinggal	Desa	52	27	DPMD
1.2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	12,59	10,98	BPS
1.3	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	78,46	80,05	Dinas Sosial
1.5	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%	0,64	0,64	Dinas Sosial
1.6	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jiwa	18.870	19.125	Dinas Sosial
1.7	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	98,20	100,00	Dinas Kesehatan
1.8	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	102,50	92,50	Dinas Kesehatan
1.9	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	67,95	68,89	Dinas Kesehatan
1.10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	%	69,56	72,99	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.11	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%	35,73	34,72	Dinas Perumahan & Permukiman
1.12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Sederajat	%	94,14	95,90	Dinas Pendidikan
1.13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	%	96,56	95,49	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	8,48	8,99	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1.15	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%	100,00	100,00	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
1.16	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	70,85	77,23	Dinas Sosial
1.17	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Per 100.000 orang	2,17	0,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.18	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi	0	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100,00	100,00	Dinas Sosial

No	Indikator	Satuan	Capaian		Target Perubahan RKP	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022		
1.20	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Jumlah korban	0	0		Dinas Sosial
2	Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	N.a	N.a		Dinas Ketahanan Pangan
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	5,83	13,00		Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	N.A	N.A		Dinas Ketahanan Pangan
2.3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	N.A	N.A		Dinas Ketahanan Pangan
2.4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita	%	10,58	14,00		Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita	%	11,25	14,00		Dinas Kesehatan
2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	2,15	7,30		Dinas Kesehatan
2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	8,26	36,00		Dinas Kesehatan
2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	55,82	84,98		Dinas Kesehatan
2.9	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor	86,80	91,00		Dinas Ketahanan Pangan
2.10	Nilai Tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja disektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp/Tenaga Kerja	100,01	101,01		Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
2.11	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Ha	0	0		Dinas Pertanian
2.12	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Jumlah	0	0		Dinas Pertanian
2.13	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan : berisiko, tidak berisiko dan risiko yang tidak diketahui	%	N.A	N.A		Dinas Pertanian
3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia					
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	%	233,75	140,25		Dinas Kesehatan
3.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	99,63	100,00		Dinas Kesehatan
3.3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	98,20	100,00		Dinas Kesehatan
3.4	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	0,08	0,07		Dinas Kesehatan
3.5	Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	6,55	6,39		Dinas Kesehatan
3.6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup	Per 1000 KH	9,66	1,71		Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
3.7	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	0,01	0,02	Dinas Kesehatan
3.8	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus per 100.000 penduduk	143,42	306,98	Dinas Kesehatan
3.9	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kasus per 1000 org	0,32	0,38	Dinas Kesehatan
3.10	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	85,71	100,00	Dinas Kesehatan
3.15	Persentase merokok pada penduduk umur <18 tahun	%	4,85	4,70	Dinas Kesehatan
3.16	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	3,57	29,20	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun	%	1,74	11,26	Dinas Kesehatan
3.18	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	%	0,22	0	Dinas Kesehatan
	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	%	0	0	Dinas Kesehatan
3.19	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	67,95	68,89	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.20	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	67,95	68,89	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.21	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	19,95	20,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.22	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	Per 1.000	N.A	N.A	Dinas Kesehatan
3.23	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,86	2,70	Dinas Kesehatan
3.24	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	84,26	100,00	Dinas Kesehatan
3.25	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3.26	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk)	rasio	5,46	5,73	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	98,89	98,50	Dinas Pendidikan
4.1	Persentase SD/MI berkreditasi minimal B	%	66,87	78,95	Dinas Pendidikan
4.2	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	20,95	33,33	Dinas Pendidikan
4.4	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Sederajat	%	94,36	94,47	Dinas Pendidikan
4.5	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Mts/ sederajat	%	80,93	95,73	Dinas Pendidikan
4.6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Tahun	8,35	8,60	BPS
4.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	91,85	98,78	Dinas Pendidikan
4.8	Jumlah remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TiIK)	Orang	4080,00	4161,00	Dinas Pendidikan
4.9	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	93,62	98,78	Dinas Pendidikan
4.10	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	%	93,96	98,80	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Ranperda	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,08	0,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.3	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	0,02	0,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.4	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
5.6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	5,71	11,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.7	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	0	12,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.8	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	12,41	12,30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
6.2	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Ltr/dtk	88,38	89,90	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
6.3	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	0	0	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
6.4	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	95,00	95,00	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
6.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	94,75	98,78	Dinas Perumahan & Permukiman
6.6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah	227	227	Dinas Kesehatan
6.7	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	227	227	Dinas Kesehatan
6.8	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0,85	0,98	Dinas Perumahan & Permukiman
6.9	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%	N.A	N.A	Dinas Perumahan & Permukiman

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
6.10	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kategori	Camar Ringan	Baik	Dinas Lingkungan Hidup
6.11	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan	Kasus	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
6.12	Jumlah DAS Prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Sungai	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup
7	Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				
7.1	Rasio elektrifikasi	%	N.A	N.A	PLN
7.2	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah	N.A	N.A	PLN
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	%	10,44	11,54	BPS
8.2	PDB per kapita	Juta	48,55	57,02	BPS
8.3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	N.A	N.A	BPS
8.4	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	49,78	48,65	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.5	Persentase tenaga kerja formal.	%	25,65	26,53	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.6	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan	%	42,55	42,54	Dinas Koperasi & UMKM
8.7	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	16.025	16.110	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.8	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	4,80	4,78	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.9	Persentase setengah pengangguran.	%	74,35	73,26	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.10	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	11,57	10,64	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.11	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Jumlah Perusahaan	34	40	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
8.12	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	0,02	0,05	Dinas Pariwisata
8.13	Jumlah wisatawan mancanegara.	Org	0	100	Dinas Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
8.14	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Org	1.800	4.000	Dinas Pariwisata
8.15	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata	Juta Rupiah	25.000.000	50.000.000	Dinas Pariwisata
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				
9.5	Jumlah bandara	Unit	1	1	Dinas Perhubungan
9.6	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	N.A	N.A	Dinas Perhubungan
9.7	Jumlah pelabuhan strategis	Unit	1	1	Dinas Perhubungan
9.8	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah Sektor Industri Manufaktur	%	N.A	N.A	Dinas Lingkungan Hidup
10	Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara				
10.1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Desa	36	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	52	27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	145	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	78,46	80,05	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
11.1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	87,78	88,75	Dinas Perumahan & Permukiman
11.2	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	N.A	63,00	Dinas Perhubungan
11.3	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Org	272	89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.4	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Sistem	0	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Nilai	N.A	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKP	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
11.6	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	77,13	73,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.7	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	%	N.A	PM	
11.8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dok	N.A	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
12.1	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	Perusahaan	Tidak Ada	2	Dinas Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	%	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
12.3	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	845,59	2.500	Dinas Lingkungan Hidup
12.4	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Usaha	Tidak Ada	2	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dok	N.A	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Org	272	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dok	N.A	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
14.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100,00	100,00	Dinas Perikanan
14.2	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Perda	5	5	Dinas Perikanan
14.3	Jumlah nelayan yang terlindungi	Org	280	1.000	Dinas Perikanan
15	Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
15.1	Proporsi Lahan Kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	N.A	PM	Dinas Lingkungan Hidup
15.2	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	0	1	Dinas Lingkungan Hidup
15.3	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21	%	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan				

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target Perubahan RKPD	OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	
16.1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	N.A	PM	Kepolisian
16.2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Org	1	1	Kesbangpol
16.3	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	N.A	PM	Kepolisian
16.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	N.A	PM	Kepolisian
16.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	N.A	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.6	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	N.A	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	N.A	PM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.8	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	%	N.A	PM	Kepolisian
16.9	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	93,29	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.10	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	%	N.A	20,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.11	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	%	0,06	8,00	Bappelitbangda
16.12	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	64,28	80,00	Sekretariat Daerah
16.13	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	%	N.A	N.A	Sekretariat Daerah
16.14	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	5,71	8,57	Sekretariat Dewan
16.15	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	N.A	PM	Sekretariat Dewan
16.16	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	95,72	98,11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
16.17	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	92,09	99,15	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
16.18	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedia/Tidak Tersedia	Ada	Ada	Dinas Komunikasi,

No	Indikator	Satuan	Capaian		Target Perubahan RKPD		OPD Penanggung Jawab
			2021	2022	2021	2022	
							Statistik, dan Persandian
16.19	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	%	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
17.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	0,74	0,60	0,60	0,60	Badan Pendapatan Daerah
17.2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,15	0,14	0,14	0,14	Badan Pendapatan Daerah
17.3	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	55,89	45,23	45,23	45,23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17.4	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	96,78	100,00	100,00	100,00	BPS
17.5	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BPS
17.6	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Nilai	8	9	9	9	BOS
17.7	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%	N.A	PM	PM	PM	Bappelitbangda
17.8	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Tersedia/Tidak Tersedia	N.A	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
17.9	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Org	13.324	13.500	13.500	13.500	BPS
17.10	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	BPS

Tabel di atas menunjukkan target dan capaian masing-masing indikator TPB yang diperoleh dari BPS maupun perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang dimuat tersebut, diketahui bahwa masih terdapat indikator yang belum mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dimasa depan, khususnya program/kegiatan yang terkait langsung dengan indikator.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Perubahan RKPD Kabupaten Luwu tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2022 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan.

7.2 Kesimpulan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu.
4. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian OPD.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2022.

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.


BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG